

**ANALISIS FENOMENA CALON TUNGGAL PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI TAHUN 2024**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Upaya Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial Pada Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Fakultas Hukum

Oleh :

M. Aulia Zikri

NIM. B1B221060

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024

Nama : M. Aulia Zikri
NIM : B1B221060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II untuk
Diajukan ke Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Politik

Jambi, 13 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Cholillah Suci Pratiwi, S.IP, M.A.
NIP. 199205162022032012

M. Wira Anshori, S.IP., M.Si.
NIP. 199211172024061001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024

Nama : M. Aulia Zikri
NIM : B1B221060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 13 Agustus 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ian Pasaribu, S.I.P., M.Si.	Penguji Utama	
2.	Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A.	Ketua Penguji	
3.	M. Wira Anshori, S.IP., M.Si.	Anggota	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukurku kepada Allah SWT, Karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Almarhum Abah Baihaki. T tercinta*
- ❖ *Emak Aminah tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang tercinta*
- ❖ *Almamaterku tercinta Universitas Jambi*

LEMBAR MOTTO

"Kamu merawat Ibumu sambil menunggu kematiannya, Sementara Ibumu merawatmu sambil mengharapkan kehidupanmu"

~Umar Bin Khattab

"Jangan hukum aku dengan kehilangan lagi tuhan, sudah terlalu banyak yang hilang dalam hidup ku"

~ Hatake Kakashi (Hokage ke-6) Eps 108:12:23

"kita mungkin tidak banyak waktu yang tersisa jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk orang terdekat, keputusan yang kadang kita buat bisa menakutkan atau menjadi ujian, bahkan mungkin membuat kita bertanya-tanya. Untuk siapa kita melakukan perjalanan kita selama ini, tapi yang jelas hal-hal yang tidak terduga yang muncul dihadapan kita bisa membuat hidup lebih bermakna"

~ Metter Cars On The Road Chapter 9 Menit 7:09

SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Aulia Zikri
NIM : B1B221060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Analisis Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024
Alamat : Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
No. HP : 0882-9352-7358

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 13 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan

M. Aulia Zikri
NIM. B1B221060

ABSTRACT

The phenomenon of a single candidate in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Batang Hari Regency has raised various democratic issues worth further investigation. This study aims to explore the problems of political participation among the people in a single-candidate election and to identify the factors contributing to the emergence of this situation. The analysis is based on Herbert McClosky's theory of political participation and its development by Verba & Nie (1972), which outlines four dimensions: cognitive, affective, evaluative, and behavioral. This research employs a descriptive qualitative method, collecting primary data through in-depth interviews with youth, community leaders, and local residents, and secondary data from official documents and publications. The findings reveal that political participation in Batang Hari is fraught with challenges, including a lack of understanding about the empty box option, widespread disappointment over the absence of electoral choices, and criticism of political parties' failure to develop qualified future leaders. In response, some community groups organized symbolic campaigns supporting the empty box to express their democratic concerns. Contributing factors to the emergence of a single candidate include the influence of the national coalition (KIM Plus), weak party-based cadre development, high electability of the incumbent, and the disappearance of political rivalry. These findings suggest a regression in local democratic quality and underline the urgent need to revitalize the role of political parties in fostering healthy electoral competition.

Keywords: *political participation, single candidate, local democracy*

INTISARI

Fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batang Hari tahun 2024 menimbulkan berbagai persoalan demokrasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana problematika partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada calon tunggal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya situasi tersebut. Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian menggunakan teori partisipasi politik menurut Herbert McClosky dan pengembangannya oleh Verba & Nie (1972) yang mencakup empat dimensi: orientasi kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer melalui wawancara mendalam kepada pemuda, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, serta data sekunder dari dokumentasi dan publikasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Batang Hari dalam Pilkada calon tunggal mengalami tantangan serius, mulai dari minimnya pemahaman terhadap keberadaan kotak kosong, kekecewaan masyarakat terhadap tidak adanya pilihan alternatif, hingga kritik terhadap lemahnya kaderisasi partai politik. Masyarakat menunjukkan berbagai respons, termasuk aksi kampanye kotak kosong sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi calon tunggal. Di sisi lain, beberapa faktor yang mendorong terjadinya calon tunggal adalah kuatnya pengaruh koalisi nasional (KIM Plus), kegagalan partai politik dalam mencetak kader, elektabilitas tinggi calon petahana, serta hilangnya rivalitas politik yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan kemunduran kualitas demokrasi lokal dan memperlihatkan pentingnya revitalisasi peran partai politik dalam menjaga iklim kompetisi yang sehat dalam Pilkada mendatang.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pasangan Calon Tunggal, Demokrasi Lokal

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024”** dapat terselesaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjadi seorang sarjana yang paripurna dan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan suatu karya ilmiah itu tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moril. Penulis mengucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang yang tiada terhingga dan selalu mendukung penulis dalam suka maupun dalam duka. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibunda tercinta yang selalu mendampingi penulis di mana pun dan kapan pun dan yang selalu memberikan kasih sayang serta motivasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Cholillah Suci Pratiwi, S.IP, M.A. serta Bapak M. Wira Anshori, S.IP., M.Si. yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan tulus dan sabar serta penuh keikhlasan, sehingga penulis menyelesaikan

skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan sarana dan prasarana kepada mahasiswa Universitas Jambi melalui kebijakan yang telah ditetapkan dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama penulis melaksanakan studi.
3. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D. Ketua Jurusan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran serta dorongan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Sutri Destemi Elsi, S.IP., M.IP, Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi agar dapat menjadi sarjana yang berkualitas dan berintegritas.
5. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP.,M.I.P., Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji Skripsi dalam penyusunan skripsi penulis yang telah memberikan dukungan saran serta arahan selama menempuh masa studi.
6. Seluruh Dosen dan staf Tendik pada prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan

berlangsung dan membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan kuliah.

7. Teruntuk Abah Baihaki. T tercinta (*almarhum*) yang meskipun telah tiada, beliau akan tetap menjadi sosok yang selalu ada disetiap perjalananku kedepannya kelak, beliau yang selalu mendukung dan percaya memberikan kesempatan disetiap keputusanku. Kehadiranmu suatu anugrah dan kehilanganmu menjadikan motivasi bagi gadis yang masih membutuhkan sosok Bapak untuk bisa terus maju kedepannya.
8. Kepada Emak ku Aminah, S.Pd.I.,Gr wanita terhebat sekaligus pintu surgaku. Beliau yang menjadi pilar keluarga dengan doanya yang tidak pernah putus dan kasih sayang yang tulus serta dukungannya. Aku bersyukur dengan betapa kerasnya engkau mendidikku sampai pada akhirnya dititik yang sekarang ini. Sangat amat berterima kasih karena telah menjadi mamak sekaligus pengganti sosok bapak saat ini.
9. Kepada saudara-saudara ku, Kulop (H. M.Khairun Nizom, Lc), Ente (Muhammad Iqbal, S.T), adek Ayu, Ayuk Wilda, Ayuk Mayang dan adek Mecca, yang selalu siap sedia membantu, menemani, menghibur dan selalu memberi motivasi dalam saya kesusahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Mari kita menjadi kebanggan untuk kedua orang tua kita
10. Kepada KPU Kabupaten Batang Hari, pengurus DPC PPP Batang Hari, dan seluruh informan dan pihak yang terlibat. Yang telah bersedia memberikan data dalam kelancaran penelitian guna pemenuhan data dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada Sahabat-sahabatku Genk Pondok awak dan veteran yang telah memebrikan semangat dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan bercada tawa penulis.
12. Seluruh teman-teman Ilmu Politik angkatan 2021 yang telah menemani hari-hari penulis selama berada di prodi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jambi,13 Agustus 2025
Penulis

M. Aulia Zikri

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Landasan Teori	16
1.5.1 Partisipasi Politik.....	16
1.6 Kerangka Pikir	25
1.7 Metode Penelitian	26
1.7.1 Jenis Penelitian	27
1.7.2 Fokus Penelitian.....	28
1.7.3 Lokasi Penelitian.....	28
1.7.4 Sumber Data.	28
1.7.5 Teknik Penentuan Informan.....	29
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
1.7.7 Teknik Analisis Data.	33

1.7.8 Keabsahan Data.	33
----------------------------	----

BAB II PEMILIHAN KEPALA DAERAH, PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN KABUPATEN BATANG HARI 35

2.1 Kabupaten Batang Hari..... 36

2.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Batang Hari	36
---	----

2.1.2 Gambaran Politik dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari	37
---	----

2.1.3 Lambang Kabupaten Batang Hari	39
---	----

2.2 Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 40

2.2.1 Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024	42
---	----

2.2.2 Lambang Pilkada Serentak Tahun 2024.....	43
--	----

2.3 Pilkada Serentak Kabupaten Batang Hari 44

2.3.1 Peserta Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2024	46
--	----

2.3.2 Pasangan M Fadhil Arief dan Bahktiar	48
--	----

2.3.3 Hasil Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2024	51
--	----

BAB III FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024..... 53

3.1 Problematika Fenomena Kotak Kosong Pada Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Batang Hari..... 53

3.1.1 Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Politik Masyarakat terhadap Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong (Kognitif)	55
--	----

3.1.2 Persepsi Emosional dan Keterikatan Masyarakat terhadap Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Batang Hari (Afektif)	61
---	----

3.1.3 Evaluasi Masyarakat terhadap Proses dan Pilihan Politik pada Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 (Evaluatif)	67
---	----

3.1.4 Aksi Politik Masyarakat dalam Menyikapi Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 (Perilaku Aksi Nyata).....	72
---	----

3.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Calon Tunggal Dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari	81
3.2.1 Adanya Pengaruh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM) yang memonofoli pengusungan calon di berbagai daerah di Indonesia	82
3.2.2 Keterhambatan dan ketidak Beranian Partai Politik Melakukan Kaderisasi dan Mengajukan Calon sendiri	83
3.2.3 Tingginya Elektabilitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Calon Petahan	84
3.2.4 Absennya Rivalitas yang dianggap Sepadan dengan elektabilitas Petahan	85
 BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA	92
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Halaman
1.1 Jumlah DPT Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2024.....	2
1.2 Perbandingan Dukungan Partai Politik Pengusung Fadhil-Bahktiar Anantara Partai Politik Parlemen dan Non Parlemen.....	6
1.3 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024.....	8
1.4 Daftar Informan.....	30
2.1 Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari dari Masa ke masa	37
2.2 Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024	42
2.3 Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2024	52
3.1 Angka Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2024	63
3.2 Daftar Daerah Calon tunggal Pilkada Serentak Indonesia	78

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Halaman
1.1 Total Dukungan Bapaslon Fadhil – Bahktiar Pada Pilkada	7
1.2 Hasil Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2024.....	9
1.3 Kerangka Pikir.....	25
2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Batang Hari	35
2.2 Lambang Daerah Kabupaten Batang Hari	39
2.3 Lambang Pilkada Serentak Tahun 2024.....	43
2.4 Pasangan M. Fadhil Arief dan Bakhtiar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Pada Pilkada Serentak Tahun 2024.....	47
3.1 Bentuk postingan sosialisasi KPU Kab Batang Hari	59
3.2 Kampanye kotak kosong oleh masyarakat Kab Batang Hari.....	73

DAFTAR SINGKATAN

Bacalon	: Bakal Calon
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Cakada	: Calon Kepala Daerah
Kab	: Kabupaten
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MFA	: Muhammad Fadhil Arief
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDIP	: Partai Demokrasi Pembangunan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024¹, peraturan komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tertanggal 26 Januari 2024, bunyi Pasal 9 PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024.

Dengan demikian pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024 akan digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.²

Provinsi Jambi juga termasuk salah satu dari 37 Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum

¹ Komisi Pemilihan Umum, 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024', 2024.

² <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>

(KPU), dengan jumlah total pemilih tetap Provinsi Jambi pada Pilkada Serentak 2024 sebanyak 2.695.348 orang yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pada dasarnya putusan ini tertuang dalam Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jambi. Keputusan ini diambil setelah dilakuka rekapitulasi dan verifikasi yang cermat oleh pihak KPU untuk memastikan data pemilih yang valid dan akurat³. Dijelaskan sesuai dengan data yang sudah direkap oleh tim KPU disetiap provinsi masing-masing sepertihalnya di Provinsi Jambi memiliki data pemilih tetap disetiap kabupaten dengan data yang direkap oleh tim KPU Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut.

Tabel. 1.1
Jumlah DPT Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2024

Nama kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				LK	PR	Jumlah
Batanghari	8	124	980	113.325	108.878	222.203
Kerinci	16	287	483	98.237	100.106	198.343
Merangin	24	215	634	141.399	138.464	279.863
Sarolangun	10	158	544	108.160	105.882	214.042
Muaro Jambi	11	155	796	162.337	155.409	317.746
Tanjung Jabung Barat	13	134	592	121.850	115.147	236.997
Tanjung Jabung Timur	11	93	507	88.927	87.553	176.480
Bungo	17	153	627	134.722	128.995	261.738
Tebo	12	112	569	134.672	128.995	263.667
Kota Jambi	11	62	943	224.882	232.469	457.351
Sungai Penuh	8	69	156	35.885	36.849	72.734

Sumber: Website KPU Provinsi Jambi, 2024

Dengan dilaksanakannya pilkada ini seharusnya bisa diselenggarakan atas dasar universal, sama, dan rahasia sehingga semua pemilih dapat memilih wakil-

³ Pemilihan Umum and others, 'Jdih.Kpu.Go.Id/Jambi', 2024, pp. 1–5. Diakses 22 September 2024

wakil mereka dalam kondisi kesetaraan, keterbukaan, dan transparansi yang merangsang persaingan politik. Untuk itu, hak-hak sipil dan politik yang penting dan lebih khusus di antara mereka, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk kebebasan ekspresi, akses informasi dan hak untuk mengatur partai politik dan melaksanakan kegiatan politik. Partai organisasi, kegiatan, keuangan, pendanaan, dan etika harus benar diatur secara berimbang dalam rangka untuk memastikan integritas dari proses demokrasi⁴.

Pilkada guna membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, memiliki fungsi-fungsi, yaitu: pertama, fungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan; kedua, pemilu sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit penguasa; ketiga, fungsi perwakilan politik, pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dipercaya yang duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif; keempat, sebagai sarana legitimasi politik sehingga keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan; dan kelima, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.⁵

Oleh sebab itu, KPU provinsi Jambi menegaskan pentingnya masyarakat yang sudah terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Jambi tahun 2024 demi kelancaran proses demokrasi di Provinsi Jambi yang bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang valid dan sarana mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan rakyat. Salah satu cara

⁴ A. Gau Kadir, 'Dinamika Partai Politik Di Indonesia', *Sosiohumaniora*, 16.2 (2014), p. 132, doi:10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724.

⁵ Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Ifitah, and Uun Dewi Mahmudah, 'Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Jurnal Supremasi*, 9.2 (2019), pp. 17–27, doi:10.35457/supremasi.v9i2.793.

dalam memilih atau menetapkan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, sehingga dengan sendirinya ada beragam sistem pemilihan umum sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang disebut dengan pemilihan umum.⁶

Berkualitas atau tidaknya suatu pilkada berkaitan dengan sistem demokrasi didalamnya beserta peran rakyat dalam memilih calon pemimpin, baik itu memilih presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan anggota legislatif. Sesuai dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang tentang kedaulatan yang berbunyi “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”⁷, Kedaulatan inilah yang kemudian menjadikan segala tindakan dan perilaku negara mendapatkan legitimasinya sehingga dapat dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya atas apa yang telah direncanakan untuk kemudian menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara. Karena hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual.

Setelah ditetapkannya pembukaan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang dibuka tiga hari, yakni dari tanggal 27 sd 28 Agustus 2024 dari pukul 08:00 sd 16:00 WIB, sedangkan tanggal 29 Agustus 2024 dari pukul 08:00 sd 23:59 WIB, Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Batanghari, Jl, Jend. Sudirman KM 1 Muara Bulian. Berdasarkan dari waktu yang telah ditentukan hanya ada satu pasangan yang hanya mendaftarkan dirinya ke KPU Kabupaten Batanghari, yakni pasangan petahana Muhammad Fadhil Arief, SE dan pasangannya Bahktiar, SP

⁶ Marulak Pardede, ‘Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.1 (2014), p. 85, doi:10.33331/rechtsvinding.v3i1.58.

⁷ S Nugroho, *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan (Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (2) Uudnri 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014 <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25034>>.

tercatat pada tanggal 28 Agustus 2024 secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Batanghari sebagai peserta Pilkada mendatang.

Pilkada yang dilaksanakan KPU Batanghari sudah akan dipastikan hanya ada satu calon kadidat yang ikut serta dalam kompetisi ini, akan tetapi KPU Batanghari mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang masa pendaftaran 3 sampai 5 September. Dan waktu pendaftaran dari pukul 08.00 - 16.00 WIB untuk tanggal 3 dan 4. Dan pukul 08.00 - 23.59 WIB ditanggal 5 September meski perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari diperpanjang. Potensi untuk munculnya bakal calon baru di Kabupaten Batanghari masih cukup minim. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pilkada Batanghari akan tetap dilaksanakan dengan satu pasangan calon melawan kotak kosong.⁸

Dengan adanya calon tunggal dalam Pilkada yang terjadi di provinsi Jambi tepatnya kabupaten Batanghari dalam proses pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik. Keadaan dari munculnya calon tunggal merupakan keadaan yang secara prosedural tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa. Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.⁹ Munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada dikabupaten Batanghari ini menjadi perbincangan yang hangat tidak hanya di provinsi Jambi tapi juga di tingkat Nasional.

⁸ <https://jambi.tribunnews.com/2024/08/31/masa-pendaftaran-bakal-cabup-dan-cawabup-diperpanjang-berikut-akumulasi-suara-sah-pileg-batanghari> diakses 31 Agustus 2024

⁹ Endah Yuli Ekowati, 'Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada', *Jurnal Transformative*, 5.1 (2019), pp. 16–37 <<https://core.ac.uk/download/pdf/230239078.pdf>>.

Pada dasarnya, kabupaten yang berjuduk Bumi Serentak Bak Regam ini menjadi salah satu dari 35 daerah di Indonesia yang akhirnya menggelar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya diikuti satu pasangan calon alias calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kepastian ini diperoleh setelah KPU Kabupaten Batang Hari mengeluarkan Keputusan Nomor 644 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tertanggal 22 September 2024.¹⁰ Hal ini didasari oleh peraihan kursi di DPRD kabupaten Batanghari di Pemilu 2024 yang mendukung pasangan Petahana, yang berhasil meraih dukungan sebagai berikut.

Tabel. 1.2
Perbangdiangan Dukungan Partai Politik Pengusung Fadhil-Bahktiar
Anantara Partai Politik Parlemen dan Non Parlemen

NO	Pendukung	suara	Persentase%
1	Partai Politik Parlemen	167.161	95,47%
2	Partai Politik Non parlemen	7.932	4,53%
3	Ambang batas pencalonan	17.510	10%

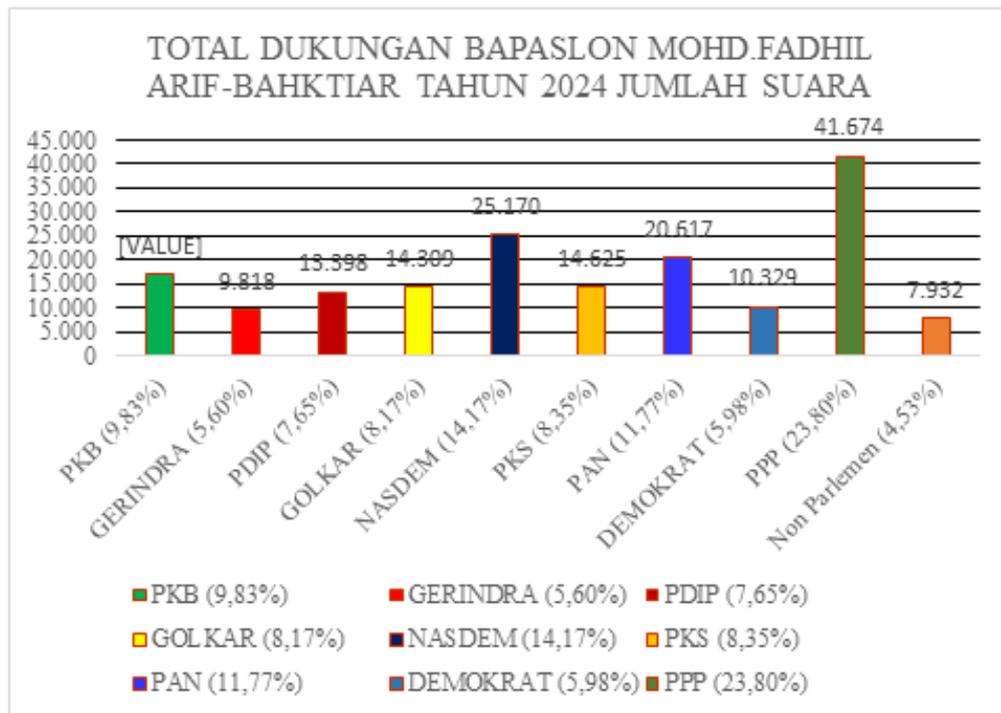
Sumber: Website Kompas.com, 2024

Data di atas merupakan persentase ini merupakan hasil dari Sembilan partai politik peraih kursi DPRD kabupaten Batanghari dari pemilu 2024 yang seluruhnya mendukung petahana, sementara sembilan partai politik non parlemen (gagal meraih kursi), sehingga tidak akan mampu memenuhi syarat ambang batas minimal perolehan suara sah yang ditetapkan KPU Kabupaten Batanghari sehingga tidak akan mampu memenuhi syarat ambang batas minimal perolehan suara sah yang ditetapkan KPU kabupaten Batanghari untuk mengusungkan calon Bupati dan

¹⁰ <https://jambi.tribunnews.com/2024/09/22/kpu-tetapkan-satu-calon-tunggal-pilbup-batanghari> diakses 5 September 2024

Wakil Bupati periode pemilihan tahun 2025-2030. Akan tetapi Pasca putusan MK tersebut, berdasarkan hasil pemilu 2024, hanya tiga partai politik di kabupaten Batanghari yang tanpa berkoalisi dapat mengusung pasangan calon di Pilkada Batanghari 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar. 1.1
Total Dukungan Bapaslon Fadhil – Bahktiar Pada Pilkada
Kabupaten Batang Hari tahun 2024



Sumber : Website Kompas.com, 2024.

Sedangkan sembilan partai politik non parlemen (Partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, PBB, PSI, Perindo, Garuda dan Ummat) jika berkoalisi dan digabungkan juga tidak memenuhi syarat mengusung paslon sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024 mendatang maka KPU kabupaten Batanghari akhirnya menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari 2024 melalui keputusan KPU kabupaten Batanghari Nomor 644 Tahun 2024 dengan menetapkan pasangan calon

Muhammad Fadhil Arief, SE sebagai Calon Bupati Batanghari dan Bahktiar, SP sebagai Calon Wakil Bupati Batanghari.¹¹

Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Batanghari yang dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024 untuk periode jabatan 2025-2030 dengan data pemilih terdaftar dari KPU Batanghari per 3 desember 2024 dengan data sebagai berikut.

Tabel. 1.3
Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2024.

NO	Pemilihan Umum Bupati Batanghari 2024	Jiwa/Orang	Persentase%
1	Kotak kosong	32.667	22.17%
2	Muhammad Fadhil Arief dan Bahktiar	114.674	77.83 %
3	Jumlah	147.341	100%
4	Suara sah	147.341	96.17%
5	Suara tidak sah	5.870	3.83%
6	Jumlah	153.211	100%
7	Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi	218.007	70,28
8	Tidak ikut serta memilih	64.796	29,72%
	Jumlah	282.803	100%

Sumber: Website KPU Kabupaten Batang Hari, 2024.

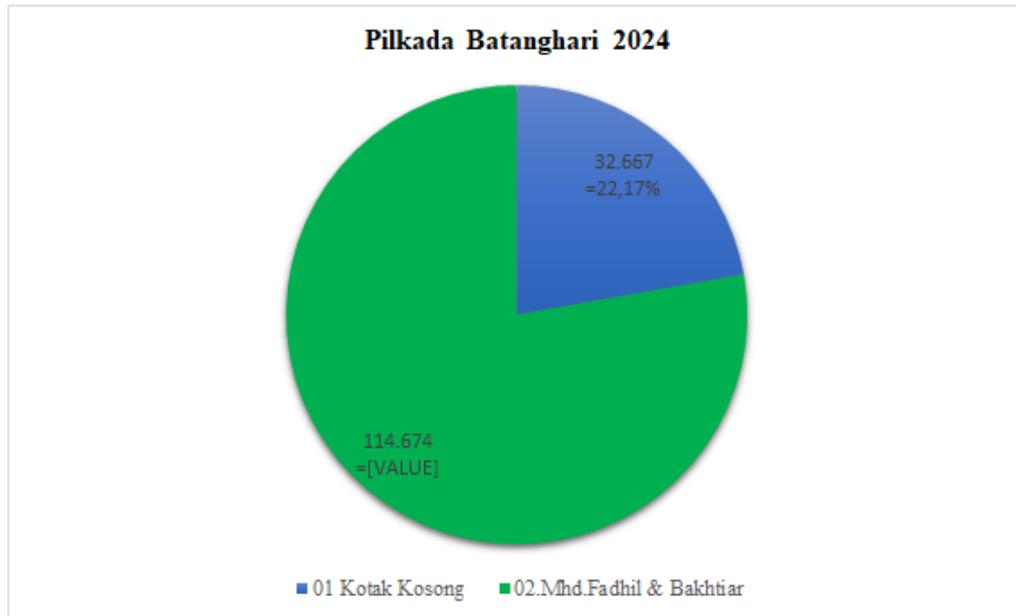
Dengan demikian pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE dan pasangannya Bahktiar, SP dapat dikatakan menang dengan mudah sebanyak 77,83 % perolehan suaranya, walaupun hampir sebanyak 30% masyarakat tidak ikut serta memilih,¹² sehingga perolehan suara

¹¹ <https://www.kompasiana.com/shakilla/66ce5ed1c925c4321c37d692/pilkada-batanghari-2024-fadhil-bahktiar-resmi-melawan-kotak-kosong> diakses 28 Agustus 2024

¹² <https://jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari> diakses 3 Desember 2024

yang sangat jauh berbeda dengan kotak kosong berikut hasil pilkada yang diselenggarakan KPU Batanghari.

Gambar. 1.2
Hasil Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2024



Sumber : Website KPU Kabupaten Batang Hari, 2024.

Berdasarkan dengan persentase yang ada diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Batanghari masih menginginkan kepemimpinan Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar dengan terbuktinya terpilih Kembali menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari period ke-dua masa jabatan 2025-2030.¹³ Hal ini juga tidak luput dengan hasil kerja keras pasangan calon ini dalam membangun Batanghari menjadi lebih maju dengan slogan Batanghari Tangguh. Selain itu Fadhil-Bakhtiar berhasil melakukan perubahan besar di Bumi Kabupaten dengan Motto Bumi Serentak Bak Regam, saat ini perubahan wajah kota melalui pembangunan alun-alun dan pedestrian dan wahana Aek meliuk yang selalu ramai dikunjungi orang-orang.

¹³ <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jambi/batanghari> diakses 3 Desember 2024

Hal ini, sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ini. Selain menata wajah kota, maupun melakukan pembangunan di setiap kecamatan hingga ke desa, pembangunan jalan penghubung desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani hingga penerangan lampu jalan, benar-benar suatu perubahan yang menjawab kebutuhan masyarakat selama ini.¹⁴ Walaupun baru menjabat sekitar tiga tahun, berkat tangan dinginnya Kabupaten Batang Hari berubah pesat, dengan pembangunan yang merata di segala bidang dan dalam tempo dua tahun terakhir ini Kabupaten Batanghari mengeliat membangun jalan yang menghubungkan antar desa/ kelurahan dan antar kecamatan sudah 120,75 km dibangun, selain itu juga juga pembangunan jalan lingkungan di setiap wilayah dalam Kabupaten Batanghari.¹⁵

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu, *Pertama* yaitu penelitian jurnal dari Maringan Panjaitan,(2020) yang berjudul Analisis proses dan factor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada pilkada serentak 2020, menyoroti peran lobi politik dan kurangnya niat publik untuk mencalonkan diri melawan petahana yang kuat namun hal ini dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan dirinya sendiri anatar lain sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Koneksi Politik: Lobi sering melibatkan membangun hubungan antara aktor politik dan pemangku kepentingan yang berpengaruh. Ini dapat menciptakan jaringan dukungan untuk kandidat tertentu, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan visibilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk kampanye yang sukses. Dalam kasus Gunungsitoli, lobi politik

¹⁴ <https://suarakalangan.com/2024/08/10/fadhil-arief-bupati-dengan-segudang-prestasi/>

¹⁵ [https://selayangnews.id/tiga-tahun-kepemimpinan-fadhil-bakhtiar-batanghari-terus-maju-dan-berkembang/diakses 26 Februari 2024](https://selayangnews.id/tiga-tahun-kepemimpinan-fadhil-bakhtiar-batanghari-terus-maju-dan-berkembang/diakses%2026%20Februari%202024)

merupakan langkah penting dalam munculnya kandidat tunggal, karena membantu mengkonsolidasikan dukungan di sekitar petahana.

2. **Membatasi Kompetisi:** Ketika lobi sangat condong ke arah satu kandidat atau parpol, hal itu dapat mencegah calon potensial lainnya memasuki perlombaan. Studi ini menunjukkan bahwa lingkungan lobi politik di Gunungsitoli berkontribusi pada kurangnya niat publik untuk mencalonkan diri, karena kekuatan petahana menyulitkan penantang untuk bersaing secara efektif.
3. **Mempengaruhi Dukungan Partai:** Lobi dapat mengarah pada konsolidasi dukungan partai dibelakang satu kandidat, seringkali dengan mengorbankan kandidat potensial lainnya. Jurnal tersebut mencatat bahwa kandidat petahana mampu terlibat dalam politik transaksional, secara efektif “membeli” dukungan partai, yang selanjutnya memperkuat posisi mereka sebagai kandidat tunggal dalam pemilihan.
4. **Membentuk Persepsi Publik:** Melalui upaya lobi, kandidat dapat mempengaruhi opini publik dan narasi media, yang dapat meningkatkan popularitas dan kelangsungan hidup mereka. Studi ini menekankan bahwa paparan dan dukungan dari media dapat secara signifikan berdampak pada kesadaran dan preferensi pemilih, sehingga mempengaruhi kemunculan kandidat.
5. **Menciptakan Lingkungan yang Menguntungkan:** Lobi yang efektif dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih menguntungkan kandidat tertentu dari pada yang lain.

Ini termasuk mengamankan dukungan, pendanaan, dan aliansi strategis yang dapat mencegah kandidat lain memasuki perlombaan. Jurnal ini menyoroti bahwa

kekuatan politik dan upaya lobi petahana yang kuat menciptakan lingkungan yang menantang bagi kandidat alternatif untuk muncul. Singkatnya, lobi secara signifikan berdampak pada munculnya kandidat dengan memfasilitasi koneksi, membatasi persaingan, mempengaruhi dukungan partai, membentuk persepsi publik, dan menciptakan lingkungan politik yang menguntungkan.¹⁶

Kedua yaitu, penelitian jurnal dari Dedi Mulyadi (2024) yang berjudul fenomena “kotak kosong” (kotak kosong) pada Pemilu Daerah Indonesia 2024, yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang disajikan. Ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses pemilihan, termasuk partisipasi politik yang rendah dan dampak dominasi partainya. Fenomena “kotak kosong” atau kotak kosong dalam pemilu, khususnya dalam konteks Pilkada 2024 di Indonesia, dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang saling terkait antara lain sebagai berikut:

1. Hak Konstitusional Pemilih: Opsi kotak kosong diakui sebagai pilihan konstitusional, memungkinkan pemilih untuk menyatakan ketidakpuasan dengan kandidat yang disajikan. Dukungan hukum ini melegitimasi pilihan untuk tidak memilih kandidat mana pun, yang mencerminkan aspek penting dari hak dan preferensi pemilih.
2. Ketidakpuasan Politik: Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kotak kosong adalah ketidakpuasan umum di kalangan pemilih mengenai kandidat yang tersedia. Banyak pemilih merasa bahwa para kandidat tidak cukup

¹⁶ Maringan Panjaitan and Simson Berkat Hulu, ‘Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1.2 (2021), pp. 116–30, doi:10.51622/jispol.v1i2.411.

mewakili kepentingan atau nilai-nilai mereka, mendorong mereka untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes.

3. Kurangnya Kepercayaan pada Kandidat: Penurunan kepercayaan publik terhadap kandidat dan parpol dapat menyebabkan meningkatnya kasus kotak kosong. Ketika pemilih menganggap kandidat tidak dapat dipercaya atau terputus dari kebutuhan masyarakat, mereka dapat memilih untuk tidak memilih mereka.
4. Gerakan Terorganisasi: Munculnya gerakan terorganisir yang menganjurkan kotak kosong dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa kampanye akar rumput dan upaya sukarela yang bertujuan mempromosikan opsi kotak kosong dapat memobilisasi sentimen publik dan mendorong pemilih untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui cara ini.
5. Struktur Kekuasaan Kaku: Keberadaan struktur kekuasaan yang kaku dalam lanskap politik juga dapat berkontribusi pada fenomena kotak kosong. Ketika pemilih merasa bahwa pilihan mereka dibatasi oleh kepentingan politik yang mengakar atau kurangnya kandidat yang layak, mereka mungkin memilih kotak kosong sebagai cara untuk menandakan ketidakpuasan mereka dengan status quo.

Tantangan Partisipasi Politik: Tantangan keseluruhan untuk partisipasi politik, seperti pencabutan hak atau sikap apatis, dapat menyebabkan peningkatan suara kotak kosong. Ketika pemilih merasa bahwa partisipasi mereka tidak mengarah pada perubahan yang berarti, mereka dapat memilih untuk mengekspresikan frustrasi mereka melalui opsi kotak kosong. Singkatnya,

terjadinya kotak kosong dalam pemilu merupakan isu multifaset yang berakar pada ketidakpuasan pemilih, gerakan terorganisir, dan dinamika politik yang lebih luas. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengatasi isu-isu mendasar yang mengarah pada fenomena ini dalam proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penyebab dan solusi potensial untuk isu-isu terkait “kotak kosong” dalam konteks pemilu.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas ditemukan berbagai persamaan didalam penelitian ini. Salah satu persamaannya menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan membahas tentang Analisis fenomena kotak kosong pada pilkada, fenomena yang menjadi focus penelitian ini adalah bagaimana bisa terjadinya fenomena calon tunggal dipilkada Batanghari yang merupakan salah satunya kadidat yang melawan kotak kosong pada pilkada yang diadakan diprovinsi Jambi tahun 2024. Permasalahan ini cukup menarik untuk dibahas karena menyangkut pemimpin yang akan memimpin suatu daerah dan sebagai negara demokrasi tentu harus mendapatkan hasil yang sedemokratis mungkin, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024”**.

¹⁷ Dedi Mulyadi and others, ‘Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024’, 2024, doi:10.55551/jip.v5i2.185.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 merupakan hal yang jarang terjadi, dimana hanya terdapat satu pasangan calon yang bersaing melawan kotak kosong. Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait dengan kondisi politik dan demokrasi di daerah tersebut. Adapun masalah yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimana problematika fenomena kotak kosong pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batanghari?

1.2.2 Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada latar belakang permasalahan dalam penelitian dan juga pada rumusan masalah yang telah di tetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis problematika fenomena kotak kosong pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batanghari.

1.3.2 Untuk mengetahui dan eksplorasi faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan relevan dan sebagainya, atau antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi kepada kajian politik lokal, khususnya dalam konteks Pilkada, mengenai fenomena calon tunggal dan dampaknya terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan (seperti KPU, partai politik, dan masyarakat) terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, serta memberikan wawasan mengenai dinamika politik lokal di Kabupaten Batanghari.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

Pada dasarnya demokrasi yang baik harus didasari oleh masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi (*high cognitive*), afektif, dan evaluasi dilakukan dalam sistem politik, merupakan objek politik, luaran politik, dan memahami betul perannya sebagai orang yang berpartisipasi aktif, bahkan terlibat dalam memberikan input kepada pemerintah, bahwa pada umumnya, budaya partisipasi politik ini merupakan bentuk partisipasi yang sangat tepat dalam struktur politik demokratis¹⁸

Dalam konteks pemilihan di Indonesia, tren meningkatnya calon tunggal dalam Pilkada menjadi anomali, mengingat Indonesia menganut system demokrasi multipartai dengan jumlah pemilih yang besar dan

¹⁸ Rahmawati Halim., S.Sos, M.Si., Muhlin Lalongan., S.Sos, M.Si. ,Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (Sah Media, 31 Okt 2016), hlm.6.

partisipasi banyak partai politik. Seharusnya, dinamika kontestasi kepemimpinan antar partai berlangsung secara kompetitif dan beragam praktik calon tunggal mencerminkan pragmatism partai dan melemahnya demokrasi, di mana calon dipilih lebih berdasarkan popularitas dan kemampuan logistik, bukan kapasitas dan integritas pola ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi dan kompetisi, sehingga meningkatkan jumlah calon tunggal dalam Pilkada berpotensi menyebabkan defisit demokrasi. Secara yuridis, pencalonan tunggal dapat dibenarkan, tetapi dalam konteks sosial, hal ini menimbulkan masalah serius, terutama terkait dengan melemahnya sistem demokrasi.¹⁹

Di sini masyarakat mengharapkan memiliki kemanfaatan sebagai subek mematuhi tata aturan pemilihan umum dan partai politik, loyal, namun mereka juga mengharapkan memiliki andil atau dilibatkan dalam bentuk pengambilan keputusan politik yang penting (hak inisiatif) dan tidak sekedar menjadi tenaga-tenaga dari proyek-proyek pemerintah.

a) Defenisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan, selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan

¹⁹ Roza Gustika and others, 'Journal of S Ocial and Economics Research', *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2).1 (2021), pp. 123–38.

hak-hak politik warga negara. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.²⁰

b) Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Gabriel Almond dalam Mas' oed dan MacAndrews partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Yang termasuk dalam bentuk konvensional adalah partisipasi politik seperti Pemberian suara(voting), ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.

Bahkan dari para kandidat selalu menyuarakan agar masyarakat tidak golput ataupun tidak berpartisipasi dalam pilkada dikarenakan Partisipasi politik sangat bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada

²⁰ Ni Ketut Arniti, 'Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020), p. 329, doi:10.38043/jids.v4i2.2496.

penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi.²¹

Partisipasi politik merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi. Tanpa partisipasi masyarakat, proses demokratis kehilangan legitimasi. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan partisipasi politik adalah Herbert McClosky. Menurut McClosky (1968), *partisipasi politik adalah aktivitas sukarela yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik*. Aktivitas ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional. Partisipasi politik mencerminkan

²¹ https://kumparan.com/anatasya-putri-vika-nabila_ilmu-adm-negara_h/partisipasi-anak-muda-dalam-pilkada-mengapa-golput-bukan-pilihan-23xpIT0xN8z

sejauh mana masyarakat merasa memiliki kekuasaan dalam proses politik dan merasa bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan²².

Untuk mengukur tingkat partisipasi politik, McClosky dan pengembang teorinya (Verba & Nie, 1972) mengidentifikasi beberapa dimensi penting, yaitu:

1. Kognitif (kesadaran politik)

Sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami isu serta proses politik. Dimensi kognitif merujuk pada sejauh mana individu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sistem politik, prosedur pemilu, aktor-aktor politik, serta isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Pengetahuan politik yang rendah dapat menjadikan masyarakat apatis, atau bahkan terjebak dalam sikap pasrah terhadap dominasi politik tertentu.

2. Afektif (kepedulian politik)

Sejauh mana masyarakat merasa peduli terhadap jalannya pemerintahan. Dimensi afektif menggambarkan tingkat kepedulian, minat, dan keterikatan emosional masyarakat terhadap proses politik. Masyarakat yang memiliki keterlibatan emosional tinggi terhadap politik biasanya lebih aktif dan antusias mengikuti perkembangan politik, termasuk dalam menentukan pilihan. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa tidak terhubung atau tidak memiliki ikatan emosional dengan calon yang tersedia, maka ketertarikan untuk berpartisipasi menurun.

²² McClosky, H. (1968). *Political Participation*. In International Encyclopedia of the Social Sciences.

3. Evaluatif (penilaian terhadap sistem politik)

Evaluatif berkaitan dengan sejauh mana masyarakat menilai sistem politik secara kritis, termasuk seberapa besar kepercayaan mereka terhadap integritas pemilu, keadilan prosedur, dan legitimasi kekuasaan yang terbentuk. Masyarakat yang memiliki penilaian negatif terhadap sistem politik biasanya akan menunjukkan partisipasi politik dalam bentuk protes, baik secara langsung maupun simbolik.

4. Perilaku (aksi politik)

Sejauh mana masyarakat benar-benar melakukan tindakan nyata dalam ranah politik. dimensi paling kasat mata dari partisipasi politik, yakni tindakan nyata yang dilakukan warga dalam merespons dinamika politik. Dalam konteks pemilu, perilaku ini mencakup hadir atau tidaknya warga di tempat pemungutan suara (TPS), pilihan mereka terhadap calon yang tersedia, serta penggunaan hak suara untuk memilih kotak kosong atau tidak memilih sama sekali (golput). Dimensi ini penting untuk mengukur sejauh mana preferensi politik diterjemahkan menjadi aksi nyata, yang bisa dipengaruhi oleh faktor kognitif, afektif, dan evaluatif yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat dimensi partisipasi politik yang dikembangkan oleh McClosky serta Verba & Nie sangat relevan digunakan untuk menganalisis problematika fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari karena mampu menjelaskan secara menyeluruh aspek-aspek partisipasi politik masyarakat dalam situasi calon tunggal. Dimensi kognitif menilai sejauh mana pemilih memahami hak pilih dan makna dari kotak

kosong sebagai bentuk pilihan sah, sementara dimensi afektif mengungkap tingkat kepedulian emosional masyarakat terhadap proses politik yang minim kompetisi. Selanjutnya, dimensi evaluatif membantu melihat apakah pemilih memandang proses Pilkada sebagai demokratis atau justru sarat kepentingan elite, sedangkan dimensi perilaku mencerminkan ekspresi nyata partisipasi melalui tindakan seperti memilih kotak kosong, mendukung calon tunggal, atau golput. Dengan demikian, keempat dimensi ini menjadi alat ukur yang komprehensif untuk mengurai motif, sikap, dan tindakan politik masyarakat dalam konteks minimnya pilihan politik yang tersedia.

c) Keterlibatan Partai Politik

Sifat masyarakat di Indonesia lebih cenderung mendorong partai sebagai dasar promodial (ikatan didalam sebuah kelompok masyarakat) dalam mengorganisir massa. Hal ini dipengaruhi pola hubungan di dalam masyarakat seperti pengaruh kepentingan ekonomi, agama dan suku. Untuk mengorganisir massa yang luas, maka setiap partai berusaha menarik dan membentuk berbagai organisasi massa yang didasarkan kepada fungsi kehidupan di dalam masyarakat.

Bagi kehidupan kepartaian di Indonesia, amat tebalnya ikatan kepada ideologi lebih kuat kerja sama di antara elit dari pada mendorong penciptaan suatu konsensus. Dengan memiliki ideologi yang mendasari kepada kepentingan masyarakat diharapkan sebagai alat menggerakkan masyarakat untuk mencapai suatu gambaran yang dicita-citakan, malah didalam penggunaannya membawa efek yang terbalik. Akan tetapi masyarakat jadi

sukar digerakan kepada suatu arah mungkin dikarenakan kepemimpinan partai politik itu sendiri.²³

d) Pendidikan Politik

Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda. Maka, pendidikan politik itu sangat penting dengan berlandaskan pada UU.No.22 tahun 2008 pasal 31 tentang fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik, di antaranya:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan Negara.

Juga peraturan pemerintah No.83 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 dan 2. Dan Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

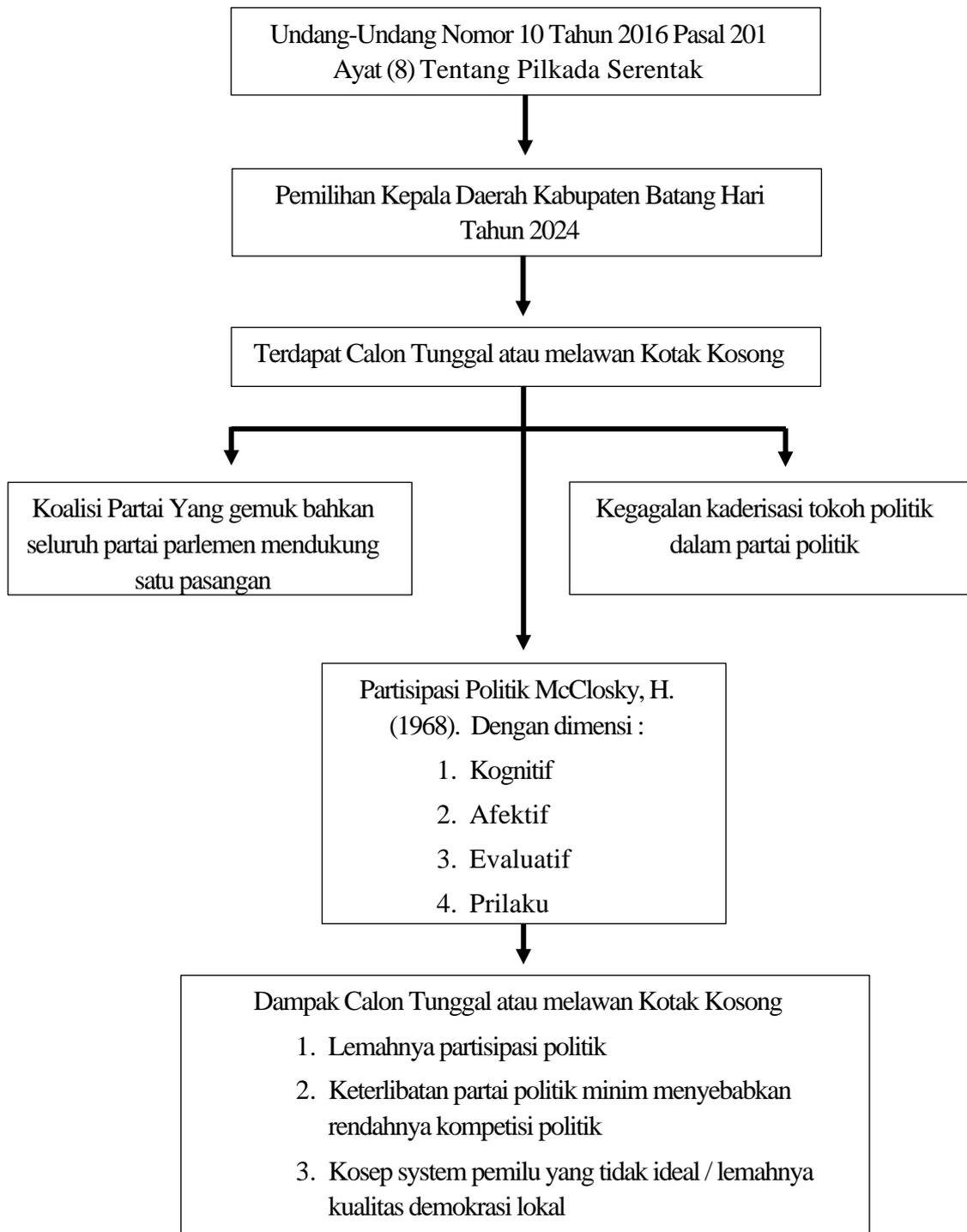
Oleh karena itu, dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta untuk menjaga agar pemilu dapat

²³ Drs. Arbi Sanit, "Buku Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan" Hal. 28-30 Arbi Sanit--Ed. 1-16.-Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

²⁴ Dhiwara Kharisma, 'Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda', *Ejournal Unsrat*, 1.7 (2014), p. 1144.

berjalan dengan baik, dan menghasilkan output pemilu-pemilu yang memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan, maka alasan serta motivasi keterlibatan pemilih muda yang terkait dengan pendidikan politik sangat penting untuk diidentifikasi, dengan hal tersebut diharapkan dapat dihasilkan formulasi yang tepat untuk memaksimalkan peran pemilih muda pada pemilu-pemilu selanjutnya.

1.6 Kerangka Pikir



Fenomena munculnya calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2024 yang mencerminkan rendahnya kompetisi politik dan potensi lemahnya kualitas demokrasi lokal. Untuk memahami problematika ini secara mendalam, digunakan teori partisipasi politik dari McClosky serta

pengembangannya oleh Verba & Nie yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi: kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Setiap dimensi ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat memahami proses politik (kognitif), merasa terlibat secara emosional (afektif), menilai kualitas Pilkada dan aktor politiknya (evaluatif), serta mewujudkan sikap politik mereka dalam tindakan nyata seperti memilih atau golput (perilaku). Melalui kerangka ini, penelitian dapat menggambarkan secara utuh alasan di balik pilihan masyarakat terhadap kotak kosong serta faktor-faktor yang memengaruhi rendah atau tingginya partisipasi politik dalam konteks minimnya alternatif kandidat.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab munculnya fenomena kotak kosong pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Batang Hari.

Penelitian ini menggunakan perspektif subjektif, yang dapat dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif subjektif yaitu peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal. Prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang/dinamis. Selain itu, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada

penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis adanya kotak kosong yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Batang Hari karena memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dari fenomena-fenomena yang terjadi secara holistic hal ini juga sejalan dengan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk meyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang telah diteliti.²⁵

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis problematika fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batanghari tahun 2024 yang diwarnai oleh keberadaan calon tunggal yang diusung mayoritas partai politik parlemen dan faktor apa saja yang menjadikan adanya satu calon tunggal, sehingga menimbulkan minimnya kompetisi politik dan memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam situasi tersebut, baik dari sisi kesadaran, sikap, penilaian, hingga tindakan politiknya, dengan menggunakan pendekatan teori partisipasi politik McClosky serta Verba & Nie. Melalui fokus ini, penelitian

²⁵ Rizal Safrudin and others, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1–15.

bertujuan mengungkap dinamika sosial-politik di balik pilihan masyarakat terhadap kotak kosong dan bagaimana kondisi tersebut merefleksikan hubungan antara elite politik, institusi pemilu, dan pemilih di daerah.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang menjadi wilayah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dengan fenomena unik berupa hadirnya hanya satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh mayoritas partai politik parlemen. Kabupaten Batanghari dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi contoh nyata dari situasi minim kompetisi politik yang memunculkan kotak kosong sebagai satu-satunya alternatif pilihan bagi pemilih yang tidak mendukung calon tunggal tersebut. Alasan memilih Kabupaten Batanghari dikarenakan belum ada yang meneliti mengenai permasalahan di daerah ini dan kabupaten ini masuk ke dalam 37 kota/kabupaten yang memiliki calon tunggal pada Pilkada 2024

1.7.4 Sumber data

Dalam penelitian ini memerlukan beberapa data sehingga menjadi penunjang pembahasan dalam penelitian, sehingga di perlukan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ini dapat diperoleh melalui secara langsung dengan menyebarkan kuisisioner di KPU Batanghari dan masyarakat umum di

kabupaten tersebut. Fokus penelitian merupakan penekanan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fenomena guna mengungkapkan dengan lebih mendalam suatu fenomena yang menjadi objek dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada penyebab munculnya kotak kosong dan bagaimana penyelenggara menyikapi Pilkada melawan kotak kosong serta bagaimana partisipasi pemilih masyarakat dalam Pilkada 2024, khususnya pada lokasi penelitian yaitu masyarakat pemilih di Kabupaten Batanghari dengan metode survey.

2. Data Skunder

Sumber data sekunder ini bisa diperoleh melalui laman situs resmi KPU Batanghari sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menggunakannya untuk melakukan pengumpulan data dan juga bisa memaparkan sumber data melalui dokumen yang sudah tersedia di KPU Batanghari terkait permasalahan pilkada yang menyangkut tentang kotak kosong.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau

situasi sosial yang diteliti dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yang memiliki pemahaman mendalam dan pengetahuan terkait fenomena kotak kosong pada pilkada kab.Batanghari tahun 2024 ini bisa terjadi, antara lain:

Tabel. 1.4
Daftar Informan

No	Informan	Alasan
1.	Ahmad Halim (Ketua KPU Kab.Batanghari)	Mengetahui proses pengambilan keputusan terkait prosedur yang akan dijalankan yakni pilkada di kab.Batanghari tahun 2024
2.	Sukran (Ketua DPC PPP Kabupaten Batang Hari) atau Darmawi (Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kec. Pelayung)	Memahami bagaimana mereka menghadapi kotak kosong, mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang terkait dengan kotak kosong.
3.	Muttaqin, M.Pd (Pemuda Peduli Demokrasi Batang Hari)	Mengetahui data-data partisipasi warga dalam pilkada yang terjadi menghadapi kotak kosong tahun 2024
4.	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si. (Akademisi Politik)	Memahami dan mengamati proses terjadinya pasangan calon tunggal pada pilkada kab.Batanghari tahun 2024
5.	Aman (Tokoh Masyarakat Kabupaten Batang Hari)	Dapat memberikan informasi tentang preferensi serta alasan mereka memilih kotak kosong atau calon tertentu.
6.	Darmawi (Masyarakat Umum yang memilih Kab.Batanghari)	Mengetahui masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada

Sumber: Data Olahan Penelitian

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebagai langkah penting untuk mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

1. Wawancara

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Dari tabel informan diatas maka diketahui bahwa informasi yang dikehendaki dari masing-masing informan adalah berbeda. Meskipun terdapat kesamaan topik, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang akan ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan akan eksplorasi tersebut, maka dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur (*semi-structur interview*).

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dengan wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban antara peneliti dan responden yang pada akhirnya memudahkan peneliti dalam menghimpun data.²⁶

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara

²⁶ Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, 2016 Hal 104-105 Prenamedia Grup 2016

langsung. Penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak langsung (over observation dan covert observation). Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam satu hal peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih rahasia. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan terhadap penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian memiliki teknik utama untuk menganalisis data, menurut Miles dan Huberman ada beberapa tahapan dalam menganalisis data dalam sebuah penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Setelah penelitian selesai, peneliti pasti akan membawa banyak data. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan untuk mengurangi data ini untuk menjadi alat perangkum dan memilih topik penting penelitian

untuk digunakan dan disajikan²⁷. Ini dilakukan agar peneliti tidak kebingungan saat menampilkan dan mensinkronkan fenomena yang mereka temukan di lapangan dengan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses pemilihan dan pengumpulan data yang diverifikasi atau direduksi, langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menyajikan data tersebut. Penyajian data dilakukan dengan singkat, baik melalui narasi deskriptif, tabel data, maupun diagram²⁸. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian tersebut

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih luas tentang hasil penyajian data atau hasil penelitian. Ini dilakukan agar penelitian lebih mudah dipahami oleh para pembaca karena penarikan kesimpulan tidak terpengaruh oleh data yang dikumpulkan selama penelitian.

1.7.8 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode yang menggunakan berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori untuk menyediakan bukti yang diperlukan untuk validasi.

²⁷ Pahrudin, dkk, "*Pedoman Penulisan Skripsi Fisipol Unja*". FISIPOL Universitas Jambi, 2017. Hlm. 16

²⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 2.

Proses ini biasanya membutuhkan bukti yang kuat dari berbagai sumber²⁹. Proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda diperlukan untuk mengidentifikasi sumber data yang relevan.³⁰

²⁹ *Log.Cit.* Jhon W. Creswell. Hlm. 419

³⁰ *Log.Cit.* Jhon W. Creswell. Hlm. 419

BAB II

KABUPATEN BATANG HARI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

2.1 Kabupaten Batang Hari

2.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jambi, dengan letak geografis di antara 1°15' - 2°2' Lintang Selatan dan 102°30' - 104°30' Bujur Timur. Secara regional, kabupaten ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dan memiliki ibu kota di Muara Bulian. Kabupaten ini dikenal dengan filosofi daerahnya yaitu "*Serentak Bak Regam*", yang mencerminkan semangat kebersamaan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakatnya. Batang Hari memiliki sejarah panjang yang bermula dari pembentukannya pada 1 Desember 1948, melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U tanggal 30 November 1948³¹.

Gambar. 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Batang Hari



Sumber : <https://batangharikab.go.id/bat/>, 2025.

³¹<https://batangharikab.go.id/bat/statis-7-sejarahberdirinyakabupatenbatanghari.html>
diakses Pada 06 Mei 2025.

Awalnya, pusat pemerintahannya berada di Jambi (sekarang menjadi Kota Jambi), sebelum akhirnya berdiri sendiri sebagai entitas administratif. Provinsi Jambi sendiri dibentuk kemudian melalui UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957, bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Luas wilayah Kabupaten Batang Hari mencapai 5.804,83 kilometer persegi, menjadikannya sebagai kabupaten terluas keempat di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Tebo. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo di sebelah utara, Kabupaten Musi Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan) di sebelah selatan, Kabupaten Sarolangun di sebelah barat, serta Kabupaten Muaro Jambi di sebelah timur.

Batas-batas geografis ini menjadikan Kabupaten Batang Hari sebagai wilayah yang strategis dalam peta wilayah tengah Sumatra bagian timur. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang Hari tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 313.209 jiwa, yang terdiri dari 160.228 jiwa penduduk laki-laki dan 149.680 jiwa penduduk perempuan³². Penduduk ini tersebar di 8 kecamatan, yang membawahi 124 desa dan kelurahan. Kepadatan penduduk yang relatif merata ini menjadi tantangan sekaligus potensi dalam pembangunan, khususnya dalam upaya pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Secara topografi, wilayah Kabupaten Batang Hari

³² <https://batangharikab.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-kabupaten-batang-hari.html> Diakses Pada 07 Mei 2025.

didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah, dengan ketinggian bervariasi antara 11 hingga 500 meter di atas permukaan laut.

Sekitar 92,28 persen wilayahnya merupakan daerah dengan tingkat kemiringan rendah (0–8 persen), sehingga secara geomorfologis, daerah ini tergolong landai. Wilayah ini juga didominasi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatra, dengan banyak area rawa yang tergenang air sepanjang tahun. Kondisi ini turut memengaruhi pola penggunaan lahan, aktivitas pertanian, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat Batang Hari, yang sebagian besar bergantung pada hasil bumi dan sumber daya alam yang melimpah.

2.1.2 Gambaran Pemerintahan dan Politik Kabupaten Batang Hari

Sejak berdiri hingga saat ini Kabupaten Batang Hari telah mengalami 18 kali pergantian kepala daerah baik secara defenitip, sementara, pelaksana tugas dan penjabat Bupati. Dari 19 pergantian kepala daerah tersebut 6 kalinya merupakan hasil dari Pilkada oleh rakyat. Berikut daftar Bupati dan Wakil Bupati yang pernah memimpin di Kabupaten Batang Hari.

Tabel. 2.1
Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari
dari Masa ke masa

No	Bupati Dan Wakil Bupati	Periode
1	Nurdin (Tidak Ada Wakil Bupati)	1950-1952
2	M. Djamin Datuk Bagindo (Tidak Ada Wakil Bupati)	1952-1953
3	Abdul Manap(Tidak Ada Wakil Bupati)	1953-1954
4	Mandolangen (Tidak Ada Wakil Bupati)	1954-1956
5	R. Sunarto (Tidak Ada Wakil Bupati)	1956-1957
6	Ali Soedin (Tidak Ada Wakil Bupati)	1957-1958
7	H.Bakri Sulaiman (Tidak Ada Wakil Bupati)	1958-1966

8	Drs. H Muchtar. DM (Tidak Ada Wakil Bupati)	1966-1968
9	R. Suhur (Tidak Ada Wakil Bupati)	1968-1979
10	Drs. Ec.M. Radjai (Tidak Ada Wakil Bupati) / Plh.	1980
11	Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam (Tidak Ada Wakil Bupati)	1980-1991
12	H.Muhammad Saman Chatib (Tidak Ada Wakil Bupati)	1991-2001
13	H.Abdul Fattah – Ir. Syahirsyah	2001-2006
14	Ir. Syahirsyah – H. Ardian Faisal	2006-2011
15	H.Abdul Fattah – Sinwan	2011-2013
16	Sinwan (Tidak Ada Wakil Bupati) Pj- Defenitif	2013-2016
17	Ir. Syahirsyah – Soefia Joesoef	2016-2020
18	Mhd. Fadhil Arief – H. Bakhtiar	2021-2024
19	Mhd. Fadhil Arief – H. Bakhtiar	2025-2030

Sumber : <https://batangharikab.go.id/bat/>, 2025.

Untuk saat ini Kabupaten Batang Hari dipimpin oleh Bupati Mohammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati Bakhtiar yang berhasil memenangkan Pilkada Batang Hari tahun 2020 lalu. Sejak dilantik tanggal 26 Februari 2021 lalu. Pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki visi dan misi serta program kerja hingga tahun 2026 sebagai berikut :

1. Visi Kabupaten Batang Hari

“Perubahan Menuju Arah Baru Batang Hari Tangguh (Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis)”

2. Misi Kabupaten Batang Hari

- Menjadi pelopor dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui daya saing sektor pertanian dan agrowisata, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- Penguatan nilai-nilai akhlaqul karimah, sinergi antara umaro dan ulama, semangat gotong royong, dan kemandirian masyarakat sebagai

agen perubahan dalam percepatan pembangunan dan pembentukan tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan agama.

- Menciptakan lingkungan kota yang nyaman dan aman, serta menjamin pertumbuhan ruang usaha dan iklim investasi yang sehat.
- Mencapai peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Menekankan pada pengembangan budaya birokrasi yang harmonis, serta sinergi dalam pembangunan antara daerah dan desa.

2.1.3 Lambang Daerah Kabupaten Batang Hari

Gambar. 2.2
Lambang Daerah Kabupaten Batang Hari



Sumber: <https://batangharikab.go.id/bat> , 2025

Lambang Kabupaten Batang Hari berwujud perisai segilima yang dikelilingi oleh garis putih sebagai simbol kesucian. Di dalamnya, terdapat warna hijau yang mencerminkan kesuburan, sementara pucak masjid melambangkan kepercayaan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Warna kuning yang terdapat di dalamnya melambangkan kekayaan, keagungan, serta kebesaran masyarakat Batang Hari³³. Warna biru

³³ <https://batangharikab.go.id/bat/statis-8-lambang.html> diakses Pada 07 Mei 2025.

menandakan Sungai Batanghari, dengan dua cabang yang mencerminkan geografi khususnya Sungai Batangtembesi di kiri dan Sungai Batanghari di kanan³⁴.

Simbol keris Siginjai mencerminkan sejarah kerajaan dan perjuangan masyarakat Jambi, termasuk warga Batang Hari, dalam melawan penjajah. Menara minyak melambangkan keberadaan tambang minyak, sementara pohon karet melambangkan kekayaan alam dan kesuburan³⁵. Lambang “Serentak Bak Regam” menggambarkan karakteristik watak dan adat yang sejalan, menunjukkan semangat musyawarah dan mufakat di Kabupaten Batang Hari³⁶.

2.2 Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan demokrasi elektoral nasional yang dirancang untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan konsolidasi sistem presidensial di Indonesia³⁷. Gagasan mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, MK membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan menekankan pentingnya penyelarasan waktu pelaksanaan pemilu sebagai upaya memperkuat sistem presidensial.

³⁴ *Ibid*, <https://batangharikab.go.id/bat/statis-8-lambang.html>

³⁵ *Ibid*, <https://batangharikab.go.id/bat/statis-8-lambang.html>

³⁶ *Ibid*, <https://batangharikab.go.id/bat/statis-8-lambang.html>

³⁷ <https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak> diakses Pada 05 Mei

Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan menyerentakkan pemilu legislatif dan eksekutif, serta pilkada dalam satu tahun yang sama, diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang lebih stabil karena siklus politik nasional dan daerah akan berjalan seiring³⁸.

Pemerintah yang terpilih dari hasil pemilu dan pilkada 2024 ini akan memiliki legitimasi yang kuat dan keselarasan visi-misi untuk lima tahun ke depan, sehingga dinamika politik yang muncul dapat lebih terarah dan tidak terpecah oleh siklus pemilu yang berbeda-beda. Pilkada Serentak 2024 sendiri mencakup dua jenis pemilihan kepala daerah secara bersamaan, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakilnya (Pilbup/Pilwakot). Pelaksanaan tahapan dan jadwalnya telah diatur secara resmi melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. PKPU ini mengatur secara teknis proses pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari tahap persiapan, pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Dengan adanya regulasi ini, KPU bertanggung jawab memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Secara keseluruhan, sebanyak 545 daerah di seluruh Indonesia akan turut serta dalam Pilkada Serentak 2024. Rincian wilayah yang akan menyelenggarakan

³⁸ *Ibid*, <https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak>

pilkada meliputi 37 provinsi untuk pemilihan gubernur, 415 kabupaten untuk pemilihan bupati, dan 93 kota untuk pemilihan wali kota. Jumlah ini menunjukkan cakupan yang sangat luas, yang mencerminkan besarnya tantangan logistik dan teknis dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Namun di sisi lain, hal ini juga mencerminkan komitmen negara dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan representatif³⁹.

2.2.1 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan pilkada serentak ini diharapkan mampu memperkuat integrasi nasional melalui keserentakan proses politik di seluruh wilayah Indonesia. Berikut tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Tabel. 2.2
Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

Jadwal	Agenda Tahapan
30 September – 01 Oktober 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
(Hingga) 18 November 2024	Penyusunan peraturan Penyelenggaraan pemilihan
(Hingga) 18 November 2024	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi penetapan tata cara Dan jadwal tahapan Pelaksanaan pemilihan
17 April 2024 – 05 November 2024	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
Sesuai Jadwal dari BAWASLU	Pembentukan panitia Pengawas kecamatan, panitia

³⁹[https://ppid.kuduskab.go.id/page/informasi_pilkada_tahun_2024#:~:text=Ini%20merupakan%20proses%20pemilihan%20kepala,PKPU\)%20Nomor%202%20Tahun%202024.](https://ppid.kuduskab.go.id/page/informasi_pilkada_tahun_2024#:~:text=Ini%20merupakan%20proses%20pemilihan%20kepala,PKPU)%20Nomor%202%20Tahun%202024.) Diakses Pada 04 Mei 2025.

	Pengawas lapangan, dan Pengawas tempat Pemungutan suara
27 Februari – 16 November 2024	Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau Pemilihan
24 April – 31 Mei 2024	Penyerahan daftar Penduduk potensial pemilih
31 Mei – 23 September 2024	Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih
05 Mei – 19 Agustus 2024	Pemenuhan persyaratan Dukungan pasangan calon Perseorangan
24 – 26 Agustus 2024	Pengumuman pendaftaran Pasangan calon
27 – 29 Agustus 2024	Pendaftaran pasangan calon
27 Agustus – 21 September 2024	Penelitian persyaratan Calon
22 September 2024	Penetapan pasangan calon
25 September – 23 November 2024	Pelaksanaan kampanye
27 November 2024	Pelaksanaan pemungutan Suara
27 November – 16 Desember 2024	Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

Sumber : PKPU Nomor 2 Tahun 2024, 2024.

2.2.2 Lambang Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024

Gambar. 2.3
Lambang Pilkada Serentak Tahun 2024



Sumber: KPU Republik Indonesia, 2024

Logo Pilkada Serentak yang ditampilkan merupakan simbol resmi dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU. Logo ini menggambarkan sebuah kotak suara berwarna abu-abu dengan bagian samping berhiaskan warna bendera merah putih,

melambangkan identitas nasional Republik Indonesia. Di salah satu sisi kotak suara terdapat lambang KPU lengkap dengan burung Garuda Pancasila yang menggambarkan bahwa pelaksanaan Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Kertas suara berwarna oranye yang dimasukkan ke dalam kotak melambangkan partisipasi aktif rakyat dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah. Warna-warna yang digunakan seperti merah, putih, dan oranye mencerminkan semangat nasionalisme, transparansi, dan dinamisme proses demokrasi. Logo ini juga menunjukkan bahwa Pilkada merupakan proses yang dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip pemilu demokratis. Tulisan “PILKADA SERENTAK” yang tertera di bawah logo menegaskan identitas dan momen penting dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serempak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024.

2.3 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batang Hari tahun 2024 merupakan bagian dari agenda nasional Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pilkada ini bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi yang akan menjabat pada periode 2025 hingga 2030. Momentum ini menjadi ajang penting bagi warga Batang Hari untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin daerah yang akan membawa arah pembangunan selama lima tahun ke depan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 218.007 pemilih, terdiri atas 110.821

pemilih laki-laki dan 107.186 pemilih perempuan, yang akan menggunakan hak suaranya di 540 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 110 desa dan 14 kelurahan. Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,9% atau 4.196 pemilih dibandingkan DPT pada Pemilu 2024 yang mencapai 222.203 pemilih. Namun jika dibandingkan dengan Pilkada Batang Hari tahun 2020, yang hanya mencatat 197.613 pemilih, maka DPT Pilkada 2024 justru mengalami peningkatan sebesar 9,4% atau 20.394 pemilih, menandakan dinamika kependudukan dan potensi partisipasi yang semakin besar⁴⁰.

Awalnya, ketentuan pencalonan kepala daerah mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusung pasangan calon apabila memenuhi ambang batas minimal 25% dari total suara sah atau 20% kursi DPRD, yakni minimal 7 dari 35 kursi DPRD Kabupaten Batang Hari. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024, mengubah aturan tersebut dengan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada⁴¹.

Putusan ini, yang kemudian dituangkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, memberikan ruang bagi partai politik peserta Pemilu untuk mengusung pasangan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, asalkan memenuhi ambang batas persentase suara sah minimal sesuai jumlah penduduk di DPT daerah masing-masing. Untuk wilayah seperti Kabupaten Batang Hari yang memiliki

⁴⁰<https://www.kompasiana.com/shakilla/66ec490ded6415467c556b52/dpt-pilkada-batang-hari-2024-ditetapkan-218-007-pemilu> Diases Pada 05 Mei 2025.

⁴¹<https://kab-batanghari.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-tentang-syarat-minimal-dan-persebaran-dukungan-bakal-pasangan-calon-perseorangan-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-batang-hari-tahun-2024> Diakses Pada 05 Mei 2025.

jumlah pemilih tetap di bawah 250.000 jiwa, ambang batas pengusungan pasangan calon ditetapkan sebesar 10% dari total suara sah⁴².

Berdasarkan hasil Pemilu 2024 dan aturan terbaru tersebut, terdapat tiga partai politik yang memiliki kekuatan elektoral cukup untuk mengusung calon kepala daerah secara mandiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 23,80% suara sah, Partai NasDem dengan 14,38%, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 11,77%. Hal ini membuka peluang munculnya kontestasi yang lebih dinamis dan kompetitif di Pilkada Batang Hari 2024, serta mencerminkan semakin kompleksnya peta politik lokal yang akan mewarnai proses demokrasi di daerah tersebut.

2.3.1 Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari

Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 menjadi sorotan karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu M. Fadhil Arief dan Bakhtiar. Pasangan ini merupakan petahana yang kembali maju bersama untuk periode kedua mereka, melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dengan tetap menjaga kekompakan dalam satu kongsi politik. Keikutsertaan kembali pasangan ini menandakan adanya kesinambungan dalam program pembangunan daerah yang telah mereka jalankan, serta kepercayaan politik yang kuat dari partai-partai pendukung maupun masyarakat.

Dalam proses pencalonannya, Fadhil Arief dan Bakhtiar mendapatkan dukungan sangat besar dari hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari, yang mencerminkan dominasi dan

⁴² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21278> Diakses Pada 06 Mei 2025.

konsolidasi kekuatan politik yang luas. Pasangan calon ini diusung oleh sembilan partai politik parlemen, yakni PPP, Partai NasDem, PKB, Gerindra, PAN, Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Partai Demokrat, serta didukung pula oleh satu partai non-parlemen, yakni Partai Gelora. Total akumulasi dukungan suara sah dari partai-partai tersebut mencapai 167.161 suara dari total 175.093 suara sah, atau setara dengan 95%, menandakan dominasi elektoral yang nyaris mutlak.

Gambar. 2.4

Pasangan M. Fadhil Arief dan Bakhtiar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Pada Pilkada Serentak Tahun 2024



Sumber: Dokumentasi Tim Pemenangan Fadhil-Bakhtiar, 2025

Dukungan luas ini menunjukkan bahwa pasangan Fadhil-Bakhtiar bukan hanya menjadi pilihan partai, tetapi juga telah menjelma sebagai representasi dari kekuatan politik mayoritas di Kabupaten Batang Hari. Akibat tidak adanya calon lain yang mendaftarkan diri hingga hari penutupan pendaftaran, KPU Kabupaten Batang Hari secara resmi menetapkan pasangan Fadhil Arief dan Bakhtiar sebagai pasangan calon tunggal melalui Keputusan

KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Kondisi ini menciptakan dinamika politik yang unik dalam proses Pilkada Batang Hari 2024⁴³.

Dengan hanya satu pasangan calon, maka fenomena ini menandakan kuatnya pengaruh politik Fadhil Arief dan Bakhtiar di kancah lokal serta minimnya resistensi dari kekuatan politik lain untuk mengajukan alternatif kepemimpinan. Pilkada kali ini tidak hanya menjadi kontestasi elektoral, tetapi juga menjadi barometer penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan petahana yang kembali meminta mandat rakyat untuk melanjutkan program dan arah pembangunan Kabupaten Batang Hari lima tahun ke depan.

2.3.2 Pasangan Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar

Pasangan Fadhil Arief dan Bakhtiar mulai masuk dalam kontestasi sebagai penantang baru berasal dari kalangan birokrat aktif dan dianggap tidak memiliki representasi dinasti politik. Keempat, perilaku pemilih di Kabupaten Batanghari dalam menanggapi dinasti politik tersebut⁴⁴. Fadhil Arief, yang bukan berasal dari elit politik atau dinasti di sana. Hanyalah seorang birokrat, aktivis, yang lahir dari rahim seorang ulama termashur di Batanghari. Juga *notabene* bukan bagian dari oligarki selama ini hadir di perpolitikan Batang Hari.

⁴³<https://www.batangharinews.com/read/2025/01/09/7460/-kpu-tetapkan-fadhil--bakhtiar-pemenang-pilkada-batanghari-tahun-2024> Diakses Pada 06 Mei 2025.

⁴⁴ *Log, Cit*, Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara,

Begitupun wakilnya Bahktiar sama seperti Fadil juga sama merupakan birokrat. Kehadiran pasangan duo sekda ini sempat menarik perhatian masyarakat Batang Hari hingga pengamat politik di Jambi, pasalnya langkah dari Fadhil-Bahktiar di nilai tak akan mudah karena dihadang oleh dua pasangan dengan kekuatan politik yang kuat atau dari dua dinasti politik yang sudah lama terbangun di tanah bumi serentak bak ragam.

Pada 2 kali pemilihan tersebut pasangan Fadhil-Bakhtiar maju dari gabungan partai atau koalisi TANGGUH, dan dengan tagline “*Arah Baru Batang Hari*”. Tagline ini digunakan bukan tanpa alasan mengingat fenomena Politik di Batang Hari telah jelas di sebutkan diatas. Pasangan Fadhil Arief dan Bakhtiar mengusung arah baru Batang Hari yang lebih “TANGGUH”, dimana gagasan tersebut tertuang dan menjadi visi serta misi Batang Hari saat ini sebagai berikut ⁴⁵:

➤ **Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari :**

1. Menjadi Basis Pengembangan Ekonomi Pertanian dan Agrowisata dikawasan Provinsi Jambi.
2. Mewujudkan Ketaatan dan Implementasi Nilai-Nilai Keagamaan ditengah Masyarakat.
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Agen Percepatan Pembangunan.
4. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang untuk Kenyamanan, Keamanan dalam mendukung kelestarian Lingkungan.

⁴⁵ Situs Resmi Kabupaten Batang Hari. “*Visi dan Misi Batang Hari “TANGGUH”*”, yang diakses dari <https://batangharikab.go.id/bat/statis-2-visi-dan-misi.html> Pada 29 Mai 2023, Pukul 23.15 WIB

5. Mewujudkan Batang Hari sebagai tempat Investasi yang menguntungkan investor dan mensejahterakan Masyarakat.
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Bermutu dan Kompetitif.
7. Mewujudkan Birokrasi yang Harmonis serta Sinergitas Pembangunan Daerah dan Desa.

➤ **Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari :**

1. Terwujudnya Penguatan Ekonomi berbasis Pertanian dengan menjamin terciptanya Skala Ekonomi dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2. Wirausaha Milenial dan Mewujudkan Industri Kreatif berbasis Agricultural-Ekowisata.
3. Kehidupan Masyarakat yang bertumpu pada Budi Pekerti yang Luhur, Toleransi Antar Umat beragama yang mengedepankan Etika dan Moral dalam tatanan Kehidupan Masyarakat.
4. Menghidupkan Kembali Semangat Gotong Royong dan Kemandirian Masyarakat menuju Ketahanan Keluarga.
5. Meningkatkan Ruang Kota dan Ruang Terbuka yang Aman dan Nyaman.
6. Mewujudkan Lingkungan dan Kawasan Permukiman yang sehat.
7. Peningkatan dan Ketertiban Masyarakat.
8. Meningkatnya Nilai Investasi sebagai modal Pembangunan dan Mendorong Optimalisasi Pemanfaatan potensi sumber daya daerah.
9. Meningkatkan Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat serta Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.

10. Mewujudkan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Bermutu melalui Standarisasi Mutu Lulusan yang Merata dan Berdaya Saing.
11. Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah.
12. Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum.
13. Pembangunan Daerah dan Desa yang Berorientasi Hasil.

➤ **Priotitas Pembangunan Kabupaten Batang Hari Yaitu :**

1. Pembangunan ekonomi berbasis pertanian.
2. Pembangunan etika dan moral, toleransi antar umat beragama dan nasionalisme Serta Menjadikan Masyarakat sebagai agent perubahan.
3. Pembangunan ruang kota yang nyaman, sehat dan investasi yang saling menguntungkan.
4. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan kompetitif.
5. Pembangunan birokrasi yang handal dan sinergisitas pembangunan kabupaten dan desa.

2.3.3 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kabupaten Batang Hari tahun 2024 menghasilkan kemenangan mutlak bagi pasangan calon tunggal M. Fadhil Arief dan Bakhtiar. Dalam kontestasi yang berlangsung pada 27 November 2024, pasangan petahana ini berhasil meraih 114.674 suara atau setara dengan 77,83% dari total suara sah yang masuk. Meskipun hanya melawan “kotak kosong” sebagai bentuk pilihan competitor⁵¹ dari pemilih

yang tidak setuju, perolehan suara Fadhil-Bakhtiar menunjukkan tingkat kepercayaan kompet yang tinggi terhadap kepemimpinan mereka.

Sementara itu, kotak kosong memperoleh 32.667 suara atau 22,17%, yang menandakan masih adanya sebagian pemilih yang menghendaki opsi lain di luar petahana. Menariknya, pasangan Fadhil-Bakhtiar berhasil menguasai seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Batang Hari, yang terdiri dari delapan kecamatan, menunjukkan sebaran dukungan yang merata di seluruh penjuru daerah. Dominasi suara ini memperlihatkan bahwa pasangan tersebut tidak hanya kuat di satu basis wilayah tertentu, tetapi juga memiliki daya tarik kompetito yang menyeluruh.

Tabel. 2.3
Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten
Batang Hari Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Kotak Kosong	32.667	22.17%
2	M. Fadhil Arief – Bakhtiar	114.674	77.83%
Total		147.341	100.00%

Sumber: KPU Kabupaten Batang Hari, 2025.

Hasil ini sekaligus memperkuat legitimasi mereka untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua, dengan competi kuat dari masyarakat. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa keberlanjutan program, kerja nyata, serta konsolidasi politik yang solid mampu mengantarkan pasangan calon tunggal meraih dukungan mayoritas rakyat secara demokratis, meski berada dalam kontestasi yang minim competitor.

BAB III
FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti penyelenggara pemilu, pengurus partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga Kabupaten Batang Hari. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi politik menurut Herbert McClosky dan pengembangnya Verba & Nie (1972), yang mencakup empat dimensi utama: kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Pembahasan dalam bab ini berfokus pada pengungkapan dan analisis fenomena calon tunggal serta keberadaan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024. Hasil analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika partisipasi politik masyarakat dalam konteks pemilihan kepala daerah yang minim kompetisi.

3.1 Problematika Fenomena Kotak Kosong Pada Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Batang Hari

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan dinamika demokrasi yang tidak lazim dalam konteks politik elektoral yang sehat. Hal ini terjadi pada Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024, di mana hanya satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju dalam kontestasi, sedangkan pilihan alternatif yang tersedia bagi pemilih hanyalah “kotak kosong”. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas demokrasi lokal serta kondisi

partisipasi politik masyarakat dalam konteks pilihan politik yang terbatas. Keberadaan kotak kosong dalam Pilkada menjadi bukan sekadar simbol, melainkan wujud perlawanan diam (*silent protest*) masyarakat terhadap dominasi kekuatan politik tertentu atau keterpaksaan pilihan yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat secara utuh.

Untuk melihat dan memahami problematika dalam fenomena ini, penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari Herbert McClosky yang kemudian dikembangkan lebih dalam oleh Verba dan Nie (1972). Teori ini memandang bahwa partisipasi politik tidak hanya diukur dari aspek keikutsertaan dalam pemilu semata, tetapi juga mencakup dimensi pemahaman politik (kognitif), perasaan dan keterikatan terhadap isu politik (afektif), penilaian terhadap proses dan aktor politik (evaluatif), serta tindakan nyata dalam bentuk perilaku politik (behavioral)⁴⁶. Keempat dimensi ini menjadi alat analisis untuk menelaah bagaimana masyarakat Batang Hari merespons kondisi minimnya pilihan politik dan sejauh mana mereka tetap terlibat atau bahkan menjauh dari proses politik dalam Pilkada yang bersifat satu arah tersebut.

Dengan menggunakan keempat dimensi ini, subbab ini akan memaparkan temuan lapangan yang memperlihatkan bagaimana masyarakat memahami fenomena calon tunggal dan kotak kosong, bagaimana sikap emosional dan afektif mereka terhadap situasi tersebut, bagaimana penilaian kritis masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pilihan politik yang tersedia, serta bagaimana bentuk partisipasi nyata yang muncul dalam konteks keterbatasan pilihan. Analisis ini

⁴⁶ Putro, M. R. F. (2018). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017 (Studi terhadap Pelaksanaan dan Tingkat Partisipasi Pemilih di daerah Jayapura dan Tebing Tinggi).

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang problematika yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Batang Hari, sekaligus menjadi dasar refleksi terhadap kualitas demokrasi lokal dan penguatan partisipasi politik ke depan.

3.1.1 Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Politik Masyarakat terhadap Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong (Kognitif)

Fenomena calon tunggal yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 mencerminkan kondisi demokrasi lokal yang sedang mengalami tantangan serius, khususnya dalam hal keberagaman pilihan politik. Dalam situasi ini, tingkat pemahaman dan kesadaran politik masyarakat menjadi aspek penting yang menentukan bagaimana mereka merespons dan memaknai keberadaan “kotak kosong” sebagai satu-satunya alternatif selain memilih calon tunggal. Dalam kerangka teori partisipasi politik, dimensi kognitif merujuk pada seberapa jauh individu memahami struktur, proses, dan makna dari partisipasi dalam sistem politik, termasuk hak memilih dan arti dari setiap pilihan yang tersedia dalam kontestasi elektoral.

“Pertama memang terkait dengan pemilihan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari memang satu pasangan calon, jadi bukan kotak kosong melainkan kolom kosong namun familiar dimasyarakat yakni kotak kosong terkait dengan pemahaman masyarakat memang ini menjadi hal baru di Provinsi Jambi karena Pilkada sebelumnya belum pernah terjadi hanya terjadi dipilkada tahun 2024.”⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Halim, Ketua KPU Kabupaten Batang Hari. Pada 22 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan pihak penyelenggara atau KPU di atas menjelaskan memang pilihan atau fenomena kotak kosong di Provinsi Jambi ini adalah hal yang baru terlebih lagi di Kabupaten Batang Hari. KPU juga menjelaskan jika mereka memang memerlukan fokus penting dalam penyampaian jika kepada masyarakat tentang pemilihan ini. Berdasarkan pengakuan pihak KPU yang telah mensosialisasikan mengenai adanya pilihan kotak kosong memang benar, namun dalam temuan lapangan berbeda.

Pada pengumpulan data menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai makna keberadaan kotak kosong. Sebagian masyarakat memahami bahwa kotak kosong merupakan bentuk penolakan terhadap calon tunggal, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak memiliki pengaruh atau bahkan tidak mengetahui bahwa pilihan tersebut sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Minimnya sosialisasi mengenai prosedur dan arti dari kotak kosong turut memperparah situasi ini, sehingga sebagian warga datang ke tempat pemungutan suara tanpa pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi pilihan mereka. Sebagai mana hasil wawancara berikut:

“Sebagian besar pemilih kito masih pemilih yang tuo yang buto politik itu. Sebagian besar bingung mano kotak kosong, pokokny masyarakat itu belum pernah menghadapi dan mengalami calon tunggal rato-rato masih bingung, oleh sebab itu seharusnya KPU Batang Hari memberikan sosialisasi yang penuh kepada masyarakat, soalnya jika tidak dipilih maka suara mereka terbuang sia-sia. Masyarakat tidak tau akan memilih yang mana dan apakah kotak kosong boleh di ciblos kan ini masyarakat tidak tau, seharusnya di berikan sosialisasi.”⁴⁸

⁴⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Aman, Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Batang Hari (Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Batang Hari. Pada 24 Mei 2025.

Berdasarkan informasi wawancara di atas menjelaskan bahwa pada pemilih kelompok umur di atas 60 tahun pasti akan menghadapi permasalahan dalam memilih ketika pilihan tinggal kotak kosong. Sebagaimana dalam penelitian yang ditulis Mulyadi dkk berikut menjelaskan jika sangat diperlukan sebuah sosialisasi yang baik dari pihak penyelenggara agar pemahaman mengenai kotak kosong dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai pemilih⁴⁹. Di sisi lain, ada sebagian kalangan masyarakat, khususnya kelompok pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam komunitas peduli demokrasi, menunjukkan tingkat literasi politik yang lebih tinggi.

“Kotak kosong dalam surat suara itu bentuk demokrasi dalam pemilihan umum. Ketika kita ada surat suara yang kosong no 1 dan no 2 nomor satu bentuk calon dan no 2 kosong itu sudah dipilih oleh KPU jadi untuk surat suara yang kosong itu terletak kalo di bagian padil no 2 dan no 1 kosong karena sudah aturan KPU cabut nomor kebetulan bagian padil no 2 jadi no satu kosong kenapa itu disediakan oleh KPU karena menurut saya itu mengajarkan demokrasi tidak dipilih dari satu orang saja tapi kita berhak untuk memilih atau kita tidak memilih calon tersebut maka kita punya pilihan jadi setiap warga Batang Hari itu disampaikan kita harus wajib untuk memilih tapi kalo milih calon itu hak masing-masing maka disediakan adalah surat suara kosong”⁵⁰

Wawancara dengan pemuda peduli demokrasi di atas. Mereka melihat kotak kosong sebagai ruang perlawanan simbolik terhadap hegemoni politik lokal yang dinilai tidak memberikan ruang kompetisi yang sehat. Kesadaran ini muncul dari pemahaman bahwa demokrasi seharusnya memberikan pilihan alternatif dan bukan sekadar formalitas elektoral. Namun, kelompok

⁴⁹ Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A. (2024). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 233-263.

⁵⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muttaqin, Selaku Tokoh Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Batang Hari. Pada 21 Mei 2025.

ini jumlahnya terbatas dan masih kalah dominan dibandingkan masyarakat yang apatis atau pasif secara kognitif terhadap situasi politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu masyarakat secara umum akan menerima, karena tidak ada pilihan dan sosialisasi yang jelas dari pihak KPU mengenai pilihan kota kosong sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Pengaruhnya kepada masyarakat, ya masyarakat tidak ada pilihan lain. Kalupun pilihan lain itu pun kotak kosong, kotak kosong berarti kan nanti proses demokrasi kita lebih Panjang lagi jadi masyarakat tu sebetulnya dengan melihat mengerucut dengan satu pasangan calon itu dianggap mungkin dalam pandangan mereka yaitu pak padil layak dilanjutkan misalnya gitu bisa saja mereka dari pada kotak kosong ya dilanjutkan saja kepemimpinan beliau misalnya.”⁵¹

Dengan demikian, tingkat kesadaran politik masyarakat Batang Hari dalam Pilkada 2024 memperlihatkan adanya ketimpangan dalam hal kognisi politik. Ketimpangan ini berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik secara keseluruhan. Rendahnya pemahaman mengenai sistem dan pilihan politik menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya mampu menggunakan hak pilih secara kritis dan strategis. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendidikan politik dan sosialisasi menyeluruh sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi kondisi demokrasi yang menghadirkan pilihan terbatas seperti fenomena calon tunggal. Yang juga sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara bersama pengamat politik berikut:

“Ya, artinya Pendidikan politik itu suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh semua komponen bukan hanya partai politik saja sebagai salah satu pilar demokrasi tapi semua komponen masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah penyelenggara pemilu, akademisi juga harus melakukan Pendidikan politik supaya hak-hak politik itu bisa digunakan dengan baik pelaksanaan dari pemilu pemilihan itu bisa berlangsung dengan good and veer pemilihan yang demokratis itu *good*

⁵¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nasuhaidi, Selaku Akademisi dan Pengamat Politik Lokal Jambi. Pada 26 Mei 2025.

and veer sehingga demokrasi kita nanti outputnya jadi berkualitas artinya masyarakat dihadapkan dengan pilihan-pilihan demokrasi dengan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan bisa memilih, mungkin kalo masyarakat ikut saja kemudian orang yang menggunakan hak pilih juga mungkin ya udah tidak ada saingan ya pilih aja calon yang ada orangnya bisa saja karena masyarakat tu mudah bersepsi bahwa tidak ada saingan berarti ini yang terkuat dan terbaik padahal itu hanya proses politik saja”.⁵²

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa secara kognitif, pemahaman masyarakat Kabupaten Batang Hari terhadap mekanisme pemilihan dalam kondisi calon tunggal masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari ketidaktahuan sebagian besar pemilih khususnya pemilih lanjut usia terhadap keberadaan dan makna kolom kosong dalam surat suara. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU memang telah berjalan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, terutama kelompok usia tua yang cenderung memiliki akses terbatas terhadap informasi digital atau publikasi resmi lainnya.

Gambar. 3.1 Bentuk Postingan Sosialisasi Pengenalan Calon Oleh KPU Kabupaten Batang Hari



Sumber: Akun Instagram Resmi KPU Batang Hari, 2025

⁵² *Ibid*, Hasil Wawancara Akademi/Pengamat Politik.

Penyampaian informasi grafis berdasarkan gambar di atas tidak diikuti oleh adanya sosialisasi jika memilih kotak kosong adalah bagian dari demokrasi, serta gambar diatas hanya dapat di akses bagi para pemilih yang memiliki media sosial, sedangkan sebagian besar pemilih di kalangan usia lanjut ataupun di bawahnya tidak dapat memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itulah pemahaman masyarakat terhadap kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya menginformasikan kepada masyarakat.

Minimnya pemahaman terhadap keberadaan kolom kosong ini berimplikasi serius pada keputusan politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa kolom kosong dapat dicoblos sebagai bentuk penolakan terhadap calon tunggal, sehingga pada akhirnya mereka lebih memilih mencoblos pasangan bergambar hanya karena ketidaktahuan atau keraguan. Ketidaktahuan ini bukan semata akibat apatisme politik, namun lebih pada lemahnya penyampaian informasi secara komprehensif kepada masyarakat, terutama mengenai bagaimana sistem demokrasi bekerja dalam kondisi calon tunggal.

Akibat dari rendahnya pemahaman politik ini, kualitas demokrasi secara substansial ikut mengalami degradasi. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang hak pilih dalam konteks kotak kosong, maka proses demokrasi menjadi timpang karena tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat. Keunggulan suara pasangan calon tunggal pun bukan semata cerminan legitimasi elektoral, melainkan lebih pada keterbatasan informasi publik. Oleh karena itu, perlu evaluasi serius

terhadap strategi edukasi pemilih oleh penyelenggara pemilu dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi secara sadar, rasional, dan informasional dalam setiap tahapan demokrasi.

3.1.2 Persepsi Emosional dan Keterikatan Masyarakat terhadap Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Batang Hari (Afektif)

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 tidak hanya berdampak pada struktur pilihan politik masyarakat, tetapi juga membentuk reaksi emosional tertentu dari pemilih. Dalam konteks partisipasi politik, keterlibatan warga negara tidak hanya dapat dilihat dari sisi formalitas seperti kehadiran di TPS, tetapi juga dari dimensi afektif yaitu sikap emosional dan psikologis terhadap proses politik itu sendiri⁵³. Dimensi ini mencakup perasaan keterikatan, kepercayaan, harapan, bahkan kekecewaan yang muncul sebagai respons terhadap sistem demokrasi lokal. Oleh karena itu, mempelajari respons emosional masyarakat menjadi penting untuk memahami bagaimana mereka memaknai keterlibatan dalam pilkada dengan satu pasangan calon⁵⁴.

Kehadiran calon tunggal dalam kontestasi politik daerah kerap kali menimbulkan dilema bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa kehilangan ruang alternatif untuk menyuarakan kehendak politiknya. Dalam situasi seperti ini, perasaan jenuh, tidak percaya, atau bahkan ketidakpedulian terhadap proses pemilu dapat berkembang. Namun, di sisi lain, keberadaan

⁵³ Khair, M., Suud, S., & Rispawati, R. (2018). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(2).

⁵⁴ Intyaswati, D. (2022). *Pengaruh Penggunaan Media Terkait Partisipasi Politik*. Purwokerto: CV Pena Persada. Hlm. 13.

“kotak kosong” juga dapat menjadi kanal ekspresi emosional, sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi elite politik. Respon semacam ini menunjukkan bahwa emosi politik tidak dapat dipisahkan dari proses partisipasi warga, dan justru menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana demokrasi di daerah dapat diterima secara emosional oleh masyarakatnya.

Dengan demikian, melalui subbab ini, peneliti akan mendalami bagaimana masyarakat Batang Hari secara emosional merespons keberadaan calon tunggal dan pilihan terhadap kotak kosong. Fokus akan diarahkan pada persepsi, sikap batin, dan ekspresi emosional masyarakat terhadap proses politik yang dianggap tidak memberikan pilihan riil. Kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa partisipasi politik bukan hanya soal kuantitas suara yang masuk, tetapi juga kualitas emosi dan keterikatan warga terhadap sistem demokrasi yang dijalankan.

“Ya, pasti pengaruh karena tidak ada pilihan bagi mereka kan tidak semua orang, mungkin semua senang dengan padil pasti ada orang yang tidak senang jadi ya yang tidak senang dengan mereka maka berimplikasi terhadap aktivitas mereka dalam penggunaan hak pilih begitu”⁵⁵

Hasil wawancara bersama pengamat tersebut menjelaskan jika fenomena calon tunggal ini sangat mempengaruhi semangat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam system demokrasi ada pilihan dalam kompetisi itu sangat ideal, mengungat demokrasi merupakan konsep siapa saja memiliki hak yang sama dalam politik dan dalam dipilih dan

⁵⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nasuhaidi, *Log.Cit...*

memilih⁵⁶. Oleh sebab itu kualitas demokrasi akan tercederai dengan hanya ada calon tunggal dalam pemilihan umum. Kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Batang Hari mengenai fenomena ini juga tergambarkan dari hasil wawancara berikut:

“Tidak adil dan kurang menarik bagi saya, saya merasa seperti itu karno masyarakat tidak dapat memilih dan membandingkan. Tidak biso ngomong lagi kalo perasaan hanya tuhan saja yang tau tapi sebagai masyarakat kito ikuti be proses pemilihan tersebut”.⁵⁷

Kekecewaan dari masyarakat tentu karena masyarakat tidak ada pilihan dalam menentukan pemimpin mereka selama 1 periode berikutnya maka krisis demokrasi pada saat Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 terjadi. Berdasarkan data jumlah DPT (Daftar Pemilih Tepat) Kabupaten Batang Hari yang paparkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari berjumlah 218.007 Pemilih sedangkan yang hadir dalam pemilihan pada saat hari pencoblosan sebanyak 153.211, dengan persentase partisipasi masyarakat sebanyak 70,28%⁵⁸. Angka ini dapat dikatakan baik karena diatas 60% minimal partisipasi masyarakat yang ideal dalam pemilu di Indonesia. Namun ada sekitar 64.796 pemilih yang tidak hadir.

Tabel. 3.1
Angka Partisipasi Pemilih Pilkada Batang Hari Tahun 2024

Jumlah DPT	218.007
Yang Memilih	153.211
Yang Tidak Memilih	64.796
Suara Kotak Kosong	32.667
Suara Paslon 2	114.674

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

⁵⁶ Dhesinta, W. S. (2016). Calon tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan konsep demokrasi. *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, 4, 87-104.

⁵⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Aman, *Log.Cit...*

⁵⁸ <https://www.kompasiana.com/shakilla/66ec490ded6415467c556b52/dpt-pilkada-batang-hari-2024-ditetapkan-218-007-pemilu> Diakses Pada 31 Mei 2025

Berdasarkan Tabel di atas dari jumlah DPT Kabupaten Batang Hari yang berjumlah 218.007 yang datang ke TPS untuk memilih hanya sebesar 153.211 pemilih dengan angka pemilih yang tidak memilih sebanyak 64.796 pemilih. Para pemilih ini sebanyak 32.667 memilih kotak kosong dan sebanyak 114.674 memilih pasangan calon Fadhil-Bakhtiar. Sedangkan untuk suara tidak sah sebanyak 5.870. artinya ada sebanyak 38.537 masyarakat Kabupaten Batang Hari yang merasakan kekecewaan dan tidak memilih untuk memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon tunggal ini.

Berbeda dari tanggapan masyarakat dan pengamat politik di atas mengenai tidak terlihatnya animo masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 lalu, pihak partai politik pengusung dan asal dari sosok pasangan Fadhil – Bahktiar maju yakni PPP menjelaskan jika hal ini wajar karena selama ini masyarakat menilai dan melihat bagaimana kinerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari saat itu sehingga para partai bergabung dengan melihat hasil survey, sebagaimana yang di sampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Masyarakat ada yang mengkritik dan tidak banyak juga yang kritik akan adanya kotak kosong ini, karena mereka juga bisa menilai bagaimana kepemimpinan beliau di Batang Hari menjadi ikonik yang indah sehingga sering mendapatkan penghargaan dari berbagai Lembaga, dan juga koalisi besar ini bukan paksaan dari kami para partai PPP melainkan mereka yang ingin bergabung mendukung beliau dan mungkin jika ada kritik dari masyarakat tidak secara besar akan tetapi mereka menjadi pemilih kotak kosong itu kan hal yang wajar didalam berdemokrasi mungkin ada pihak-pihak kotak kosong yang berkampanye tapi buktinya masyarakat insyallah tetap percaya kepada bapak padil sebagai bupati kabupaten batang hari”⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sukran, Selaku Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Batang Hari, Pada 19 Mei 2025.

Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan jika PPP menerima koalisi dari partai lain karena para partai menjelaskan mereka sebelum memutuskan untuk mencalonkan pasangan dalam Pilkada pasti melihat survey dulu. Dan dilihat sosok kepemimpinan petahana masih di senangi masyarakat oleh sebab itulah para partai memutuskan untuk bergabung bersama PPP dalam mengusung pasangan petahan ini. Meski bertolak belakang dengan kekecewaan yang di tunjukan oleh masyarakat karena memilih tanpa pilihan, para partai pengusung tetap kekeh bahwa mereka beranggapan ini adalah jalan terbaik.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 ternyata memunculkan reaksi emosional yang kuat dari masyarakat. Banyak warga yang menyatakan kekecewaannya karena tidak diberikan pilihan alternatif dalam menentukan pemimpin daerahnya. Dalam sistem demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan untuk memilih, kehadiran hanya satu pasangan calon dianggap sebagai bentuk keterbatasan ruang politik yang sehat⁶⁰. Hal ini memunculkan perasaan tidak puas dan keterputusan emosional masyarakat terhadap proses pemilu. Kekecewaan tersebut bukan hanya menjadi sekadar opini, namun juga tercermin dalam tindakan nyata masyarakat yang memilih untuk tidak datang ke TPS atau secara sadar memberikan suara pada kolom kosong sebagai bentuk protes simbolik.

“Ya, kalo emosional masyarakat tergantung dia berada dimana, kalo dia dari pengusung ya biasa saja. Tapi kalo dia bukan partai pengusul masyarakat umum yang melihat ada calon-calon yang lebih pantas yang

⁶⁰ Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 21-33.

punya kualitas yang cukup juga dilaur dari yang maju itu ya kecewa, juga pasti secara emosional mereka kecewa karena mungkin menurut mereka ada orang yang pantas dimunculkan kok tidak muncul, tidak mungkin batang hari hanya Fadil dan Bahtiar saja yang layak dan pantas menjadi kepala daerah, pasti ada tenaga potensi yang lain putra-putra potensi bagi Batang Hari tapi kan secara proses politik tidak muncul ya itukan banyak factor tadi factor partai politik juga dan yang lain juga”⁶¹

Data dari KPU menunjukkan bahwa dari total 218.007 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 153.211 orang yang datang menggunakan hak pilihnya, sedangkan sisanya sebanyak 64.796 tidak datang ke TPS. Dari jumlah yang hadir, sebanyak 32.667 orang memilih kolom kosong, sementara pasangan calon Fadhil-Bakhtiar memperoleh 114.674 suara, dan suara tidak sah tercatat sebanyak 5.870. Jika dianalisis lebih dalam, terdapat sekitar 38.537 warga yang secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan penolakan terhadap calon tunggal, baik melalui tidak memilih atau memilih kolom kosong. Angka ini menggambarkan adanya keterputusan antara masyarakat dengan kontestasi politik lokal yang mereka nilai tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa persepsi emosional masyarakat terhadap Pilkada tidak semata-mata soal teknis pemilihan, tetapi sangat berkaitan dengan persepsi keadilan, kepercayaan terhadap sistem politik, serta sejauh mana mereka merasa terlibat secara nyata dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Pilihan terhadap kolom kosong menjadi simbol dari ekspresi demokrasi yang pasif, namun bermakna: warga tetap hadir ke TPS, namun tidak memberikan mandat pada calon yang ada. Maka, keterikatan emosional masyarakat terhadap proses politik dalam konteks

⁶¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nasuhaidi, *Log.Cit...*

calon tunggal ini tampak mengalami kemunduran. Fenomena ini menjadi peringatan bahwa keberhasilan prosedural dalam penyelenggaraan pilkada tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi substantif di mata warga.

3.1.3 Evaluasi Masyarakat terhadap Proses dan Pilihan Politik pada Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 (Evaluatif)

Pilkada dengan calon tunggal, seperti yang terjadi di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2024, memunculkan dinamika tersendiri dalam praktik demokrasi lokal. Ketika hanya tersedia satu pasangan calon dan pilihan alternatif berupa “kotak kosong”, maka proses evaluasi politik dari masyarakat menjadi sangat penting untuk dianalisis. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana proses pemilu dianggap adil, transparan, dan benar-benar mewakili kehendak rakyat⁶². Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek pemilu, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk menilai kualitas demokrasi yang dijalankan, meskipun dalam keterbatasan pilihan.

Evaluasi masyarakat terhadap proses politik pada Pilkada calon tunggal sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi penyelenggara, partai politik, dan aktor politik lokal⁶³. Masyarakat akan menilai apakah proses pemilu memberikan ruang partisipatif yang cukup, apakah kampanye dilakukan secara adil dan inklusif, serta apakah keberadaan

⁶² Alaydrus, A., dkk, (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Indra mayu: Penerbit Adab.

⁶³ Wijayanti, S. N. (2024). Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 78-93. Hlm. 84

calon tunggal merupakan hasil konsensus atau keterpaksaan akibat dominasi kekuasaan politik. Dalam beberapa kasus, seperti di Batang Hari, ketiadaan pilihan kerap memicu kekecewaan, rasa tidak puas, bahkan sikap skeptis terhadap sistem pemilu. Oleh karena itu, penilaian masyarakat atas kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan demokrasi di daerah tersebut.

“Ya fenomena yang terjadi satu parpol tidak berhasil melakukan pengkaderan mestinya kan parpol semua punya calon pemimpin diinternal parpol misalnya walaupun tidak harus dari dalam tapi kan dia tugas salah satunya adalah pengkaderan mestinya mereka punya kader itu dari segi parpol, kemudian dari segi bakal calon mungkin Sebagian masyarakat menganggap bahwa berpolitik itu membutuhkan dana yang besar sehingga orang yang punya kemampuan bisa saja enggan untuk muncul karena politikalcoas itu kan mahal karena dia bergerak butuh uang untuk melakukan sesuatu pertemuan segala macam butuh uang mungkin karena keterbatasan ekonomi jadi mereka-mereka yang potensi itu enggan untuk masuk. Kemudian dari segi SDM batang hari bukan tidak punya SDM yang mumpuni untuk calon bupati tapi itu tadi mungkin pertimbangan politikalcoas biaya politik tidak sedikit sehingga dia enggan untuk menunjukkan keinginannya untuk maju sebagai pasangan calon.”⁶⁴

Wawancara di atas menjelaskan dari sudut pandang pengamat politik yang memahami melalui sudut pandang akademis, menjelaskan jika partai politik seharusnya menjadi gerbang atau wadah yang bertanggung jawab hadir dalam membentuk figure politik apalagi Pilkada, parpol menjadi wadah dalam mengusung hadirnya pemimpin-pemimpin baru, baik melalui kader murni atau mengkaderkan sosok yang mampu mengemban amanah ini. Oleh sebab itu tugas partai politik bukan lagi sebagai pengusung dan wadas aspirasi saja, tapi sebagai rumah dalam melahirkan tokoh-tokoh pemimpin baru⁶⁵.

⁶⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nasuhaidi, *Log.Cit...*

⁶⁵ Ilham, Pruwaningsi, T. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar 2018. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2). 164-173. Hlm 165.

“Untuk menilai alternatif perlu banyak pertimbangan didalam partai politik dia punya nanti prosedur-prosedur yang harus dilengkapi untuk kelayakan dalam seorang pemimpin itu sesuai nanti kesepakatan dari beberapa pengurus parpol tersebut maka untuk kelayakan itu dia butuh proses administrasi, keterampilan dalam memimpin dalam jejak pengalaman dan beliau juga melihat dari bagaimana mentalitas dalam memimpin kabupaten batang hari. Tetapi jgn lupa parpol memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memunculkan kader-kader kuat nya sebagai pemimpin, dan juga parpol harus menjadi pilar utama. Untuk apa ada parpol banyak kalo ketika pemilihan mereka bersatu dalam satu calon. Kan prinsip dan pandangan orang itu beda-beda.”⁶⁶

Kehadiran jumlah partai politik yang begitu banyak dengan ideology yang berbeda-beda tentunya menjadi pondasi dasar haru adanya pilihan dalam kontestasi, sebagaimana hasil wawancara di atas. Mengingat para partai politik memiliki perbedaan pandangan dan sebagainya. Idealnya ketika suatu kepentingan dapat terakomodir dengan baik maka suatu partai akan membentuk koalisi demi mencukupi persyaratan ambang batas dalam mencalonkan pasangan calon. Berbeda dengan kasus di Batang Hari seolah-oleh 9 partai parlemen memiliki kesamaan pandangan tujuan sehingga ke-9 partai tersebut bulat mengusung petahan. Tentu ada hal lain di belakang yang di bicarakan sebagaimana wawancara berikut:

“Dari sisi pasangan calon yang maju dia menganggap dia berhasil melakukan konsolidasi dengan para pengurus partai dia merasa berhasil tapi bagi parpol itukan indikasi ketidak berhasilan parpol untuk menjaring calon-calon potensi yang ada diluar partai diluar dari inkuben misalnya begitu. Dan juga tentu ada kepentingan lain semuanya sudah di bicarakan ditingkat internal para parpol, mungkin ada deal delan sehingga seluruh parpol parlemen di batang hari memilih bersama mengajukan paslon ini”.⁶⁷

Lebih lanjut, evaluasi ini juga mencerminkan tingkat literasi politik masyarakat. Masyarakat yang kritis cenderung memiliki penilaian tajam

⁶⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muttaqin, *Log.Cit...*

⁶⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nasuhaidi, *Log.Cit...*

terhadap minimnya kompetisi dan dapat mengekspresikan ketidakpuasan melalui partisipasi simbolik, seperti memilih “kotak kosong” atau menolak datang ke TPS. Terlihat meski tingkat partisipasi 70% namun suara kemenangan yang di peroleh oleh pasangan tunggal tidak sepenuhnya mayoritas, berarti masih banyak masyarakat yang menginginkan perubahan. Dengan kurangnya informasi dalam mencoblos kotak kosong menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami, dan berpikiran lebih baik di pilih dari pada suara mereka sia-sia, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sebenarnya demokrasi yang sehat itu bukan tergantung kepada satu calon atau lebih akan tetapi masyarakat diberi wewenang hak memilih dan dipilih itu demokrasi yang sehat. Yang walaupun jika Cuma hanya 1 calon ini menandakan tidak ada pilihan, dan juga meski pun ada kolom kosong jelas yang akan dipilih yang ada gambarnya. Karena penjelasan dan sosialisasi dari pihak KPU dapat dikatakan sedikit sehingga masyarakat tidak memahami adanya kotak kosong ini. Jadi demokrasi bisa jadi terhambat.”⁶⁸

Dalam hal ini, dimensi evaluasi dalam teori partisipasi politik menurut McClosky dan Verba & Nie (1972) menjadi sangat relevan. Evaluasi masyarakat terhadap kualitas pilihan politik, proses pemilu, serta dampaknya terhadap tata kelola lokal akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai problematika demokrasi dalam situasi calon tunggal. Penilaian ini penting tidak hanya untuk memahami respons masyarakat, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi penyelenggara pemilu dan partai politik dalam membenahi sistem politik lokal ke depan.

Hasil evaluasi masyarakat terhadap Pilkada calon tunggal di Kabupaten Batang Hari tahun 2024 menunjukkan adanya kekecewaan mendalam

⁶⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Darmawi, Selaku Masyarakat Asli Kabupaten Batang Hari, Pada 23 Mei 2025.

terhadap peran partai politik. Banyak masyarakat menilai bahwa kegagalan partai dalam menjalankan fungsi kaderisasi menjadi akar dari minimnya pilihan politik⁶⁹. Tidak adanya tokoh baru yang ditawarkan kepada publik, baik dari internal partai maupun tokoh potensial lainnya, menandakan lemahnya sistem rekrutmen politik yang sehat. Partai-partai seolah hanya menjadi kendaraan politik praktis yang mengutamakan akomodasi kekuasaan ketimbang regenerasi kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batang Hari secara substansial. Hal ini pada akhirnya mendorong terbentuknya satu-satunya pasangan calon yang menjadi kontestan tunggal, menyisakan “kotak kosong” sebagai satu-satunya alternatif pilihan bagi pemilih.

Lebih lanjut, masyarakat juga mengevaluasi adanya indikasi kuat kepentingan politik pragmatis di balik bersatunya sembilan partai politik untuk mendukung pasangan petahana. Dalam konteks demokrasi yang sehat, keberagaman ideologi seharusnya memunculkan kompetisi politik yang rasional, bukan justru menyatukan partai-partai dalam satu koalisi tunggal tanpa oposisi yang berarti. Publik Batang Hari mempertanyakan motif dari penyatuan tersebut, apalagi mengingat sejarah politik lokal yang dahulu diwarnai rivalitas kuat antartokoh. Fenomena ini memunculkan dugaan publik bahwa keputusan partai-partai untuk tidak mengusung calon alternatif lebih didasari oleh kompromi kekuasaan dan kepentingan elite, bukan hasil dari konsensus politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini

⁶⁹ Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65-76.

memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas proses pencalonan dalam Pilkada 2024.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa dengan tidak adanya pilihan alternatif dalam Pilkada, proses demokrasi menjadi tidak bermakna. Partisipasi yang mestinya menjadi ajang menentukan pemimpin daerah berubah menjadi prosedural semata tanpa ruang deliberatif. Evaluasi ini memperlihatkan bahwa di balik perolehan suara pasangan calon yang tinggi, tersimpan keresahan dan kejenuhan publik terhadap politik lokal yang dianggap tidak memberikan ruang keterlibatan masyarakat secara substantif. Rasa jenuh ini juga tercermin dari angka golput yang cukup signifikan dan tingginya jumlah suara kotak kosong, yang menjadi bentuk ekspresi penolakan terhadap situasi politik yang dianggap tidak demokratis. Oleh karena itu, Pilkada Batang Hari 2024 tidak hanya menyisakan evaluasi terhadap calon atau penyelenggara, tetapi lebih luas lagi terhadap ekosistem politik lokal yang gagal mendorong tumbuhnya demokrasi yang sehat dan kompetitif.

3.1.4 Aksi Politik Masyarakat dalam Menyikapi Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 (Perilaku Aksi Nyata)

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 telah memunculkan beragam respons dari masyarakat, baik secara verbal maupun dalam bentuk tindakan nyata di arena politik. Dimensi aksi politik atau perilaku politik menurut Herbert McClosky dan Verba & Nie (1972) menggambarkan bagaimana individu atau kelompok mengekspresikan partisipasi mereka dalam bentuk nyata, seperti memberikan

suara dalam pemilu, ikut serta dalam kampanye, menyuarakan pendapat melalui media sosial, hingga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks Pilkada calon tunggal, dimensi ini menjadi sangat penting untuk dipahami karena masyarakat tidak hanya dihadapkan pada pilihan untuk memilih pasangan calon, tetapi juga pada kemungkinan memilih kolom kosong atau bahkan golput sebagai bentuk ekspresi sikap politik.

Gambar. 3.2
Kamapnye Kotak Kosong Oleh Sejumlah
Masyarakat Batang Hari



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025

Aksi politik dalam situasi Pilkada dengan calon tunggal tidak selalu terwujud dalam bentuk dukungan terhadap pasangan calon yang ada. Sebaliknya, banyak masyarakat justru menggunakan aksi pasif atau protes sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem dan proses politik yang dianggap tidak memberikan alternatif pilihan, sebagaimana pada gambar 9 di atas. Serta kampanye kotak kosong juga diperbolehkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari⁷⁰. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memilih

⁷⁰ <https://regional.kompas.com/read/2024/09/23/230439278/kpu-batanghari-izinkan-kampanye-kotak-kosong-di-pilkada-2024> Diakses pada 01 Juni 2025.

kolom kosong, tidak hadir ke TPS, atau menyuarakan kritik secara terbuka di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif Pilkada tetap berjalan, secara substansial terjadi kekosongan legitimasi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Aksi-aksi ini menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa terlibat, diikutsertakan, dan dihargai dalam proses politik lokal.

“Ya jadi begini terkait dengan partisipasi ini KPU kan tidak bisa bekerja sendiri KPU juga meminta kepada jajaran adhoc kami seperti PPK, PPS dan KPPS untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih namun juga tidak bisa hanya KPU saja butuh chatholder seperti pemerintah daerah untuk mensosialisasikan yang paling penting adalah peserta pemilunya/pilkadanya seperti bupati dan wakil bupati mereka akan membentuk tim, tim pemenang ditingkat Kabupaten, kecamatan dan desa juga untuk mensosialisasikan kepada para pemilih mereka untuk datang ke TPS karena hanya satu pasangan calon ya tentu hanya ada satu tim pemenang jadi kalo tingkat partisipasi dipilkada tahun 2024 kami itu 70,18% kalo dipilkada tahun 2020 KPU Batang Hari/Pilkada Batang Hari itu tertinggi diprovinsi diangka 84% jadi ada penurunan sekitar 13, sekian %.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat pengurangan partisipasi masyarakat untuk memilih, KPU Kabupaten Batang Hari mengungkapkan berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa memang terjadi penurunan partisipasi dari 84% ke 70% hal ini memang diakui karena animo masyarakat akibat kotak kosong ini jadi berkurang untuk memilih pada Pilkada tahun 2024 lalu. Ini merupakan bentuk aksi nyata tanggapan masyarakat akibat adanya calon tunggal. Tentu menjadi evaluasi bagi kesehatan dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia khususnya.

“Itu sebenarnya ada berapa kemungkinannya pertama bukan senang terhadap calon tunggalnya nah kadang-kadang masyarakat itu digiring politik yang tidak sehat ada juga masyarakat senang dengan calon tapi tidak senang dengan timnya ada juga kepentingan lain menggiring

⁷¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Hali, *Loc. Cit...*

kekotak kosong tapi itu dak masalah kan betuk demokrasi ado hak pilih nyo, sampai jugo ado yang mengkamapnyekan kotak kosong memang dk biso dipungkiri kepemimpinan petahana ini sudah bagus, banyak kurangnyo namun buat apo lagi pemilihan lah terjadi maka mau diapokan. Dampaknyo yo banyak orang yang malas ke TPS malah milih karno tau calonnyo Cuma satu dan besar kemungkinan menang.”⁷²

Lebih jauh lagi, penting untuk menelusuri bagaimana bentuk-bentuk aksi politik ini muncul dari latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman politik masyarakat. Misalnya, sebagian masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan politik lebih tinggi cenderung memilih kolom kosong secara sadar sebagai bentuk kritik terhadap hegemoni politik petahana. Sementara itu, kelompok lain mungkin tidak datang ke TPS karena merasa tidak ada gunanya memilih dalam kontestasi yang tidak memberikan pilihan, sebagaimana hasil wawancara bersama pemuda peduli demokrasi berikut:

“Ya saya tidak memilih kotak kosong tapi saya memilih calon tunggal karena calon tunggal itu rekam jejaknya sudah, pengalamannya sudah beliau lakukan. Tetapi banyak teman teman saya ya memang kan pemuda itu memiliki pikiran kritis jadi mereka menganggap kotak kosong ini sudah di atur oleh pethana, jadi jika kepentingan banyak di dalam sana maka sebuah kebijakan pemimpin yg terpilih ini kedepanya akan berkurang karna kan memang membalas jasa-jasa dari partai yang seharusnya bisa menjadi lawan tapi menjadi kawan akibat adanya lobi-lobi politiki. Ya jadi tentu banyak anak muda batang hari yang malas datang ke TPS akibat kotak kosong ini.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memang ditunjukkan pemilihan kalangan muda memang memiliki pemikiran yang berbeda sehingga anak muda lebih mudah untuk membaca situasi dan mempertimbangkan apa yang telah terjadi dalam kontek Pilkada di Kabupaten Batang Hari tahun 2024 lalu. Analisis terhadap perilaku politik ini dapat memberikan gambaran yang lebih

⁷² Hasil Wawancara Bersama Bapak Darmawi, *Loc.Cit...*

⁷³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muttaqin, *Loc.Cit...*

lengkap mengenai kualitas demokrasi lokal dan seberapa jauh masyarakat Batang Hari memiliki ruang untuk mengekspresikan kedaulatan politik mereka melalui tindakan nyata, sekalipun dalam situasi yang terbatas seperti Pilkada calon tunggal.

“Bisa, mestinya kalo misalnya masyarakat sebagian besar sebetulnya tidak menghendaki pasangan calon itu. Ya bisa dipilih kotak kosong, menang kotak kosong diadakan pemilihan berikutnya maka sang calon itu dalam yang saya baca tidak bisa mencalonkan diri, tapi berefek terhadap biaya pilkada itu biayanya besar sekali jadi kalo diulang kosenkuensi terhadap anggaran luar biasa ya gitu jadi masyarakat sebra sulit yang ideal nanti diulang pakai banyak dana kemudian kalo diteruskan yang ini calon pemimpin sudah jelas itu.”⁷⁴

Keterangan wawancara bersama pengamat politik di atas juga turut menjelaskan aksi protes atau tanggapan masyarakat yang tidak menerima kotak kosong juga bisa dilakukan dengan memilih kotak kosong tersebut. Hal ini merupakan hak bagi mereka sebagai warga negara yang tinggal dinegara demokrasi. Kotak kosong disediakan oleh KPU sebagai alternative untuk para pemilih menunjukkan masih mau memilih ataupun pilihan dari pasangan calon tunggal yang ada. Hasilnya akan tetap menjadi evaluasi tentunya, baik jika pasangan calon tunggal terpilih ataupun tidak terpilih⁷⁵. Hal ini juga di sampaikan oleh ketua KPU Kabupaten Batang Hari mengenai adanya kolom khusus sebagai alternative pilihan masyarakat dalam wawancara berikut:

“Terkait dengan hak politik mereka masyarakat Batang Hari tetap memiliki hak untuk memilih kenapa ada kolom kosong ini yang diatur oleh UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota bahwa masyarakat tetap memilih namun secara tidak langsung disurat suara terdapat hanya satu kotak gambar kosong dan satu yang bergambar ini yang diistilahkan masyarakat kotak kosong jika masyarakat tidak setuju

⁷⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nasuhadi, *Loc. Cit...*

⁷⁵ Lubis, Y. H. (2024). Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis. *Journal of Studia Legalia*, 5(01).

dengan pasangan calon maka dia memilih kotak kosong, jika dia setuju dengan calon tunggal dia memilih yang bergambar itu lah hak politik mereka jangan dianggap kotak kosong tidak memiliki hak politik mereka tetap memiliki hak politik mereka sebagaimana biasanya untuk pemimpinya 5 tahun kedepan, kami KPU juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar datang ke tps pada tanggal 27 November 2024 mereka memilih secara langsung, rahasia terkait setuju dan tidak setuju pada pasangan calon tunggal ini”⁷⁶

Penjelasan di atas jelas jika bentuk aksi nyata dari masyarakat yang tidak menghendaki hanya satu pasangan calon tentu di berikan akses dan dijamin oleh negara melalui aturan untuk tetap memilih pilihan pada kotak kosong. Sebagai prinsip negara demokrasi yang sesungguhnya jelas adanya pilihan dalam Pemilu merupakan bentuk ideal bagi keberlangsungan demokrasi tersebut. Kasus kotak kosong ini juga tidak bisa di remehkan, aksi nyata masyarakat terhadap penolakan pasangan tunggal kerap berhasil di beberapa daerah, pada Pilkada tahun 2024 lalu tercatat di Indonesia terdapat 37 pasangan tunggal yang melawan kotak kosong diantaranya dalam informasi data tabel berikut:

Tabel. 3.2
Daftar Daerah dengan Calon Tunggal yang melawan Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2024

No	Provinsi	Kabupaten	Kota
1		Aceh Utara	Pangkal Pinang
2		Aceh Tamiang	Pasuruan
3		Asahan	Surabaya
4		Fakfak Barat	Samarinda
5		Serdang Bedagai	Tarakan
6		Nias Utara	
7		Labuhan Ratu Utara	
8		Dharmasraya	
9		Batang Hari	
10		Ogan Ilir	
11		Empat Lawang	

⁷⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Halim, *Loc. Cit...*

12	Papua Barat	Bengkulu Utara	
13		Lampung Barat	
14		Tulang Bawang Barat	
15		Bangka	
16		Bangka Selatan	
17		Bintan	
18		Ciamis	
19		Banyumas	
20		Sukoharjo	
21		Brebes	
22		Trenggalek	
23		Ngawi	
24		Gresik	
25		Bengkayang	
26		Tanah Bumbu	
27		Balangan	
28		Malinu	
29		Maros	
30		Muna Barat	
31		Pasang Kayu	
1 Provinsi		31 Kabupaten	5 Kota Madya

Sumber: KPU Republik Indonesia, 2025

Berdasarkan data di atas pada Pilkada lalu diikuti 1 Provinsi, 31 Kabupaten dan 5 Kota Madya yang melaksanakan Pilkada serentak melawan kotak kosong atau hanya pasangan calon tunggal. Dari jumlah 37 tersebut tercatat sebanyak 2 daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong diantaranya Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang⁷⁷. Kemenangan ini tentu jelas menunjukkan jika masyarakat memiliki aksi nyata dalam menanggapi adanya kotak kotong sebagai pilihan mereka. Masyarakat memiliki keinginan sendiri. Sehingga kotak kosong akan menjadi alternatif.

⁷⁷ <https://www.tempo.co/politik/daftar-pilkada-2024-yang-diikuti-paslon-tunggal-dan-yang-dimenangkan-kotak-kosong-1180306> Diakses melalui 02 Juni 2025.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 telah melahirkan berbagai bentuk aksi politik dari masyarakat sebagai wujud kekecewaan sekaligus partisipasi kritis terhadap dinamika demokrasi lokal. Salah satu bentuk aksi yang paling mencolok adalah terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang secara sukarela membentuk tim kampanye “kotak kosong” sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi politik calon petahana yang tidak memiliki pesaing. Inisiatif ini lahir dari kesadaran politik bahwa memilih kolom kosong adalah bentuk sah dan konstitusional untuk menolak calon tunggal, sekaligus menjadi ruang artikulasi suara protes atas ketidaktersediaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Aksi ini menjadi manifestasi nyata dari partisipasi politik dalam dimensi perilaku, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam menentukan arah demokrasi. Lebih lanjut, KPU Kabupaten Batang Hari sendiri memberikan pemahaman dan sosialisasi bahwa masyarakat memiliki hak untuk memilih kotak kosong dalam surat suara sebagai bagian dari hak politik yang dijamin undang-undang. Hal ini menjadi penegasan bahwa sistem demokrasi lokal masih memberi ruang untuk ekspresi ketidaksetujuan melalui mekanisme formal, meskipun tidak semua kalangan masyarakat benar-benar memahami implikasi politik dari pilihan ini.

Di sisi lain, fenomena serupa juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana kolom kosong berhasil memenangkan kontestasi Pilkada, seperti di Makassar tahun 2018 dan di Pangkal Pinang serta Bangka. Hal ini

menunjukkan bahwa gerakan kolom kosong bukan sekadar simbol penolakan, tetapi bisa menjadi strategi kolektif yang efektif untuk mendorong perbaikan sistem politik dan menegaskan pentingnya adanya alternatif dalam kontestasi elektoral⁷⁸. Dengan demikian, aksi politik masyarakat Batang Hari, baik melalui pembentukan tim kampanye kotak kosong, penggunaan hak pilih untuk tidak memilih calon tunggal, maupun suara kritis di media sosial dan forum publik, menjadi gambaran nyata dari kesadaran politik yang tumbuh dalam situasi yang tidak ideal.

Meski Pilkada tetap berlangsung dan pasangan calon tunggal memenangkan suara terbanyak, fakta bahwa 32.667 pemilih memilih kotak kosong dan 38.537 tidak hadir ke TPS menunjukkan adanya daya kritis yang terus berkembang. Ini menegaskan bahwa perilaku politik masyarakat tidak sepenuhnya apatis, melainkan sedang mencari saluran ekspresi yang lebih representatif dan adil dalam sistem politik lokal. Oleh karena itu, keberadaan aksi nyata ini harus menjadi refleksi bagi partai politik dan penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan memastikan setiap pemilu benar-benar menghadirkan pilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 telah menimbulkan berbagai problematika dari sudut pandang partisipasi politik masyarakat. Dengan menggunakan teori partisipasi politik McClosky dan pengembangnya Verba & Nie (1972), penelitian ini mampu memetakan persoalan melalui empat dimensi utama: kesadaran politik, orientasi politik, evaluasi politik, dan aksi politik. Masing-masing dimensi menunjukkan adanya dinamika sosial-

⁷⁸ Anisah, A., dkk (2024). Dilema Demokrasi: Kotak Kosong Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Tingkat Lokal. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 587-593.

politik yang kompleks. Mulai dari kurangnya informasi yang merata, ketidaktahuan sebagian masyarakat mengenai keberadaan kolom kosong, kekecewaan masyarakat terhadap minimnya pilihan, hingga evaluasi tajam terhadap kegagalan partai politik dalam mencetak alternatif calon, semuanya memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi di daerah ini tengah menghadapi tantangan serius.

Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan tersebut, muncul bentuk partisipasi alternatif seperti gerakan kampanye kolom kosong sebagai wujud nyata dari kesadaran dan aksi politik masyarakat. Hal ini menandakan bahwa meskipun demokrasi elektoral mengalami kemunduran dalam hal pilihan politik, masyarakat masih memiliki semangat untuk menyuarakan hak dan ekspresinya secara sah. Subbab 3.1 menjadi fondasi penting untuk memahami situasi politik lokal di Batang Hari serta menjelaskan bagaimana masyarakat merespons keterbatasan demokrasi dalam konteks pilkada calon tunggal. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang menyoroti peran partai politik dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kompetitif.

3.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Calon Tunggal Dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 bukanlah sesuatu yang hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik secara struktural maupun kultural. Dalam konteks demokrasi lokal, keberadaan hanya satu pasangan calon dalam kontestasi politik tentu mencerminkan adanya permasalahan serius yang perlu dikaji lebih dalam. Subbab ini akan mengupas berbagai faktor yang menyebabkan

tidak munculnya lawan politik yang kompetitif untuk menantang pasangan petahana, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berkelindan dengan dinamika politik lokal dan nasional.

Penelitian ini menggunakan pisau analisis dari teori partisipasi politik Herbert McClosky serta pengembangannya oleh Verba & Nie (1972) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi. Dengan merujuk pada dimensi-dimensi seperti kesadaran, orientasi, evaluasi, dan perilaku politik, dapat terlihat bahwa fenomena calon tunggal ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya infrastruktur politik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, kepedulian, dan kekritisian masyarakat serta peran institusi politik itu sendiri. Rendahnya kualitas kaderisasi partai politik, minimnya regenerasi kepemimpinan, hingga dominasi politik kekuasaan menjadi faktor signifikan yang membentuk keadaan ini.

Selain itu, subbab ini juga akan memperlihatkan bagaimana partai-partai politik yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menciptakan kompetisi demokratis justru cenderung pragmatis dan terjebak dalam logika kekuasaan semata. Fenomena bergabungnya sembilan partai politik besar ke dalam satu barisan pencalonan pasangan petahana menunjukkan terjadinya kompromi politik yang lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek dibandingkan komitmen terhadap demokratisasi. Akibatnya, masyarakat tidak diberi ruang untuk memilih secara bebas dan kompetitif, yang pada akhirnya mencederai nilai-nilai demokrasi. Subbab ini akan memaparkan dan menguraikan secara sistematis berbagai faktor penyebab tersebut berdasarkan temuan di lapangan dan analisis teoritis yang mendalam.

Berikut beberapa faktor yang peneliti ungkap sebagai faktor-faktor utama yang menjadi pendorong terjadinya Pilkada melawan kotak kosong di Kabupaten Batang Hari:

3.2.1 Adanya Pengaruh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM) yang memonofoli pengusungan calon di berbagai daerah di Indonesia

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan politik nasional yang turut memengaruhi dinamika lokal. Salah satu faktor utama adalah pengaruh dari terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) yang terjadi secara nasional, di mana banyak partai politik besar bergabung dalam satu barisan koalisi untuk mendukung pasangan calon tertentu, termasuk dalam pilkada di tingkat kabupaten/kota. Imbas dari strategi politik nasional ini membuat banyak partai di daerah, termasuk di Kabupaten Batang Hari, ikut merapat dan mendukung calon petahana demi menjaga stabilitas politik dan mempertahankan hubungan struktural dengan kekuasaan pusat. Hal ini menyebabkan hilangnya kompetisi di level lokal karena seluruh kekuatan politik besar mengarahkan dukungan pada satu sosok, yakni Fadhil Arief, tanpa membuka ruang bagi munculnya figur alternatif⁷⁹.

⁷⁹ <https://www.kompas.id/artikel/koalisi-indonesia-maju-dominasi-pilkada-positif-untuk-hubungan-pusat-dan-daerah> Diakses Pada 03 Juni 2025.

3.2.2 Keterhambatan dan ketidak Beranian Partai Politik Melakukan Kaderisasi dan Mengajukan Calon sendiri

Di samping itu, keterbatasan partai politik lokal dalam melakukan kaderisasi juga menjadi akar persoalan yang tidak bisa diabaikan. Idealnya, partai politik berperan sebagai mesin rekrutmen dan pengkaderan calon pemimpin masa depan⁸⁰. Namun, realitas di Batang Hari menunjukkan bahwa banyak partai masih belum optimal dalam membangun kader internal yang layak dan siap maju dalam kontestasi kepala daerah. Ketiadaan regenerasi politik ini berdampak langsung pada minimnya pilihan bagi masyarakat dan menyebabkan partai lebih memilih strategi pragmatis, yaitu mendukung petahana daripada mencalonkan kader sendiri yang belum siap secara elektabilitas maupun logistik. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya komitmen partai terhadap demokratisasi politik dan lebih condong kepada kalkulasi kekuasaan jangka pendek.

3.2.3 Tingginya Elektabilitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Calon Petahana

Faktor ketiga yang turut memperkuat terjadinya calon tunggal adalah tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Fadhil Arief sebagai Bupati petahana. Dalam berbagai wawancara dan pengamatan lapangan, sosok Fadhil dinilai cukup berhasil dalam membangun infrastruktur dan program-program pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan

⁸⁰ <https://www.aksipost.com/arsip/83242/politisi-senior-ungkap-penyebab-kotak-kosong-di-batanghari-parpol-tidak-punya-nyali-melawan-petahana/> Diakses Pada 04 Juni 2025.

masyarakat⁸¹. Hal ini membuat elektabilitasnya tetap tinggi menjelang Pilkada 2024, sehingga banyak partai menilai bahwa mencalonkan kandidat tandingan justru hanya akan berujung pada kekalahan. Maka, pilihan “rasional” menurut banyak elite partai adalah mendukung calon yang sudah kuat secara popularitas dan dinilai mampu menang mutlak, demi mempertahankan eksistensi dan mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan yang akan datang.

3.2.4 Absenya Rivalitas yang dianggap Sepadan dengan elektabilitas Petahan

Terakhir, absennya sosok rival yang seimbang juga menjadi faktor signifikan dalam munculnya calon tunggal. Salah satu figur potensial penantang Fadhil adalah Hafiz Fattah, yang sebelumnya pernah bertarung dalam Pilkada Batang Hari dan kini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional (PAN)⁸². Namun, keberhasilan Hafiz terpilih sebagai anggota DPRD provinsi dan menjabat sebagai ketua lembaga legislatif tersebut, membuatnya memilih fokus pada peran strategis di tingkat provinsi ketimbang kembali bertarung di Pilkada tingkat kabupaten. Keputusan ini semakin memperkuat posisi Fadhil sebagai satu-satunya tokoh yang layak diusung, karena tidak ada lagi figur pesaing yang memiliki kekuatan basis massa maupun sumber daya politik yang setara.

⁸¹<https://www.tempo.co/info-tempo/seluruh-parpol-dukung-fadhil-dan-bakhtiar-lanjutkan-kepemimpinan-di-batanghari-14612> Diakses Pada 04 Juni 2025.

⁸²<https://jambi.tribunnews.com/2023/07/26/reaksi-fadhil-arief-bersaing-akseptabilitas-dengan-hafiz-fattah-untuk-pilkada-batanghari-2024> Diakses Pada 04 Juni 2025.

Dengan demikian, calon tunggal dalam Pilkada Batang Hari merupakan akibat dari kombinasi berbagai faktor: konfigurasi politik nasional melalui KIM Plus, lemahnya proses kaderisasi partai di tingkat lokal, dominasi elektabilitas petahana, dan absennya rival yang mampu menantang secara serius. Fenomena ini mengindikasikan bahwa demokrasi elektoral di daerah sedang mengalami kondisi stagnasi kompetisi yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam konteks memperkuat kembali partisipasi politik yang sehat dan kompetitif. Sebagai penutup dari subbab 3.2 ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari bukanlah semata-mata hasil dari keputusan sepihak atau kondisi yang terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor sistemik dan struktural yang saling terkait.

Dominasi kekuatan politik nasional seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) telah mempersempit ruang kompetisi politik di tingkat lokal, sebab mayoritas partai-partai besar telah diarahkan untuk bersatu mendukung satu calon tertentu. Di sisi lain, ketidakmampuan partai politik lokal untuk mencetak kader potensial dan kuat menjadikan mereka tidak memiliki opsi internal untuk bertarung dalam kontestasi. Akibatnya, partai lebih memilih posisi aman, yaitu mendukung petahana ketimbang mengambil risiko kalah dalam pertarungan terbuka. Fenomena ini mencerminkan kondisi demokrasi lokal yang mengalami kerapuhan dalam konteks regenerasi politik dan pelebagaan partai.

Tidak hanya partai yang gagal memainkan perannya, tetapi juga masyarakat dirampas hak pilih alternatifnya akibat tidak adanya pilihan lain dalam surat suara. Dalam konteks Batang Hari, kegagalan hadirnya rival kuat seperti Hafiz Fattah, yang lebih memilih berkiprah di tingkat provinsi, memperkuat posisi Fadhil Arief

sebagai calon tunggal tanpa lawan sepadan. Situasi ini harus menjadi refleksi mendalam bagi semua pihak, khususnya partai politik dan aktor-aktor demokrasi lainnya, untuk membenahi sistem rekrutmen, memperkuat kaderisasi, serta menjaga prinsip demokrasi agar tetap kompetitif dan memberi ruang partisipasi politik yang lebih luas di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Fenomena calon tunggal atau kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 yang dianalisis menggunakan teori partisipasi politik menurut Herbert McClosky serta Verba & Nie (1972), yang mencakup dimensi orientasi kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku (aksi politik), serta analisis terhadap faktor-faktor penyebab munculnya pasangan calon tunggal dalam kontestasi tersebut. Dari dimensi orientasi kognitif, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Batang Hari yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hak memilih kolom kosong, terutama pada pemilih usia lanjut.

Sosialisasi dari KPU memang telah dilakukan, namun belum menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat. Minimnya informasi yang diterima membuat banyak pemilih menganggap bahwa kotak kosong tidak dapat dipilih, sehingga secara tidak langsung memberikan keunggulan pada calon tunggal yang fotonya terpampang di surat suara. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit pengetahuan politik warga yang turut berdampak pada kualitas demokrasi lokal. Pada dimensi orientasi afektif, masyarakat menunjukkan rasa kecewa dan frustrasi karena tidak memiliki alternatif pilihan dalam Pilkada. Kekecewaan ini tercermin dari data partisipasi, di mana lebih dari 64 ribu pemilih tidak datang ke TPS, dan lebih dari 32 ribu memilih kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik yang ada.

Tingginya angka golput dan pemilih kotak kosong menunjukkan bahwa secara emosional, masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses demokrasi yang

sehat, dan merasa kecewa atas situasi politik yang terkesan telah diatur sejak awal. Dari sisi orientasi evaluatif, mayoritas masyarakat menilai bahwa terjadinya calon tunggal mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi. Tidak hadirnya figur alternatif yang bisa bertarung melawan petahana merupakan indikasi lemahnya institusi partai dalam menjaring dan menyiapkan calon pemimpin baru. Selain itu, adanya koalisi besar yang terdiri dari 9 partai pendukung petahana memperkuat anggapan publik bahwa ada kompromi elit dan kepentingan pragmatis yang menyingkirkan semangat kompetisi.

Hal ini dinilai sebagai bentuk penurunan kualitas demokrasi lokal karena menghilangkan prinsip dasar pemilu yaitu adanya pilihan dan kompetisi. Sementara itu, dalam dimensi perilaku (aksi politik), munculnya kelompok masyarakat yang membentuk tim kampanye kotak kosong menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap demokrasi. Mereka menggunakan hak pilih untuk mengampanyekan kolom kosong sebagai bentuk protes damai dan perlawanan terhadap situasi politik yang tidak sehat. Fakta bahwa kolom kosong menang di beberapa daerah lain pada Pilkada serentak 2020 menjadi bukti bahwa aksi nyata dari masyarakat bisa menjadi alat kontrol terhadap dominasi politik elit.

Dari seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya elektabilitas petahana, tetapi juga oleh melemahnya fungsi partai politik, dominasi koalisi nasional seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), serta absennya figur kompetitor akibat perhitungan politik dari rival sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa demokrasi lokal masih sangat rentan terhadap

hegemoni elit politik dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi rakyat yang substantif. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem politik lokal, penguatan partai politik dalam pengkaderan, serta peningkatan literasi politik masyarakat agar demokrasi ke depan lebih sehat dan kompetitif.

4.2 Saran

Berikut saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024:

4.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini mengandalkan teori partisipasi politik dari Herbert McClosky serta Verba & Nie, yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi: kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Teori ini terbukti relevan dalam menganalisis fenomena minimnya pilihan politik dalam pilkada calon tunggal dan respons masyarakat terhadapnya. Namun demikian, untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar teori partisipasi ini dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti teori hegemonik kekuasaan atau teori elite pluralism, untuk menggali lebih dalam bagaimana dominasi elit dan konsensus elit berperan dalam mereduksi ruang kompetisi politik. Pendekatan multidimensi ini akan memperkaya pemahaman tentang penyebab struktural dan kultural dari melemahnya demokrasi lokal.

4.2.2 Saran Praktis

Bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, perlu dilakukan peningkatan kualitas sosialisasi secara menyeluruh dan inklusif, khususnya menyoar kelompok pemilih rentan seperti lansia, pemula, dan masyarakat

desa yang akses terhadap informasi politik masih terbatas. Sosialisasi mengenai keberadaan dan makna kotak kosong harus diperjelas dan diperluas agar partisipasi politik dapat dilakukan secara sadar dan bermakna. Untuk partai politik, diperlukan revitalisasi peran sebagai lembaga pengkader pemimpin. Partai tidak hanya menjadi kendaraan pragmatis, tetapi harus menjalankan fungsi ideologis dan kaderisasi yang mumpuni agar muncul alternatif kepemimpinan di daerah. Selain itu, masyarakat sipil juga perlu diperkuat agar mampu menjadi pengawas, pengkritik, sekaligus penggerak dalam menjaga kualitas demokrasi lokal agar tidak semata dikendalikan oleh kompromi elit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gau Kadir, '*Dinamika Partai Politik Di Indonesia*', *Sosiohumaniora*, 16.2 (2014), p. 132, doi:10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Alaydrus, A., dkk, (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Halim Rahmawati, Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Sah Media), 2016
- Harrison Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Prenamedia Grup 2016
- Indrawan Jerry,. *Buku Sistem Pemilu di Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022.
- Permana Aditia, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia, 2022* Academia.edu Buku Komisi Pemilihan Umum Indonesia
- Sanit Arbi, "Buku Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan" Rajawali Pers, 2012.
- Thoha Miftha, 'Buku Birokrasi politik & pemilihan umum di Indonesia' Prenamedia Grup 2014

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anisah, A., dkk (2024). Dilema Demokrasi: Kotak Kosong Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Tingkat Lokal. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 587-593.
- Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Yurijaya: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 21-33.
- Arniti, Ni Ketut, 'Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020), p. 329, doi:10.38043/jids.v4i2.2496
- Dhesinta, W. S. (2016). Calon tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan konsep demokrasi. *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, 4, 87-104.

- Ekowati, Endah Yuli, 'Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada', *Jurnal Transformative*, 5.1 (2019), pp. 16–37 <<https://core.ac.uk/download/pdf/230239078.pdf>>
- Fahmi, Khairul, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *Jurnal Cita Hukum*, 4.2 (2016), pp. 167–86, doi:10.15408/jch.v4i2.4098
- Gustika, Roza, Widia Firta, Citra Suci Mantauv, Muhammad Fahrozi, and Dedek Kurnia Sandi, 'Journal of Social and Economics Research', *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2).1 (2021), pp. 123–38
- Ilham, Pruwaningsi, T. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar 2018. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2). 164-173. Hlm 165.
- Kadir, A. Gau, 'Dinamika Partai Politik Di Indonesia', *Sosiohumaniora*, 16.2 (2014), p. 132, doi:10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724
- Khair, M., Suud, S., & Risprawati, R. (2018). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(2).
- Kharisma, Dhiwara, 'Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda', *Ejournal Unsrat*, 1.7 (2014), p. 1144
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65-76.
- Lubis, Y. H. (2024). Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis. *Journal of Studia Legalia*, 5(01) Vol.1 .
- Mulyadi, Dedi, Cindy Claudia, Nayla Ratu, and Pusfa Januwati, 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024', 2024, doi:10.55551/jip.v5i2.185
- Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A. (2024). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 233-263. Vol.2
- Nugroho, S, *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan (Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (2) Uudnri 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat)*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2014 <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25034>>
- Panjaitan, Maringan, and Simson Berkat Hulu, 'Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1.2 (2021), pp. 116–30, doi:10.51622/jispol.v1i2.411

- Pardede, Marulak, 'Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.1 (2014), p. 85, doi:10.33331/rechtsvinding.v3i1.58. Vol.1
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1–15. Vol.2
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah, 'Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Jurnal Supremasi*, 9.2 (2019), pp. 17–27, doi:10.35457/supremasi.v9i2.793
- Tammu, Lusin, Zulkifli Aspan, and Naswar, 'Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia', *DOKTRINA : Journal of Law*, 6.2 (2023), pp. 118–39
- Tawakkal, George Towar Ikbal, *Tata Kelola Pemilu, 2022* <https://www.academia.edu/download/61649422/Buku_TKP20191231-13262-5cm9ud.pdf>
- Umum, Komisi Pemilihan, 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024', 2024
- Umum, Pemilihan, Penyusunan Daftar, Pemilih Dalam, Komisi Pemilihan, Umum Provinsi, and Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 'Jdih.Kpu.Go.Id/Jambi', 2024, pp. 1–5.
- Putro, M. R. F. (2018). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017 (Studi terhadap Pelaksanaan dan Tingkat Partisipasi Pemilih di daerah Jayapura dan Tebing Tinggi).
- Wijayanti, S. N. (2024). Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 78-93. Hlm. 84. Vol.2

Website / Internet

<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jambi/batanghari>

<https://jambi.tribunnews.com/2024/09/22/kpu-tetapkan-satu-calon-tunggal-pilbup-batanghari>

<https://www.kompasiana.com/shakilla/66ce5ed1c925c4321c37d692/pilkada-batang-hari-2024-fadhil-bahktiar-resmi-melawan-kotak-kosong>

<https://suarakalangan.com/2024/08/10/fadhil-arief-bupati-dengan-segudang-prestasi/>

<https://selayangnews.id/tiga-tahun-kepemimpinan-fadhil-bakhtiar-batanghari-terus-maju-dan-berkembang/>

<https://batangharikab.go.id/bat/statis-8-lambang.html>

<https://batangharikab.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-kabupaten-batang-hari.html>

<https://batangharikab.go.id/bat/statis-7-sejarahberdirinyakabupatenbatanghari.html>

<https://www.batangharinews.com/read/2025/01/09/7460/-kpu-tetapkan-fadhil--bakhtiar-pemenang-pilkada-batanghari-tahun-2024>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21278>

<https://www.kompasiana.com/shakilla/66ec490ded6415467c556b52/dpt-pilkada-batang-hari-2024-ditetapkan-218-007-pemilu>

<https://kab-batanghari.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-tentang-syarat-minimal-dan-persebaran-dukungan-bakal-pasangan-calon-perseorangan-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-batang-hari-tahun-2024>

[https://ppid.kuduskab.go.id/page/informasi_pilkada_tahun_2024#:~:text=Ini%20merupakan%20proses%20pemilihan%20kepala,PKPU\)%20Nomor%202%20Tahun%202024](https://ppid.kuduskab.go.id/page/informasi_pilkada_tahun_2024#:~:text=Ini%20merupakan%20proses%20pemilihan%20kepala,PKPU)%20Nomor%202%20Tahun%202024)

<https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak>

<https://www.kompasiana.com/shakilla/66ec490ded6415467c556b52/dpt-pilkada-batang-hari-2024-ditetapkan-218-007-pemilu>

<https://regional.kompas.com/read/2024/09/23/230439278/kpu-batanghari-izinkan-kampanye-kotak-kosong-di-pilkada-2024>

<https://www.tempo.co/politik/daftar-pilkada-2024-yang-diikuti-paslon-tunggal-dan-yang-dimenangkan-kotak-kosong-1180306>

<https://www.kompas.id/artikel/koalisi-indonesia-maju-dominasi-pilkada-positif-untuk-hubungan-pusat-dan-daerah>

<https://www.aksipost.com/arsip/83242/politisi-senior-ungkap-penyebab-kotak-kosong-di-batanghari-parpol-tidak-punya-nyali-melawan-petahana/>

<https://www.tempo.co/info-tempo/seluruh-parpol-dukung-fadhil-dan-bakhtiar-lanjutkan-kepemimpinan-di-batanghari-14612>

<https://jambi.tribunnews.com/2023/07/26/reaksi-fadhil-arief-bersaing-akseptabilitas-dengan-hafiz-fattah-untuk-pilkada-batanghari-2024>

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DAN DOKUMENTASI BERSAMA INFORMAN

1. Ketua KPU Kabupaten Batang Hari)

Nama : Ahmad Halim, S.Pd.I

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Batang Hari

Waktu : Kamis, 22 Mei 2025 (14.25 WIB)



Berdasarkan fokus penelitian mengenai fenomena calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari, serta penggunaan teori partisipasi politik dari Herbert McClosky dan Verba & Nie (1972), berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yang disusun berdasarkan empat dimensi partisipasi politik (kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku), yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Batanghari:

➤ **Dimensi Kognitif (Pengetahuan & pemahaman masyarakat)**

- 1) Bagaimana Bapak melihat tingkat pemahaman masyarakat Batanghari terhadap makna kotak kosong dalam Pilkada 2024?

Jawaban:

“Pertama memang terkait dengan pemilihan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari memang satu pasangan calon, jadi bukan kotak kosong melainkan kolom kosong namun familiar dimasyarakat

yakni kotak kosong terkait dengan pemahaman masyarakat memang ini menjadi hal baru di Provinsi Jambi karena Pilkada sebelumnya belum pernah terjadi hanya terjadi dipilkada tahun 2024.”

- 2) Apakah KPU Kabupaten Batanghari memberikan sosialisasi khusus terkait keberadaan kotak kosong kepada pemilih? Jika ya, seperti apa bentuknya?

Jawaban:

“Ya,kami KPU juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar datang ke tps pada tanggal 27 November 2024 mereka memilih secara langsung, rahasia, jujur dan adil sebagaaimana biasanya pilkada berjalan. Jadi masyarakat bertanya-tanya bagaimana sih system demokrasi jika satu pasangan calon jadi kami melalui sosialisai juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdapat satu pasangan calon tetap demokrasi berjalan seperti apa adanya jadi tahapannya berjalan normal, sosialisasi kemudian pendaftaran , kampanye samo seperti yang calon-calon yang lebih dari pasangan calon. Artinya tidak mengubah system demokrasi namun masyarakat tetap memilih secara langsung,umum, bebas, jujur dan adil.”

- 3) Menurut Bapak, seberapa jauh masyarakat mengetahui hak politik mereka dalam situasi calon tunggal ini?

Jawaban:

“Terkait dengan hak politik mereka masyarakat Batang Hari tetap memiliki hak untuk memilih kenapa ada kolom kosong ini yang diatur oleh UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota bahwa masyarakat tetap memilih namun secara tidak langsung disurat suara terdapat hanya satu kotak gambar kosong dan satu yang bergambar ini yang diistilahkan masyarakat kotak kosong jika masyarakat tidak setuju dengan pasangan calon maka dia memilih kotak kosong, jika dia setuju dengan calon tunggal dia memilih yang bergambar itu lah hak politik mereka jangan dianggap kotak kosong tidak memilik hak politik mereka tetap memiliki hak politik mereka sebagaimana biasanya untuk pemimpinnya 5 tahun kedepan”.

➤ **Dimensi Afektif (Kepedulian & keterikatan emosional terhadap politik)**

- 1) Bagaimana respons emosional atau reaksi awal masyarakat Batanghari ketika mengetahui hanya ada satu pasangan calon dalam Pilkada 2024?

Jawaban:

“Kalo respon masyarakat diawal terdapat hanya ada satu pasangan calon lebih baik tidak usah pemilihan jadi langsung saja, namun tidak untuk system demokrasi kita, itu respon awal masyarakat namun kami KPU juga gencar untuk mensosialisasikan bahwa jangan sampai masyarakat tidak hadir di TPS dengan mereka menganggap satu pasangan calon tunggal mereka menganggap pasti pasangan calon tunggal yang menang tapi tidak seperti itu ada beberapa kejadian pasangan calon kalah dengan gambar kosong itu respon awal masyarakat.”

- 2) Apakah terdapat indikasi apatisme atau kekecewaan dari masyarakat terhadap minimnya pilihan politik?

Jawaban:

“Terkait dengan Tindakan apatisme kami KPU sebagai penyelenggara utama bahwa kami membuka pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai politik secara tidak langsung yang mempunyai kewenangan otoritas untuk mengusulkan itu parpol jadi masyarakat kalo ke KPU hanya Lembaga saja secara syarat cukup dan terpenuhi silahkan nanti ke partai politik, nah terjadinya diBatang Hari itu seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD mengukung pasangan calon tunggal.”

- 3) Menurut pengamatan KPU, apakah masyarakat tampak tetap antusias mengikuti proses Pilkada meskipun hanya ada satu calon?

Jawaban:

“Pengamatan KPU ditunjuk dengan data statistic kalo dipikada tahun 2024 ini memang terjadi penurunan partisipasi politik dari pilkada sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi secara maksimal dan Allhamdulillah partisipasi kita diangka 70 %”

➤ **Dimensi Evaluatif (Penilaian terhadap sistem politik & pelaksanaannya)**

- 1) Bagaimana Bapak menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas demokrasi lokal dalam situasi Pilkada dengan calon tunggal ini?

Jawaban:

“Kalo bicara kualitas demokrasi memang masyarakat tidak ada pilihan pasangan calon ya namun terdapat satu pasangan calon mereka juga mempunyai hak untuk memilih pemimpin 5 tahun kemudian pilihannya hanya ada satu setuju dan tidak setuju apalagi di Batang Hari ini kan calon tunggal calon inkubasi artinya calon yang masih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati utuh tidak ada pergantian bupati dan wakil buapatinya”

- 2) Apakah ada kritik atau penilaian dari masyarakat terhadap partai politik atau penyelenggara pemilu terkait munculnya hanya satu pasangan calon?

Jawaban:

“Nah kalo di KPU Batang Hari ini menjadi tantangan sebenarnya karena memang kami KPU batang Hari menjadi daerah yang pertama mendapat calon tunggal di Provinsi Jambi beda dengan provinsi lain yang terjadi di tahun 2020,2018 ini menjadi tantangan bagi kami karena simpatisan kotak kosong ini muncul juga namun diaturan KPU tidak ada kami bisa memberi ruang bagi simpatisan-simpatisan kotak kosong ini, ini sempat menjadi konflik yang tidak terlalu besar namun menjadi catatan kami yang sudah kami usulkan kepada Lembaga diatas kami seperti KPU Provinsi dan KPU RI.”

- 3) Dari sisi KPU, apakah munculnya calon tunggal dianggap sebagai fenomena demokratis atau justru menjadi tantangan dalam menjaga legitimasi pemilu?

Jawaban:

“Ya karena kami KPU hanya menjalankan tugas sebagai penyelenggara dan senantiasa memberikan sosialisasi tentang pentingnya memilih dan mengarahkan kepada masyarakat bahwa kotak kosong demokrasi tetap berjalan utuh seperti mana biasanya jika tidak senang kan bisa memilih kolom kosong sebagai bentuk protes”.

➤ **Dimensi Perilaku (Tindakan nyata dalam partisipasi politik)**

- 1) Bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Batanghari pada Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya?

Jawaban:

“Ya jadi begini terkait dengan partisipasi ini KPU kan tidak bisa bekerja sendiri KPU juga meminta kepada jajaran edohkir kami seperti PPK,PPS dan KPPS untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih namun juga tidak bisa hanya KPU saja butuh chatholder kecamatan dan desa juga untuk mensosialisasikan kepada para pemilih mereka untuk datang ke TPS karena hanya satu pasangan calon ya tentu hanya ada satu tim pemenangan jadi kalo tingkat partisipasi dipilkada tahun 2024 kami itu 70,18% kalo dipilkada tahun 2020 KPU Batang Hari/Pilkada Batang Hari itu tertinggi diprovinsi diangka 84% jadi ada penurunan sekitar 13,sekian %.”

- 2) Apakah terdapat peningkatan atau penurunan jumlah suara kotak kosong, dan bagaimana Bapak memaknai hal tersebut?

Jawaban:

“Sepeti yang saya bilang tadi karena ini ada penurunan ini juga berdampak efek dari kotak kosong tadi/satu pasangan calon tadi Cuma satu tim pemenangan KPU sudah maksimal namun itulah hasilnya terjadi penurunan dari pilkada sebelumnya kami memaknai ini KPU Batang Hari akan melakukan mitigasi dan strategi kedepan jika terjadi lagi hal serupa seperti pasangan calon tunggal ini”

- 3) Apakah masyarakat aktif menyampaikan dukungan atau penolakan terhadap calon tunggal secara terbuka? Jika ya, dalam bentuk apa saja?

Jawaban:

“Kalo masyarakat, secara gejala masyarakat untuk penolakan calon tunggal ini tidak ada namun muncul simpatisan-simpatisan kotak kosong ini hal yang biasa bahwa masyarakat mempunyai hak pilih untuk memilih pemimpin 5 tahun kemudian kalo untuk penolakan tidak ada namun memang bermunculan simpatisan yang tidak setuju/ menjadi tim pemenangan kotak kosong”.

2. Pengurus DPC PPP Kabupaten Batang Hari / Pengurus PAC PPP Kecamatan

Pemayung

Nama : Sukran, M.Sos.
Jabatan : Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Batang Hari
Waktu : Senin, 19 Mei 2025 (20.30 WIB)



Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara untuk Ketua DPC PPP Kabupaten Batang Hari atau Pengurus PAC PPP Kecamatan Pemayung, yang dikembangkan berdasarkan teori partisipasi politik menurut McClosky dan Verba & Nie (1972) melalui empat dimensi utama: kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali sudut pandang internal partai politik terhadap fenomena calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Batanghari 2024.

➤ **Dimensi Kognitif (Pengetahuan & pemahaman politik – persepsi partai terhadap pemahaman masyarakat)**

- 1) Bagaimana pandangan Bapak terhadap tingkat pemahaman masyarakat Batanghari mengenai makna kotak kosong dalam Pilkada 2024?

Jawaban:

“Terkait kotak kosong ini makna dari kami sendiri kalo kita melihatnya dari segi prosesnya penjaringan pilkada di PPP atau penjaringan pilkada semua partai disitu kita lihat memang terjadi hal menarik awalnya banyak para-para calon itu melakukan pendaftaran disemua hampir semua partai akan tetapi didetik-detik akhir tidak ada yang sampai final malah dukungan-dukungan partai itulah yang datang kesang calon yaitu pak Muhammad Padhil Arif dan Bahtiar, dari situ kami melihatnya ya biasa saja kami memaknai itu karena mengapa karena satu sisi munculnya kotak kosong itu kan dilihat dari sikap partai yang mendukung satu calon tidak mendukung banyak calon artinya ada memang kecenderungan masyarakat yang dilihat oleh parpol bahwasanya tidak ada calon lain yang bisa membangun batang hari selain bapak padil dan bahtiar, sehingga beliau maju atas restu dan keinginan masyarakat Batang Hari, kedua beliau maju atas semua dorongan partai politik artinya apa secara partai pasangan satu calon ini sudah clear tidak ada masalah makanya partai mendukung beliau secara masyarakat yang terjadi dipergerakan politik baik ditingkat desa kecamatan maupaun kabupaten pasti sudah mendukung satu calon juga kan begitu nah akhirnya muncul lah satu calon berbeda dengan hal-hal yang terjadi dikabupaten lain, kabupaten lain ini terjadinya kotak kosong itu atas strategi lawan bagaimana maju pilkada melawan kotak kosong kan begitu semua partai diborong diajak untuk mendukung beliau kan begitu sehingga terjadilah kotak kosong tapi beda dengan batang hari ini muncul atas semua dorongan partai untuk mendukung beliau dan tidak ada tokoh-tokoh dibatang hari final maju pada waktu itu itu secara pandangan politik kalo secara demokrasi kemunculan kotak kosong ini salah satu Amanah UU apabila tidak ada calon/ hanya satu pasangan calon maka munculkan lah kotak kosong agar pilkada tetap terjadi kita tidak menganut system aklamasi harus ada lawan itulah kotak kosong dan pasangan calon kami melihat biasa-biasa saja ini murni kehendak Allah dan kehendak masyarakat kabupaten batang hari untuk mendukung hanya satu pasangan calon maupun partai maupun masyarakat”.

- 2) Apakah partai memiliki peran dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat terkait keberadaan kotak kosong?

Jawaban:

“Insyallah itu sudah jelas kita pasti memberi pemahaman kepada masyarakat terkait fenomena kotak kosong kan begitu pasti kita kasih penjelasan bahwa hadirnya kotak kosong ini ya seperti ini karena proses demokrasi yang terjadi dikabupaten batang hari apakah ini mengancam pasangan calon untuk kalah begitupun tidak ini artinya perlu kita

memberikan bahwa sahnya fenomena kotak kosong ini hanya semua keamanan politik agar proses demokrasi ini tetap berjalan sehingga tidak membahayakan dari kemenangan bapak padil dan bahtiar terbukti, yang dikhawatirkan kenapa kita harus terlalu memberi pemahaman kuat terhadap kotak kosong inikan karena ada barisan-barisan yang lawan politik tidak mendukung beliau in ikan tidak mengancam dalam politik itu apabila tidak mengancam itu stabil karena bis akita lihat dari tim kotak kosong yang kedua pendukung kotak kosong yang ke tiga pos kotak kosong nah ini semuanya hamper tidak ada jadi tidak terlalu mengerikan bagi kita sebagai pendukung maupun pengusung pasangan calon bapak padil.”

- 3) Apa yang menjadi pertimbangan utama PPP dalam mendukung pasangan calon tunggal tersebut?

Jawaban:

“Kita melihat ya apa yang menjadi pertimbangan pertama dipilkada 2021-2020 kita mendukung beliau dan yang kedua ditahun 2024 ini harapan yang menarik pertama beliau adalah kader PPP dan juga dimandatkan menjadi ketua DPW PPP Provinsi Jambi sampai dengan 2025 ini maka itulah menjadi keputusan partai untuk mendukung beliau, selain itu kita meilhat 3 tahun proses kepemimpinan beliau tingkat keberhasilan beliau sangat banyak pertama menyelesaikan hutang yang tinggal pada waktu itu hamper dengan 3 milyar selesai dan kedua beliau adalah pemimpin yang visioner denganjargonya yaitu batang hari Tangguh tingkat keberhasilan beliau itu sangat luar biasa sudah mampu mengubah wajah-wajah muaro bulian dan kabupaten batang hari kan begitu mainset-mainset berfikir pada waktu itu secara umum sudah mampu diubah contoh politik kesehatan waktu itu kita mungkin berlomba-lomba bikin rumah sakit tapi pada hakikatnya yang harus kita bangun itu adalah daya untuk sehat kegiatan mulai dari olahraga bola kaki yang beliau bangun terus run night, senam tingkat desa dan program motivatorya yang digunakan untuk mendorong percepatan pembangunan tingkat desa dan pembangunan-pembangunan lain artinya apa politik pembangun beliau itu sangat bagus ini lah menjadi tolak ukur untuk mendukung beliau dan yang ke tiga tentu tidak lepas dari respon masyarakat yang sangat positif atas kehadiran beliau dipanggung politik yang tidak bertolak belakang dengan keinginan partai sehingga tidak ada salahnya lagi kita mengusung beliau

➤ **Dimensi Afektif (Sikap emosional & keterikatan – respons masyarakat dan kader terhadap politik lokal)**

- 1) Bagaimana reaksi kader dan simpatisan PPP terhadap situasi calon tunggal dan potensi munculnya kotak kosong?

Jawaban:

“Reaksinya ya tidak terlalu bahkan biasa saja Namanya politik harus dihadapi kadang kita tenang itu yang sangat bahaya Namanya politik ini kita harus sambut dengan baik melawan kotak kosong ini kita tidak lagi mengkampanyekan menang pada waktu itu tapi kita pengen menang banyak bagaimana seluruh masyarakat kabupaten batang hari yang berada di batang hari memiliki hak pilih itu untuk memilih inilah yang diajak kepada reaksi ini lah yang membuat para-para kader yaitu bekerja kalau menang insyallah kita sudah tidak mendahului kuasa tuhan itu pasti menang tetapi kita menang mengejar suara-suara yang sangat banyak.”

- 2) Menurut Bapak, apakah masyarakat tetap menunjukkan minat dan semangat dalam mengikuti Pilkada meskipun hanya ada satu calon?

Jawaban:

“Masih kita melihat masyarakat pada waktu itu sangat berantusias pertesisasinya mungkin bisa dicek berapa persen yang milih kemudian apakah masyarakat itu biasa-biasa saja pada kondisi seperti itu memang kita melihat bahwa sahnya ya memang ada yang tidak memilih itu ada yang memilih juga ada nah proses-proses inilah yang kita lihat ada memang diranah-ranah masyarakat itu yang tidak menggunakan hak suaranya pasti ada bisa jadi karena kehalangan beliau sehingga tidak memilih tetapi bagi masyarakat yang memiliki mainsetnya berfikir bahwa wajib kita menggunakan hak suara kita ini dia pasti datang keTPS”.

- 3) Bagaimana Bapak melihat hubungan emosional masyarakat dengan partai-partai pengusung calon tunggal tersebut?

Jawaban:

“Jadi kita lihat setiap partai kan memiliki kader kadernya itu yang disebut dengan tingkat kecamatan pengurus PAC kalo ditingkat desa itu

Namanya anak ranting partai itu pasti sudah memiliki minimal itu satu orang setiap partai lalu bagaimanakah melihat hubungan emosionalnya ya baik gitu karena biasanya partai mendukung pasangan calon atas hasil survei dibawah atas masukan-masukan para kader terhadap pengurus tingkat kabupaten sehingga muncul lah rekomendasi dari pusat untuk mendukung pasangan calon, tingkat kedekatannya dengan masyarakat kalo pasangan calon kita itu pak padil dia dekat semuanya dengan semua kalangan apalagi semua kalangan-kalangan kader partai terbukti pada waktu itu Ketika sudah mengantar beliau mendaftar keKPU dengan beberapa waktu setelah pendaftaran partai itu mengadakan roadshow calon bupati itu kesetiap partai jadi partai yang mengadakan semua partai yang mengadakan dengan moment kegiatan yang berbeda-beda jadi kemudian pak padil dan bahtiar hadir disetiap partai memberikan sambutan dan arahan yang membangun kedekatan-kedekatan politik antara masyarakat dengan beliau atau kedekatan-kedekatan emosional dengan beliau itulah yang menjadi tolak ukur utama dan pada waktu semua kader-kader partai ditingkat desa maupun tingkat kecamatan hadir disetiap acara partainya masing-masing.

➤ **Dimensi Evaluatif (Penilaian terhadap sistem politik, calon, dan proses pemilu)**

- 1) Bagaimana pandangan PPP terhadap fenomena politik yang menyebabkan hanya muncul satu pasangan calon di Pilkada Batanghari 2024?

Jawaban:

“Kalau kita melihatnya masyarakat pada hari ini itu sudah sangat cerdas sebelum maju kan ditreking dulu trekrecordnya dan yang kedua juga disurvei nah survei itu kan menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat tinggi untuk mendukung beliau in ikan jadi kalo kita melihatnya dibawah itu masyarakat ini sangat kuat untuk mendukung beliau artinya kemunculan dari hati Nurani masyarakat kepada beliau itu sangat luar biasa dukungan yang muncul itu mulai dari gresgrp dari bawah Ketika terjadi maju dipasangan tunggal melawan kotak kosong itu hal yang biasa banyak terjadi dikabupaten lain tapi tinggal lagi fenomenanya saja ada yang seluruh partai mendukung satu pasangan ada yang pasangan itu yang menggerakkan supaya partai itu mendukung dia dan ada juga kotak kosong yang menang kami melihatnya munculnya beliau ini dari respon masyarakat kemudia respon partai sehingga terjadilah beliau melawan kotak kosong bukan terjadi atas masyarakat dipaksa untuk memilih beliau tidak dan bukan juga terjadi karena paksaan semua partai mendukung beliau tidak tapi ini terjadi piur murni keaslian yang muncul dari bawah untuk mendukung beliau sehingga lawan-lawan yang ingin maju pada waktu itu masih berfikir percuma kita maju akan

menghabiskan energi lebih baik kita tunggu 5 tahun kedepan untuk melangkah lagi.”

- 2) Apakah menurut Bapak kondisi ini mencerminkan konsolidasi kekuatan politik atau justru menunjukkan lemahnya demokrasi lokal?

Jawaban:

“Tidak itu tidak kedua-duanya karena Kembali lagi tidak ada yang mengkonsolidasi partai politik itu yang kedua lemahnya kepemimpinan local kita melihat lemahnya dikabupaten batang hari tu banyak tokoh kita sebut saja ada hafiz Fattah, Firdaus yunita asmara, terus hasbi ansori banyak tokoh-tkoh disana apakah kita kehilangan kepemimpinan daerah tidak mereka ini adalah kepemimpinan daerah yang sudah siap memiliki kepemimpinan yang sangat bagus nah memang ini terjadinya atas takdinya Allah SWT partai tidak melakukan konsolidasi kekuatan kemudian juga kepemimpinan/ pemimpin batang hari itu sangat banyak tapi ini murni kehendak Allah dan masyarakat yang telah direstui oleh Allah SWT.

- 3) Bagaimana PPP menyikapi potensi kritik publik terhadap banyaknya partai yang bergabung dalam satu koalisi besar?

Jawaban:

“Masyarakat tidak banyak kritik akan adanya kotak kosong ini karena mereka juga bisa menilai bagaimana kepemimpinan beliau dibatang hari menjadi ikonik yang indah sehingga sering mendapatkan penghargaan dari berbagai Lembaga, dan juga koalisi besar ini bukan paksaan dari kami para partai PPP melainkan mereka yang ingin bergabung mendukung beliau dan mungkin jika ada kritik dari masyarakat tidak secara besar akan tetapi mereka menjadi pemilih kotak kosong itu kan hal yang wajar didalam berdemokrasi mungkin ada pihak-pihak kotak kosong yang berkampanye tapi buktinya masyarakat insyallah tetap percaya kepada bapak padil sebagai bupati kabupaten batang hari”.

➤ **Dimensi Perilaku (Partisipasi nyata dalam tindakan politik – aktivitas kader dan masyarakat)**

- 1) Apa strategi PPP untuk mendorong partisipasi pemilih dalam kondisi minim kompetisi seperti ini?

Jawaban:

“Strategi yang sangat terus para kader-kader PPP itu adalah turun kelapangan jadi kita turun kelapangan mengajak para keluarga-keluarga kita terutama yang kedua tetangga-tetangga kita yang ketiga orang lain yang ke empat baru warga didesa tersebut kita turun ajak mereka untuk melek politik untuk menggunakan hak suaranya dan yang kedua kita turun mengajak mereka untuk datang ke TPS itu juga tugas kita selain KPU juga tugas kita Bersama untuk mengajak menggunakan hak-hak suaranya nah ini yang harus kita lakukan terus menerus karena beliau inkanben pasti kita banyak mengkampanyekan pencapaian-pencapaian beliau yang sudah ada dengan 36 program yang sudah dikerjakan dan Allhamdulillah merspon semua

- 2) Apakah kader PPP aktif melakukan kampanye, sosialisasi, atau penggalangan dukungan di tengah kondisi calon tunggal dan isu kotak kosong?

Jawaban:

“Semua kader tentu kita berupaya melakukan sosialisasi baik lewat darat udara laut kita lakukan sosialisasi pertemuan tatap muka kita laksanakan dan sampaikan yang kedua dimedia social kita tetap kampanyekan juga yang ketiga diberita berita tetap kita kampanyekan juga karena tugas kader PPP yaitu jika ada yang maju semangat gotong-royong untuk memenangkan calon yang kita usung itu harus ada ditunjukkan dengan kita melaksanakan kegiatan yang positif untuk mendulang suara-suara yang ada baik yasinan tahlilan kemudian diacara-acara lainnya kita hadir ikut memberikan arahan kepada masyarakat untuk hadir diTPS.

- 3) Bagaimana PPP menyikapi kemungkinan masyarakat memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan atau protes?

Jawaban:

“Pertama kami melihat sebagai kader PPP kami memandang bahwa sahnya masyarakat-masyarakat yang ada dikabupaten batang hari itu baik semuanya sangat baik semua nya tidak ada pikiran negative terhadap masyarakat itu tidak ada tidak terlalu mengancam bagi kita karena karakter masyarakat batang hari itu sangat baik prilaku nya juga baik kemudian tingkat pendidikan segala macamnya juga baik pasti dia memandang memilih kotak kosong untuk apa? Memilih yang gaib tidak akan menang dan tidak akan bisa memimpin kita ya semua proses supaya pemilu itu terjadi Ketika pun jika ada yang memilih kotak kosong itu hanya kekhilafan saja atau bisa jadi salah coblos.”

3. Akademisi Politik Provinsi Jambi

Nama : Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Akademisi / Dosen Ilmu Politik UNJA
Waktu : Senin, 26 Mei 2025 (13.40 WIB)



Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk informan akademisi politik Provinsi Jambi, yang dirancang berdasarkan teori partisipasi politik Herbert McClosky dan Verba & Nie (1972). Setiap dimensi untuk menggali pandangan konseptual dan analitis mengenai fenomena calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024.

➤ **Dimensi Kognitif (Pemahaman masyarakat terhadap politik, kotak kosong, dan hak pilih)**

- 1) Bagaimana Anda melihat tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Batang Hari terkait keberadaan kotak kosong dalam Pilkada 2024?

Jawaban:

“Masyarakat sebetulnya kan sudah sejauh itu melalui proses politik, proses politik yang dimaksudnya proses administrasi

dipenyelenggara diKPU kan outputnya seperti itu maka ya masyarakat batang hari tidak bisa mengelak dari itu itu faktanya bahwa setelah proses pendaftaran pasangan calon samapi jadwal yang ditentukan ditutup itu hanya satu pasangan calon yang mendafatarkan diri itu ya bagi masyarakat ya aneh juga kok tidak ada saingan tidak ada kompotitor dari pak padil sebagai inkanben dalam pilkada batang hari 2024 yang lalu jadi sebenarnya dalam konsep demokrasi yang dimaksud dengan hakikat dari demokrasi itu yaitu kompetisi jadi tentu secara tidak langsung karena pasangan calonnya satu melawan kotak kosong paling tidak kualitas demokrasi kita sedikit menurun karena hakikat demokrasi kompetisi jadi masyarakat ya menerima saja”.

- 2) Sejauh mana masyarakat memahami implikasi politik dari memilih kotak kosong dalam konteks calon tunggal?

Jawaban:

“Pengaruhnya kepada masyarakat ya masyarakat tidak ada pilihan lain kalupun pilihan lain itu pun kotak kosong, kotak kosong berarti kan nanti proses demokrasi kita lebih Panjang lagi jadi masyarakat tu sebetulnya dengan melihat mengerucut dengan satu pasangan calon itu dianggap mungkin dalam pandangan mereka yaitu pak padil layak dilanjutkan misalnya gitu bisa saja mereka dari pada kotak kosong ya dilanjutkan saja kepemimpinan beliau misalnya.”

- 3) Menurut Anda, apakah pendidikan politik dari lembaga formal maupun informal cukup berperan dalam meningkatkan kesadaran pemilih terhadap hak politik mereka dalam situasi seperti ini?

Jawaban:

“Ya, artinya Pendidikan politik itu suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh semua komponen bukan hanya partai politik saja sebagai salah satu pilar demokrasi tapi semua komponen masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah penyelenggara pemilu, akademisi juga harus melakukan Pendidikan politik supaya hak-hak politik itu bisa digunakan dengan baik pelaksanaan dari pemilu pemilihan itu bisa berlangsung dengan good and veer pemilihan yang demokratis itu good and veer sehingga demokrasi kita nanti outputnya jadi berkualitas artinya masyarakat dihadapkan dengan pilihan-pilihan demokrasi dengan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan bisa memilih, Mungkin kalo masyarakat ikut saja kemudian orang yang menggunakan hak pilih juga mungkin ya udah tidak ada saingan ya pilih aja calon

yang ada orangnya bisa saja karena masyarakat tu mudah bersepsi bahwa tidak ada saingan berarti ini yang terkuat dan terbaik padahal itu hanya proses politik saja”.

- 4) Bagaimana Anda menilai upaya penyelenggara pemilu dan partai politik dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat pada Pilkada ini?

Jawaban:

“Ya kalo dari sisi penyelenggara melalui sosialisasi peraturan KPU tentu sudah melakukan hal-hal yang harus dilakukan misalnya sosialisasi UU pilkada 10 2016 misalnya kemudian UU 7 2017 tentang pemilu kemudian peraturan KPU tentang terkait dengan pencalonan kepala daerah itukan sebelum dilaksanakan sudah diadakan sosialisasi apalagi partai politik itu semua diundang dalam bentuk sosialisasi dan juga bisa jadi dalam bentuk BIMTEK bagaimana pendaftaran calon kepala daerah kan disitu sudah dijelaskan misalnya syarat-syarat nya apa saja untuk mengusulkan seorang calon kepala daerah apa saja syarat minimal berapa kursi suara sah itu sudah dijelas kan tapikan yang pinaltinya menentukan parpol itu sendiri ternyata parpol dibatang hari mengusul hanya satu pasangan calon”.

- 5) Apakah keterbatasan informasi politik dapat menjadi penyebab munculnya apatisme dalam pemilu dengan calon tunggal?

Jawaban:

“Ya bisa saja misalnya Ketika tidak disosialisasikan dengan baik bahwa kok calon tunggal bisa saja orang apatis dak penting ini karena istilahnya tidak ada pilihan gitu jadi orang menganggap tidak terlalu urgent untuk menggunakan hak pilih yang menang mungkin yang bukan kotak kosong juga calon yang muncul misalnya itu pasti berpengaruh, dan kemudian partisipasinya cenderung menurun karena bagi mereka tidak ada kompetisi kerna demokrasi itu sejatinya kompetisi menang itu ada saingan mengapa kita menang karena kita lebih dari pesaing mendapatkan suara dengan kotak kosong ini bukan saingan karena masyarakat tidak bisa membedakan trekrecord antara A dan B masa membandingkan dengan kotak kosong.”

➤ **Dimensi Afektif (Keterikatan emosional masyarakat terhadap politik, Pilkada, dan pilihan mereka)**

1) Bagaimana persepsi emosional masyarakat Batang Hari terhadap munculnya hanya satu calon dalam Pilkada 2024?

Jawaban:

“Ya kalo emosional masyarakat tergantung dia berada dimana kalo dia dari pengusung ya biasa saja tapi kalo dia bukan partai pengusul masyarakat umum yang melihat ada calon-calon yang lebih pantas yang punya kualitas yang cukup juga dilaur dari yang maju itu ya kecewa juga pasti secara emosional mereka kecewa karena mungkin menurut mereka ada orang yang pantas dimunculkan kok tidak muncul tidak mungkin batang hari hanya padil dan bahtiar saja yang layak dan pantas menjadi kepala daerah pasti ada tenaga potensi yang lain putra-putra potensi bagi batang hari tapi kan secara proses politik tidak muncul ya itukan banyak factor tadi factor partai politik juga dan yang lain juga”.

2) Apakah menurut Anda fenomena calon tunggal berpengaruh terhadap semangat atau gairah masyarakat untuk ikut memilih?

Jawaban:

“Ya, pasti pengaruh karena tidak ada pilihan bagi mereka kan tidak semua orang mungkin semua senang dengan padil pasti ada orang yang tidak senang jadi ya yang tidak senang dengan mereka maka berimplikasi terhadap aktivitas mereka dalam penggunaan hak pilih begitu”.

3) Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal dalam kondisi Pilkada tanpa kompetisi?

Jawaban:

“Ya kalo persepsi masyarakat digambarkan secara ekprsi masyarakat beranggapan bahwa calon tunggal itu tidak baik karena proses pilkada membutuhkan dana yang besar masak tidak ada kompetisi jadi kalo masyarakat Sebagian masyarakat menganggap ini janggan dibiasakan”.

- 4) Sejauh mana keterlibatan emosional masyarakat terhadap partai politik dan calon dalam Pilkada ini mencerminkan loyalitas atau kekecewaan?

Jawaban:

“Masyarakat tidak bisa berbuat banyak terkait pilihan partai politik karena prosesnya itu ada diinternal partai politik apalagi bukan hanya ditentukan oleh DPC /DPD 2 batang hari tapi ditentukan oleh DPP pusat sehingga kekuatan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan diinternal parpol relative terbatas sehingga apa yang terjadi adalah murni pilihan partai politik paling ya alasannya popularitas dan elektabilitas tapi itu bukan murni representasi dari masyarakat batang hari”.

- 5) Apakah ketidakpuasan terhadap calon tunggal dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi politik yang emosional melalui kotak kosong?

Jawaban:

“Bisa saja misalnya ada Sebagian yang milih kotak kosong itu bentuk kekecewaan dia terhadap proses demokrasi kita yang tidak memunculkan kompetisi jadi demokrasi itu bukan berarti suara terbanyak bukan berate tidak ada kompetisi justru demokrasi itu harus ada kompetisi dari kompetisi itu muncul orang yang suaranya lebih banyak maka secara demokrasi dia akan menjadi pemenang tapi kalo misalnya tidak ada kompetisi seperti itu ya masyarakat marah misalnya emosionalnya muncul dia ada yang Sebagian milih kotak kosong itu sebagai bentuk dari protes mereka karena memilih kotak kosong tujuannya tidak jelas yang penting ikut menggunakan hak suara”.

➤ **Dimensi Evaluatif (Penilaian terhadap sistem, institusi politik, dan demokrasi lokal)**

- 1) Menurut Anda, apa makna dari fenomena calon tunggal dalam perspektif kualitas demokrasi lokal di Batang Hari?

Jawaban:

“Ya fenomena yang terjadi satu parpol tidak berhasil melakukan pengkaderan mestinya kan parpol semua punya calon pemimpin diinternal parpol misalnya walaupun tidak harus dari dalam tapi kan dia tugas salah satunya adalah pengkaderan mestinya mereka punya kader

itu dari segi parpol, kemudian dari segi bakal calon mungkin Sebagian masyarakat menganggap bahwa berpolitik itu membutuhkan dana yang besar sehingga orang yang punya kemampuan bisa saja enggan untuk muncul karena politikalcoas itu kan mahal karena dia bergerak butuh uang untuk melakukan sesuatu pertemuan segala macam butuh uang mungkin karena keterbatasan ekonomi jadi mereka-mereka yang potensi itu enggan untuk masuk. Kemudian dari segi SDM batang hari bukan tidak punya SDM yang mumpuni untuk calon bupati tapi itu tadi mungkin pertimbangan politikalcoas biaya politik tidak sedikit sehingga dia enggan untuk menunjukkan keinginannya untuk maju sebagai pasangan calon”.

2) Bagaimana Anda mengevaluasi peran partai politik dalam menghasilkan kontestasi politik yang sehat di tingkat daerah?

Jawaban:

“Ya yang pertama pengkaderan harus jalan secara simultan kemudian kedua proses rekrutmen calon pemimpin dipartai ya harus secara fair lah gitu artinya mempertimbangkan kapasitas orangnya bukan kapasitas yang lain kemudian parpol juga harus melakukan Pendidikan politik dengan masyarakat supaya mereka tau menggunakan haknya kemudian bagaimana demokrasi itu berjalan kalo ada banyak calon dan tidak ada calon bagaimana mereka harus ikut mensosialisasikan juga karena parpol kan pada prinsipnya ada dana untuk Pendidikan politik masyarakat yang disiapkan oleh pemda masing-masing melalui cashbankpol itu bisa digunakan Pendidikan politik bagi masyarakat kemudian parpol juga harus membuka kran selebar-lebarnya bagi siapa pun yang akan maju untuk menjadi pemimpin di level local misalnya parpol harus membuka diri secara adil dan transparan kepada semua pihak yang mungkin punya kapasitas untuk itu jadi menurut saja parpol menjadi penentu sekali mau terjadi kotak kosong itu diparpol”.

3) Apakah kemunculan calon tunggal lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan atau kegagalan sistem seleksi politik?

Jawaban:

“Dari sisi pasangan calon yang maju dia menganggap dia berhasil melakukan konsolidasi dengan para pengurus partai dia merasa berhasil tapi bagi parpol itu kan indikasi ketidak berhasilan parpol untuk menjaring calon-calon potensi yang ada diluar partai diluar dari inkuben misalnya begitu. Dan juga tentu ada kepentingan lain semuanya sudah di bicarakan ditingkat internal para parpol, mungkin

ada deal depan sehingga seluruh parpol parlemen di batang hari memilih bersama mengajukan paslon ini.”

- 4) Bagaimana Anda menilai legitimasi hasil Pilkada jika persentase pemilih untuk kotak kosong cukup signifikan?

Jawaban:

“Kalo yang terjadi misalnya kotak kosong sampai ya lumayan banyak lah yang memilih kotak kosong artinya legitimasi masyarakat rendah sebenarnya terhadap calon terpilih walaupun dia tidak punya saingan. Ketika misalnya dia tidak bisa melewati 50% itu indikasi bahwa calon itu tidak populer di tengah masyarakat mungkin hanya proses politik saja yang membuat dia maju sebagai calon tunggal tidak hanya itu kalo menurut saya pokoknya asal ada yang lebih 10% memilih kotak kosong apalagi sampai 20% berarti masyarakat kecewa dengan proses politik di batang hari karena hampir 30% tidak datang ke TPS, ini indikasi dari sisi negatifnya sistem proses demokrasi di batang hari”.

- 5) Apakah partisipasi dalam bentuk memilih kotak kosong bisa dianggap sebagai bentuk kritik politik terhadap elite lokal?

Jawaban:

“Ya bisa jadi kalo misalnya ada saja yang milih kotak kosong sudah termasuk salah satu kritik gitu secara tidak langsung kepada elit-elit lokal gitu pertama mengapa memunculkan satu pasangan calon yang kedua mengapa tidak ada kompotitor sementara potensi SDM batang hari bukannya tidak cukup mungkin lebih banyak yang layak gitu”.

➤ **Dimensi Perilaku (Partisipasi nyata masyarakat dalam tindakan politik: memilih, protes, kampanye)**

- 1) Bagaimana Anda melihat tren perilaku pemilih di Batang Hari saat menghadapi pilihan antara calon tunggal dan kotak kosong?

Jawaban:

“Kalo tren ya masih ke calon tunggal lah karena proses munculnya calon tunggal itu banyak pihak juga yang menghendaki hal itu pertama para parpol kemudian pengusul parpol tentu mereka senang saja tap

ikan bagi masyarakat yaitu tidak begitu bagus masyarakat juga Sebagian senang karena ya mungkin yang punya aplikasi dengan calon inkamben itu ya senang dengan adanya satu pasangan calon saja jadi lebih mulus proses politik mereka bagi yang sebaliknya ya kecewa juga karena mereka mestinya dihadapkan dengan calon-calon lain sebagai kompotitor”

2) Apakah fenomena ini mengubah pola partisipasi masyarakat dibandingkan Pilkada sebelumnya?

Jawaban:

“Ya pasti pengaruh karena tidak ada satu daerah itu pilihanya satu saja pasti pilihannya, mereka berfikir kok demokrasi kita begini kok bisa terjadi begini”.

3) Bagaimana Anda melihat bentuk-bentuk lain dari partisipasi politik masyarakat selain datang ke TPS, dalam konteks Pilkada ini?

Jawaban:

“Golput itu jangan kira tidak berpartisipasi karena dalam hak pilih ya memang tidak tapi berpartisipasi dalam politik ya karena mereka datang tidak punya pilihan jadi lebih tidak datang artinya partisipasi politik mereka sudah jalan”.

4) Menurut Anda, apakah memilih kotak kosong bisa menjadi instrumen yang efektif untuk menyampaikan sikap politik masyarakat?

Jawaban:

“Bisa mestinya kalo misalnya masyarakat Sebagian besar sebetulnya tidak menghendaki pasangan calon itu ya bisa dipilih kotak kosong menang kotak kosong diadakan pemilihan berikutnya maka sang calon itu dalam yang saya baca tidak bisa mencalonkan diri, tapi berefek terhadap biaya pilkada itu biayanya besar sekali jadi kalo diulang kosenkuensi terhadap anggaran luar biasa ya gitu jadi masyarakat sebra sulit yang ideal nanti diulang pakai banyak dana kemudian kalo diteruskan yang ini calon pemimpin sudah jelas itu”.

5) Apa dampak perilaku partisipatif seperti golput atau memilih kotak kosong terhadap dinamika politik lokal pasca Pilkada?

Jawaban:

“Ya dampaknya mereka akan mengajak orang lain juga untuk tidak menggunakan hak pilih percuma gitu paling tidak mereka menggunakan hak politiknya electoral hak elektoralnya kita golput saja tidak ada pilihan misalnya kemudian juga mereka akan nanti memantau kinerja dari calon tunggal itu kalo tidak bagus mereka akan bersuara pasti itu karena mereka dari awal sudah merasa kecewa kemudian kinerja pemerintahan yang kurang bagus maka mereka-mereka cenderung untuk bersuara untuk membuktikan bahwa satu pilihan itu bukan lah yang terbaik belum tentu yang terbaik.”

4. Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Batang Hari

Nama : Muttaqin, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Pemuda Peduli Demokrasi / Ketua HIMBARI

Waktu : Rabu, 21 Mei 2025 (15.35 WIB)



Pertanyaan ini bertujuan menggali pemikiran, perasaan, dan perilaku pemuda terhadap fenomena calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Batang Hari tahun 2024.

➤ **Dimensi Kognitif (Pengetahuan dan pemahaman terhadap isu politik dan hak pilih)**

1) Apa yang Anda ketahui tentang fenomena calon tunggal dalam Pilkada Batang Hari tahun 2024?

Jawaban:

“Berkenaan pilkada batang hari tahun 2024 itu dari bapak padil dan bahtiar adalah salah satu-satunya calon bupati batang hari yang mana ini menjadi moment sejarah bagi kabupaten batang hari provinsi jambi yang mana ini manjadikan strategis politik dari pak padil bahwa ada kepuasan dari maasyarakatnya yaitu bentuk dari aspirasi politik kabupaten batang hari maka untuk petahana bg padil melanjutkan mencalonkan diri untuk maju pilkada tahun 2024 periode yang kedua”.

2) Apakah Anda memahami maksud dan fungsi dari kotak kosong dalam surat suara?

Jawaban:

“Kotak kosong dalam surat suara itu bentuk demokrasi dalam pemilihan umum Ketika kita ada surat suara yang kosong no 1 dan no 2 nomor satu bentuk calon dan no 2 kosong itu sudah dipilih oleh KPU jadi untuk surat suara yang kosong itu terletak kalo di bg padil no urut 2 dan no 1 kosong karno sudah aturan KPU cabut nomor kebetulan bg padil no 2 jadi no satu kosong kenapa itu disediakan oleh KPU karno menurut saya itu mengajarkan demokrasi tidak dipilih dari satu orang saja tapi kita boleh berhak untuk memilih atau kita tidak memilih calon tersebut maka kita punya pilihan jadi setiap warga batang hari itu disampaikan kita harus wajib untuk memilih tapi kalo milih calon itu hak masing-masing maka disediakan adalah surat suara kosong”.

3) Dari mana Anda biasanya mendapatkan informasi terkait Pilkada dan calon yang bertarung?

Jawaban:

“Pertama dapat informasi dari KPU komunikasi lewat media social dan sosialisasi dari KPU dan selain itu juga kita ada diskusi public dengan masyarakat yang dibuat oleh KPU”

4) Menurut Anda, apakah informasi yang disediakan oleh penyelenggara pemilu atau media sudah cukup jelas dan mudah dipahami?

Jawaban:

“Ya menurut saya sudah cukup jelas dari media social dan penyelenggara pemilu yang disampaikan dari KPU RI kemudian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten nanti disampaikan oleh kecamatan itu PPK dan didesa PPS itu sudah disampaikan secara berjenjang maka kegiatan demokrasi pilkada kabupaten yang ada diprovinsi jambi itu sudah baik untuk hal-hal yang disampaikan itu sudah baik tapi perlu diperkuat lagi”

5) Bagaimana Anda menilai pentingnya memiliki lebih dari satu calon dalam kontestasi Pilkada?

Jawaban:

“Menurut pandangan saya baik itu satu calon atau lebih itu semuanya baik tergantung bagaimana musyawarah dan kesepakatan oleh rakyat karna demokrasi pemilihan umum itu ditangan rakyat dan kembalinya kepada keputusan rakyat tetapi kalo dari pandangan sudut yang lain lebih dari satu pasangan calon itu menunjukkan SDMnya dikabupaten batang hari banyak yang mau memperbaiki batang hari bukan hanya satu pasangan calon berarti ada calon yang lain yang mau meningkatkan dan membuat bagaimana batang hari lebih maju kedepannya tetapi Kembali kepada rakyat itu juga”.

➤ **Dimensi Afektif (Perasaan, keterikatan emosional terhadap politik dan demokrasi)**

- 1) Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui hanya ada satu pasangan calon dalam Pilkada Batang Hari?

Jawaban:

“Untuk perasaan ya berarti batang hari tidak ada orang selain bg padil yang mau untuk membangun dan yang mau untuk berkompetisi dalam politik jadi perasaan saya y aitu apa adanya yang ada diwarga batang hari karna kita masih pemuda masih juga berkiprah bagaimna meningkatkan daya saing daerah kepemimpinan leadership daerah maka ya kita harus jalani sekrang mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya tidak lagi terjadi dan ada memang calon-calon kalo bisa banyak yang mendaftarkan diri sebagai kepala daerah”.

- 2) Apakah Anda merasa bersemangat atau justru kecewa terhadap situasi Pilkada yang hanya menghadirkan satu calon?

Jawaban:

“Terkait semangat atau kecewa itu tidak ada hambatan dan tidak ada halangan tetapi disini kita mengintropeksi diri dan mengevaluasi jadi Ketika kita satu calon kepala daerah dan ada sebelumnya beberapa calon dan bagaimana yang sudah dirasakan oleh masyarakat untuk semangat kita tetap semangat untuk kecewa kita tidak ada kecewa tetapi kita harus berusaha bagaimana kabupaten batang hari itu lebih maju dan dirasakan oleh warga kabupaten batang hari manfaatnya.”

3) Apakah Anda merasa suara Anda tetap bermakna dalam situasi calon tunggal ini?

Jawaban:

“Untuk suara tetap bermakna karena kita punya pilihan dan kita berdemokrasi negara kita demokrasi jadi apapun keputusan itu ada dipemilihan kepala daerah kabupaten batang hari”.

4) Apakah Anda memiliki rasa percaya terhadap proses demokrasi di daerah Anda?

Jawaban:

“Sangat percaya karena itu adalah titik netralitas dari sebuah kepolitikan dipemilihan umum jadi ini adalah rasa ita percaya kepada KPU yang sudah melaksanakan dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya”.

5) Bagaimana pandangan Anda terhadap calon yang maju sendiri apakah Anda merasa mereka benar-benar mewakili masyarakat?

Jawaban:

“Untuk mewakili masyarakat yang mayoritas ini bahwa itu sudah diwakilkan karena sudah kita ketahui bahwa beliau salah satunya calon tunggal dikabupaten batang hari jadi kita harus percaya dan optimis bahwa beliau akan membangun dan menjalankan dengan baik untuk kabupaten batang hari kedepannya”.

➤ **Dimensi Evaluatif (Penilaian terhadap sistem dan institusi politik yang ada)**

1) Menurut Anda, apakah munculnya calon tunggal mencerminkan demokrasi yang sehat atau justru sebaliknya?

Jawaban:

“Dalam perpolitikan menurut say aitu wajar-wajar saja karena ini kontestasi politik karna disitu mungkin ada kepuasan masyarakat karena juga ada diberbagai partai jadi dia juga banyak untuk jejaring partai jadi pertain pun juga mendukung beliau sepenuhnya maka dalam

kontestasi politik ini itu bisa dibilang bahwa beliau sudah mantap dalam perpolitikan”.

- 2) Bagaimana Anda menilai kinerja partai politik dalam menciptakan alternatif calon yang layak di Pilkada ini?

Jawaban:

“Untuk menilai alternatif perlu banyak pertimbangan didalam partai politik dia punya nanti prosedur-prosedur yang harus dilengkapi untuk kelayakan dalam seorang pemimpin itu sesuai nanti kesepakatan dari beberapa pengurus parpol tersebut maka untuk kelayakan itu dia butuh proses administrasi, keterampilan dalam memimpin dalam jejak pengalaman dan beliau juga melihat dari bagaimana mentalitas dalam memimpin kabupaten batang hari. Tetapi jgn lupa parpol memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memunculkan kader-kader kuat nya sebagai pemimpin, dan juga parpol harus menjadi pilar utama. Untuk apa ada parpol banyak kalo ketika pemilihan mereka bersatu dalam satu calon. Kan prinsip dan pandangan orang itu beda-beda.”

- 3) Apakah menurut Anda kotak kosong adalah solusi yang adil dalam situasi seperti ini?

Jawaban:

“Jadi kalo untuk adil dalam hal demokrasi kita melihat bahwa itu keadilan dalam netralitas maka disediakan surat suara yang kosong biar masyarakat boleh memilih antara calon yang satu atau tidak memilih maka pilihanya kotak/surat suara kosong jadi kitab oleh memilih dalam hal itu ya ini adalah bentuk demokrasi dalam pemilihan kepala daerah”.

- 4) Apakah Anda menilai Pilkada dengan calon tunggal tetap bisa menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat?

Jawaban:

“Dalam kontestasi politik y akita harus melihat nanti selanjutnya apakah itu melihat dari perubahan dari seorang pemimpin itu menjalankan tugas Amanah nya untuk masyarakat atau tidak untuk saat ini kita masih melihat sejauh mana perkembangan dalam bapak buapti kita dalam memimpin kabupaten batang hari maka untuk calon tunggal yaitu sudah terjadi maka kita harus mencari evaluasi nanti mencari

introveksi yang ada pada saat ini apa yang sudah dijalankan program-programnya apakah sudah dirasakan oleh masyarakat batang hari apa belum program yang sudah disampaikan dan apa pun kinerjanya sudah disampaikan diseluruh desa kabupten batang hari atau belum itu menjadi evaluasi nanti selanjutnya”.

5) Bagaimana Anda melihat peran lembaga seperti KPU dan Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi pada Pilkada 2024?

Jawaban:

“Untuk peran KPU dia menjalankan sebagai panitia pemilihan umum menjalankan tugasnya sesuai dengan intruksi dari KPU kabupaten KPU provinsi KPU RI dan itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang sudah dijalankan sedangkan bawaslu juga pengawasan Ketika ada panitia dia ada pengawasan yaitu bawaslu juga ada jenjangnya sampai republic Indonesia ini jadi sudah menjalankan tugasnya masing-masing untuk melihat kualitasnya itu ada memang beberapa kita ketahui dalam komunikasi dalam hal perpolitikan hari ini tetapi yang jelas untuk kabupaten batang hari allhamdulillah itu sangat baik dalam peran tugas fungsinya KPU dan Bawaslu.”

➤ **Dimensi Perilaku (Bentuk nyata partisipasi seperti memilih, berdiskusi, atau aksi politik)**

1) Apakah Anda ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024? Jika ya, apa yang mendorong Anda untuk datang ke TPS?

Jawaban:

“Ya saya berpartisipasi untuk memilih calon, ya saya tetap untuk mencoblos karena itu adalah hak sebagai warga negara dan itu untuk 5 tahun kedepan maka kenapa dorongan saya adalah karena saya cinta dengan demokrasi karena saya cinta kepada demokrasi dan bangsa ini terutama kekabupaten batang hari”.

2) Jika Anda memilih kotak kosong, apa alasan dan harapan Anda?

Jawaban:

“Ya saya tidak memilih kotak kosong tapi saya memilih calon tunggal karena calon tunggal itu rekam jejaknya sudah, pengalamannya sudah beliau lakukan. Tetapi banyak teman teman saya ya memang kan pemuda itu memiliki pikiran kritis jadi mereka menganggap kotak

kosong ini sudah di atur oleh pethana, jadi jika kepentingan banyak di dalam sana maka sebuah kebijakan pemimpin yg terpilih ini kedepannya akan berkurang karna kan memang membalas jasa-jasa dari partai yang seharusnya bisa menjadi lawan tapi menjadi kawan akibat adanya lobi-lobi politiki. Ya jadi tentu banyak anak muda batang hari yang malas datang ke TPS akibat kotak kosong ini.”

- 3) Selain mencoblos, apakah Anda aktif berdiskusi atau menyuarakan pendapat terkait Pilkada kepada teman atau media sosial?

Jawaban:

“Ya setelah pilkada saya terus untuk berdiskusi mengenai keputusan dari yang sudah ditetapkan dengan teman, kerabat, jejaringan kabupaten batang hari untuk bagaimana mengevaluasi kinerja kabupetan batang hari selanjutnya”

- 4) Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi politik atau forum diskusi menjelang Pilkada ini?

Jawaban:

“Kalo untuk forum politik tidak ada tapi lebih tepatnya saya lebih kediskusi independen mahasiswa jadi saya shering untuk diajak untuk diskusi public dengan mahasiswa berkenaan pemilu/pilkada kabuapten/kota”

- 5) Apa harapan Anda sebagai pemuda terhadap proses politik di Batang Hari ke depan setelah Pilkada ini?

Jawaban:

“Untuk harapan ssaya kedepan untuk dalam pemilihan kepala daerah untuk selnjutnya harus membenah diri sebagai pemuda lebih banyak lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk kepemimpinan leadershipnya itu dipertajam ditingkatkan harapan saya anak muda anak muda batang hari bisa melanjutkan regenerasi dari kepala daerah hari ini karena untuk kedepan adalah 5-10 tahun kedepan itu adalah masanya regenerasi maka harus siapkan diri dan persiapkan mental untuk pemuda batang hari yang mana itu adalah untuk kesuksesan kabupaten batang hari kalo bukan kita siapa lagi untuk merawat dan melastarikan semua yang ada di batang hari.

5. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kabupaten Batanghari

Nama : Aman

Jabatan : Tokoh Masyarakat (LAM Jambi Batang Hari)

Waktu : 24 Mei 2025 (15.40 WIB)



Pertanyaan wawancara untuk informan dari kalangan tokoh masyarakat dan masyarakat umum Kabupaten Batang Hari, yang disusun berdasarkan teori partisipasi politik menurut Herbert McClosky dan pengembangnya Verba & Nie (1972). Setiap pertanyaan disusun agar menggali sudut pandang masyarakat terhadap fenomena calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Batang Hari 2024, dengan pendekatan empat dimensi partisipasi politik.

➤ **Dimensi Kognitif (Pengetahuan dan pemahaman tentang politik, pemilu, dan fenomena calon tunggal)**

- 1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pilkada Batang Hari tahun 2024 dan mengapa hanya ada satu pasangan calon?

Jawaban:

“Seperti yang kita ketahui tahun 2024 batang hari ikut pilkada serentak dimana terdapat calon tunggal itu belum pernah terjadi sebelumnya

selaku masyarakat yo apopun itu kito ikuti tapi melihat secara objektifnya pendapat sayo bahaso kito jambi ko kuang elok lah dan mengapo itu terjadi kito dak tau politik kan dinamis dimano sehari biso jadi kawan sehari biso jadi lawan kemudian politik dak ado yang abadi politik itu kepentingan melihat dri situ bahwo bapak padil pandai bermain politik itu be lah”.

2) Apakah Bapak/Ibu memahami arti dan fungsi dari “kotak kosong” dalam pemilu?

Jawaban:

“Secaro garis besarnya boleh dibilang dari KPU setiap calon tunggal tu musuhnyo kotak kosong nah mungkin mengganti calon yang dak ado”.

3) Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat umum di sekitar Bapak/Ibu cukup memahami perbedaan antara memilih calon dan memilih kotak kosong?

Jawaban:

“Sebagian besar pemilih kito masih pemilih yang tuo yang buto politik itu Sebagian besar bingung mano kotak kosong, pokokny masyarakat itu belum pernah menghadapi dan mengalami calon tunggal rato-rato masih bingung, oleh sebab itu seharusnya KPU Batang Hari memberikan sosialisasi yang penuh kepada masyarakat, soalnya jika tidak dipilih maka suara mereka terbuang sia-sia. Masyarakat tidak tau akan memilih yang mana dan apakah kotak kosong boleh di ciblos kan ini masyarakat tidak tau, seharusnya di berikan sosialisasi.”

4) Dari mana biasanya Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang calon dan proses Pilkada—apakah dari media, pemerintah desa, atau pihak lain?

Jawaban:

“Pertama dari pemerintah desa kemudian media online HP tapi dari HP jugo banyak berita yang dak asli untuk lebih akurat pemerintah desa”

5) Seberapa penting bagi Bapak/Ibu adanya lebih dari satu calon dalam Pilkada?

Jawaban:

“Penting karno kito memilih untuk 5 tahun kedepan kalo dak ado musuh berarti kito dak ado penilaian terhadap calon itu karno dak ado perbandingan kalo calon tunggal kito mau bandingkan dengan siapa tapi menurut sayo bodoh kalo milih kotak kosong karno kito dak tau siapa yang aado dibalik itu kalo biso harus ado calon lebi dari satu biar masyarakat biso membandingkan nyo”.

➤ **Dimensi Afektif (Perasaan terhadap demokrasi, pemilu, dan kondisi politik daerah)**

1) Bagaimana perasaan Bapak/Ibu ketika mengetahui hanya ada satu calon yang maju dalam Pilkada Batang Hari 2024?

Jawaban:

“Tidak biso ngomong lagi kalo perasaan hanya tuhan saja yang tau tapi sebagai masyarakat kito ikuti be proses pemilihan tersebut”.

2) Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kondisi ini membuat pemilu menjadi kurang menarik atau bahkan tidak adil?

Jawaban:

“Tidak adil dan kurang menarik saya merasa seperti itu karno masyarakat tidak dapat memilih dan membandingkan”.

3) Apakah Bapak/Ibu merasa terlibat secara emosional atau peduli terhadap hasil Pilkada ini?

Jawaban:

“Sayo terlibat dan peduli karno sayo pengennyo pemimoin kito 5 tahun kedepan memang yang biso mambawa daerah kito maju”.

4) Sejauh mana Bapak/Ibu merasa calon tunggal yang ada benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat?

Jawaban:

“50% 50% lah satu sisi masyarakat dak mau pusing dak mau ribet banyak calon kan disatu sis ikan masyarakat kito ado pemilih pemula

pemilih yang 17-40 tahun yang berfikir yang dari sisi yang tuo itu lah yang dipilih disatu sisi kan mahasiswa anak-anak yang punyo pemikiran ingin membandingkan calon”

5) Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat merasa puas atau kecewa dengan sistem pemilihan seperti ini?

Jawaban:

“Saya tidak berani bilang merasa puas ataupun kecewa karena ini menyangkut individu kito sendiri bukan tim pemenangan”.

6. Masyarakat Kabupaten Batang Hari

Nama : Darmawi

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Batang Hari

Waktu : 23 Mei 2025 (14.25 WIB)



Pertanyaan wawancara untuk informan dari kalangan tokoh masyarakat dan masyarakat umum Kabupaten Batang Hari, yang disusun berdasarkan teori partisipasi politik menurut Herbert McClosky dan pengembangnya Verba & Nie (1972). Setiap pertanyaan disusun agar menggali sudut pandang masyarakat terhadap fenomena calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Batang Hari 2024, dengan pendekatan empat dimensi partisipasi politik.

➤ **Dimensi Evaluatif (Penilaian masyarakat terhadap sistem politik, calon, dan proses Pilkada)**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah Pilkada dengan hanya satu calon mencerminkan demokrasi yang sehat?

Jawaban:

“Sebenarnya demokrasi yang sehat itu bukan tergantung kepada satu calon atau lebih akan tetapi masyarakat diberi wewenang hak memilih dan dipilih itu demokrasi yang sehat. Yang walaupun jika Cuma hanya 1 calon ini menandakan tidak ada pilihan, dan juga meski pun ada kolom kosong jelas yang akan dipilih yang ada gambarnya. Karena penjelasan dan sosialisasi dari pihak KPU dapat dikatakan sedikit

sehingga masyarakat tidak memahami adanya kotak kosong ini. Jadi demokrasi bisa jadi terhambat.”

- 2) Bagaimana Bapak/Ibu menilai peran partai politik dalam menciptakan suasana kompetisi atau alternatif pilihan bagi masyarakat?

Jawaban:

“Dalam partai politik sudah jelas didalam pilkada atau pemilu mereka akan mempromosikan calonnya dengan visi dan misi bukan politik adu domba dengan mengorbitkan pasangannya kepala daerah”

- 3) Apakah masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu?

Jawaban:

“Selama ini belum ada masyarakat bergejolak dengan KPU dan bawaslu demo kekantor baik ditingkat desa dan kecamatan terkait adanya penyelenggara yang tidak benar, mereka baik peserta pemilu itu sendiri dan saksi saksi kan menerima hasil keputusanyo karno itu dilaksanakan dengan jujur dan adil”.

- 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah fenomena calon tunggal ini mencerminkan adanya dominasi politik atau lemahnya oposisi?

Jawaban:

“Tidak dikabupaten batang hari tidak ada dominasi dulu waktu pak padil selaku menaclonek diri hanya ada 3 parpol yang mendukung kan sudah biso karno PPP kan kuat DPRD be 9 kursi orang tu, sudah cukup untuk ngantar calon bupati tapi sampai hari tertentu dak ado yang datang menacalonkan lagi dan diperpanjang lagi tetap jugo dak ado yang datang”.

- 5) Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam proses ini?

Jawaban:

“Jelas kami sebagai masyarakat dak ado intimidasi walaupun pilkada kotak kosong banyak jugo yang milih kotak kosong dk ado ditakut takut I apo lagi diancam Allhamdulillah berjalan lancar”.

➤ **Dimensi Perilaku (Bentuk nyata dari partisipasi seperti menggunakan hak pilih, berdiskusi, hingga aksi sosial)**

1) Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024? Apa motivasi utamanya?

Jawaban:

“Ya saya memilih, motivasi utamanya dalam pilkada 2024 ingin memilih pemimpin yang betul-betul matang karena nih sudah tahun kedua beliau memimpin kito tau visi misi dio sudah terlaksana, mako sayo tetap memilih”

2) Jika memilih kotak kosong, apa alasan Bapak/Ibu dan apakah itu sebagai bentuk protes atau pilihan sadar?

Jawaban:

“Itu sebenarnya ado berapo kemungkinanyo pertama bukan senang terhadap calon tunggalnyo nah kadang-kadang masyarakat itu digiring politik yang tidak sehat ado jugo masyarakat senang dengan calon tapi tidak senang dengan tim nyo ado jugo kepentingan lain menggiring kekotak kosong tapi itu dak masalah kan betuk demokrasi ado hak pilih nyo, sampai jugo ado yang mengkamapnyekan kotak kosong memang dk biso dipungkiri kepemimpinan petahana ini sudah bagus, banyak kurangnya namun buat apo lagi pemilihan lah terjadi maka mau diapokan. Dampaknyo yo banyak orang yang malas ke TPS malah milih karno tau calonnyo Cuma satu dan besar kemungkinan menang.”

3) Apakah Bapak/Ibu aktif berdiskusi dengan tetangga, keluarga, atau tokoh desa mengenai Pilkada dan calon tunggal ini?

Jawaban:

“Jelas kito jangan sampai tetango masyarakat tergiring opini sesat memilih kotak kosong kan kito dak tau orang nyo kedepan tapi jugo dak

makso dengan cara intimidasi kito jelaskan paparkan dengan pemamahan kito lah”.

- 4) Apakah ada kegiatan musyawarah atau forum warga untuk membahas Pilkada secara bersama?

Jawaban:

“Tidak ada karena kalo musyawarah terkait pilkada itu masuk ke kampanye”.

- 5) Setelah Pilkada ini, apakah Bapak/Ibu merasa akan lebih aktif atau justru kurang tertarik dalam kegiatan politik lokal?

Jawaban: “Kita tetap aktif karno politik ini kan kito tidak mengkaji negatifnyo ambil positifnyo itu kito tetap aktif lah sabagai masyarakat”.

DOKUMENTASI SURAT BALASAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. 082162363247, 082162363212/email:hukum@unja.ac.id/laman:law.unja.ac.id

Nomor : 1941/UN21.4/PT.01.04/2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 15 Mei 2025

Yth. 1.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Bapak Ahmad Halim
2.Ketua DPC PPP Kabupaten Batang Hari Bapak Sukran 3.Ketua Pemuda peduli demokrasi Batang
Hari Abang Muttaqin 4.Akademisi Politik Bapak Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si. 5.Tokoh
masyarakat Umum khusus nya warga masyarakat Kabupaten Batang Hari
1.Jl. Jend. Sudirman, KM. 01 Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613 2.Jl. Gajah Mada No.42,
Rengas Condong, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi 36613 3.Jl. 9HHP+C5X,
Beliung, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361 4.Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15,
Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 5.Jl. Lintas Selat-Lubuk
Ruso kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Jurusan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai berikut:

Nama : M.AULIA ZIKRI
N I M : B1B221060
No. HP : 088293527358
Judul Penelitian : Analisis Fenomena Calon Tunggal dalam pilkada Kabupaten
Batanghari pada pemilihan Bupati tahun 2024

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa
tersebut untuk melaksanakan penelitian tugas akhir pada unit/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang
akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 s.d 23 Mei 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP 196512041990032001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BATANG HARI**

Nomor : 012/EKS/DPC/V/2025
Lamp : -
Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth,
M. Aulia Zikri

Di-

Tempat

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam silaturahmi teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa menyertai Saudara dengan taufiq dan hidayahnya. Shalawat salam semoga tecurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW Amin...

Terkait dengan surat permohonan Penelitian yang diberikan Oleh M. Aulia Zikri Mahasiswa Universitas Jambi Pada Tanggal 19 Mei 2025 untuk melaksanakan Penelitian di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Batang Hari, dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Muara Bulian 27 Dzulqoidah 1446
10 Mei 2025

Ketua

(SUKRAN, M.Sos)



Sekretaris

(SAIDINA UMAR, S.E)

Jln. Gajah Mada, No.42 RT.08/02 Kel. Rengas Condong. Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Telp. 081215256175Kode Pos 36613, Email, dpcpppbatanghari84@gmail.com



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : A /PP.07/1504/V/2025

Nama : M. Alvia Zikri
Alamat : Desa Iopak Aur Kecamatan Pematang Yung
Pekerjaan : mahasiswa
Nomor Telepon/E-mail : 0882-9352-7358
Rincian Informasi yang dibutuhkan :
 (tambahkan kertas bila perlu) : Data wawancara secara langsung terkait
 : Komisi Penyelenggaraan Pilkada Serentak
 : di Kabupaten Batang Hari
Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
 : 2. Informasi KPU sebagai Badan Publik
Tujuan Penggunaan Informasi : Sebagai data pendukung penulisan Skripsi
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1. melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
 : 2. mendapatkan salinan informasi
 : (hardcopy / softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil langsung
 : 2. Faksimili
 : 3. E-Mail

Muara Bulian, 26 Mei 2025

Pemohon Informasi


 (M. Alvia Zikri)

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)


 (Dwi P. Sirait)

Keterangan :

* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

Jln. Jendral Sudirman KM. 1 Muara Bulian

Telp. (0743) 23092

Fax: (0743) 23090

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Batang Hari

TANDA BUKTI PEMBERIAN INFORMASI

Nomor : 4/PP.07/1504/V/2025

Nama : M. Aulia Zikri

No. Identitas : Surat Dinas Universitas Jambi Nomor :
1941/UN21.4/PT.01.4/2025

Pekerjaan : Mahasiwa

No. Telepon/HP : 088293527358

Email : -

Rincian Informasi yang diperoleh : Wawancara secara langsung dan data terkait
Teknisi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari

Tujuan Penggunaan Informasi : Sebagai data penunjang Penelitian Skripsi

Muara Bulian 26 Mei 2025

Petugas Pelayan Informasi

Dwi Putri Sirait

Pemohon Informasi

M. Aulia Zikri

CURICULUM VITAE

Photo Jas
Formal 3x4

I. Data Diri

1. Nama : M. Zikri Aulia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Lopak Aur, 05 Januari 2003
3. NIM : B1B221060
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Desa Lopak Aur , Kabupaten Batang Hari
9. Alamat Sekarang : Desa Lopak Aur , Kabupaten Batang Hari
10. Nomor Telepon / HP : 0882-9352-7358
11. E-mail : mzikriaulia3@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

Periode Tahun Mauk dan lulus		Asal Sekolah	Jurusan
2009	2015	SDN 93/1 Lopak Aur	-
2015	2018	SMPN 7 Batang Hari	-
2018	2021	SMKN 9 Muaro Jambi	Teknik Persiapan Penyiaran Televisi (TPSPT)
2021	2025	Universitas Jambi	Program Studi Ilmu Politik